

PERENCANAAN SKENARIO PENGEMBANGAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE

(Studi Pada Ekowisata *Mangrove* Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut
Kota Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

EMA MUSLIMAWATI

NIM. 105030600111012



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2014

MOTTO

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MAN JADDA WA JADA

**"BARANG SIAPA YANG BERSUNGGUH-
SUNGGUH DALAM KEBAIKAN UNTUK
MENCARI RIDHO ALLAH, MAKA PASTI
AKAN BERHASIL"**

TANDA PENGESAHAN



Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Juli 2014
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Ema Muslimawati
Judul : Perencanaan Skenario Pengembangan Ekowisata Huta
Mangrove (Studi pada Ekowisata *Mangrove* Kelurahan
Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)

DAN DINYATAKAN LULUS**MAJELIS PENGUJI**



Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,


Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001
Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Ketua Penguji,

Anggota Penguji,


Dr. Irwan Noor, MA
NIP. 19611024 198601 1 002
Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 Juni 2014



Ema Muslimawati

105030600111012



RINGKASAN

Ema Muslimawati, 2014, **Perencanaan Skenario Pengembangan Ekowisata Hutan *Mangrove* (Studi pada Ekowisata *Mangrove* Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)**, Dr. Choirul Saleh, M.Si, Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, 161 Hal + x

Ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan sebuah potensi daerah yang dimiliki oleh kota Surabaya sebagai kawasan lindung yang tercantum pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2007 dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Surabaya. Proses pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo tersebut dikelola oleh masyarakat Wonorejo dan mendapat dukungan dari pemerintah dan pihak swasta. Ekowisata *mangrove* Wonorejo memiliki manfaat yang sangat melimpah, sehingga dibutuhkan perencanaan untuk menganalisis dan memberikan gambaran tentang kondisi objek wisata tersebut pada masa mendatang. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan potensi *mangrove* Wonorejo yang sesuai dengan aspek lingkungan kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan metode TAIDA. Metode TAIDA adalah langkah-langkah untuk menyusun perencanaan skenario yang terdiri dari *tracking*, *analysing*, *imaging*, *deciding* dan *acting*. Penyusunan skenario menggunakan metode TAIDA dilakukan dengan menjelaskan kondisi yang terjadi pada ekowisata *mangrove* Wonorejo dan dilakukan analisis pada masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, langkah yang dilakukan adalah membayangkan apa yang akan terjadi dan memutuskan langkah yang akan diambil. Tahap terakhir adalah *acting* yang tujuannya untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah diputuskan oleh pihak-pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat dan pihak swasta telah kerjasama dengan baik. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembangannya yaitu pengetahuan masyarakat masih kurang dalam hal melestarikan tanaman *mangrove* fasilitas yang kurang memadai, yaitu tidak ada transportasi menuju obyek wisata, kondisi jalan yang rusak dan tidak adanya alat pembatas sampah yang datang dari laut. Faktor-faktor tersebut menghasilkan sebuah perencanaan skenario paling baik dan paling buruk untuk ekowisata *mangrove* Wonorejo yang berpengaruh pada 5 (lima) aspek yaitu ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan teknologi.

Kata kunci: ekowisata, hutan *mangrove*, perencanaan skenario.

SUMMARY

Ema Muslimawati, 2014, **Scenario Development Planning of Mangrove Forests Ecotourism (Case on Mangrove Ecotourism Village Sub-District Wonorejo Rungkut Surabaya)**, Dr. Choirul Saleh, M.Si, Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, 161 Page + x

Mangrove Ecotourism Wonorejo is a potential area owned by the city of Surabaya as conservation areas or protected areas are listed on the local regulations (PERDA) No. 3 in 2007 with the Saptial Plan of the Policy areas of Surabaya. The process of development mangrove ecotourism Wonorejo are managed by society Wonorejo and be supported by the government and private sector. Mangrove ecotourism wonorejo having the advantage that is very abundant, so that it takes planning to analyze and provides a description of the condition of an object tourist attraction is in the future. The object is to develop more potential mangrove wonorejo in accordance with the aspect of environmental the city of Surabaya.

This research uses descriptive qualitative research and the method used in this research is TAIDA. TAIDA is the method steps to assemble a scenario planning that consists of tracking, analyzing, imaging, deciding and acting. TAIDA describes conditions that occur on ecotourism mangrove Wonorejo and conducted analysis is on the matter at hand. Next step is to imagine what is going to happen and decide the steps to be taken. The last stage is acting to implement the measures that have been decided by the parties concerned.

The results of this research show that the government, community and private parties have cooperation with good. However, there are constraints in the process of the developer that is public knowledge is still lacking in terms of preserving the mangrove plant facilities are inadequate, that there are no connections to tourism, damaged road conditions and the absence of a limiting device of garbage coming from the sea. Those factors produced the best and worst scenario planning for mangrove ecotourism Wonorejo influenced on five aspects, namely economic, political, technological, environmental and social.

Keyword: ecotourism, mangrove forest, scenario planning

KATA PENGANTAR

Segala puja-puji syukur kami panjatkankehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi yang penulis buat berjudul **“Perencanaan Skenario Pengembangan Ekowisata Hutan *Mangrove* (Studi pada Ekowisata *Mangrove* Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)”**.

Skripsi ini dibuat dalam rangka menyusun tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi isyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuannya baik secara moril maupun materiil berupabimbingan, dukungan, dorongan, atau pun do'a baik secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa semua itu penulisan skripsi ini tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan dan dosen pembimbing yang telah mengarahkan dalam membimbing penulis
4. Kepada Orang Tua dan keluarga penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti
5. Kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis	10
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	13
1. Pengertian Administrasi Publik	13
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik	14
3. Fungsi Administrasi Publik	16
B. Perencanaan	17
1. Pengertian Perencanaan	17
2. Jenis-Jenis Perencanaan	19
3. Fungsi Perencanaan	20
4. Pendekatan Perencanaan.....	23
C. Perencanaan Skenario	24
1. Pengertian Perencanaan Skenario.....	24
2. Dasar-Dasar Perencanaan Skenario	27
3. Tujuan Perencanaan Skenario	29
4. Penggunaan Perencanaan Skenario	30
D. Pengembangan Ekowisata	31
1. Pengertian Ekowisata	31
2. Unsur-Unsur Pengelolaan Kawasan Ekowisata	32
3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Ekowisata	34
4. Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Ekowisata.....	36

E. Hutan Mangrove	37
1. Pengertian Hutan <i>Mangrove</i>	37
2. Zonasi Hutan <i>Mangrove</i>	39
3. Fungsi Hutan <i>Mangrove</i>	40
4. Karakteristik Hutan <i>Mangrove</i>	42
5. Kedudukan Hutan <i>Mangrove</i> dalam Perundangan dan Peraturan	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	46
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrument Data	59
G. Metode Pengujian Keabsahan Data	60
H. Analisis Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Gambaran Umum Kota Surabaya	64
a. Kondisi Geografis	64
b. Demografi	66
c. Kondisi Sosial Ekonomi	67
d. Kebudayaan	69
e. Kesenian	70
2. Gambaran Umum Kelurahan Wonorejo	71
a. Kondisi Geografis	71
b. Demografi	74
c. Kelembagaan Masyarakat	76
d. Upaya Kelurahan Wonorejo	78
B. Penyajian Data	80
1. Kondisi Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	80
a. Sejarah Berdirinya Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	80
b. Manfaat dan Fungsi <i>Mangrove</i> Wonorejo	87
c. Hasil Produksi <i>Mangrove</i> Wonorejo	89
d. Peran <i>Stakeholder</i>	94
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	99
a. Faktor Pendukung	99
b. Faktor Penghambat	100
3. Perencanaan Skenario Untuk Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	102
a. <i>Tracking</i>	102
b. <i>Analysing</i>	104

c. <i>Imaging</i>	105
d. <i>Deciding</i>	106
e. <i>Acting</i>	107
C. Pembahasan	108
1. Kondisi Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	108
a. Sejarah Berdirinya Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	108
b. Manfaat dan Fungsi <i>Mangrove</i> Wonorejo	113
c. Hasil Produksi <i>Mangrove</i> Wonorejo	116
d. Peran <i>Stakeholder</i>	119
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	122
a. Faktor Pendukung	123
b. Faktor Penghambat	125
3. Perencanaan Skenario Untuk Pengembangan Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	128
a. <i>Tracking</i>	129
b. <i>Analysing</i>	132
c. <i>Imaging</i>	138
d. <i>Deciding</i>	140
e. <i>Acting</i>	150
 BAB V PENUTUPAN	
A. Kesimpulan	155
B. Saran	159

**DAFTAR PUSTAKA
CURICULUM VITAE**



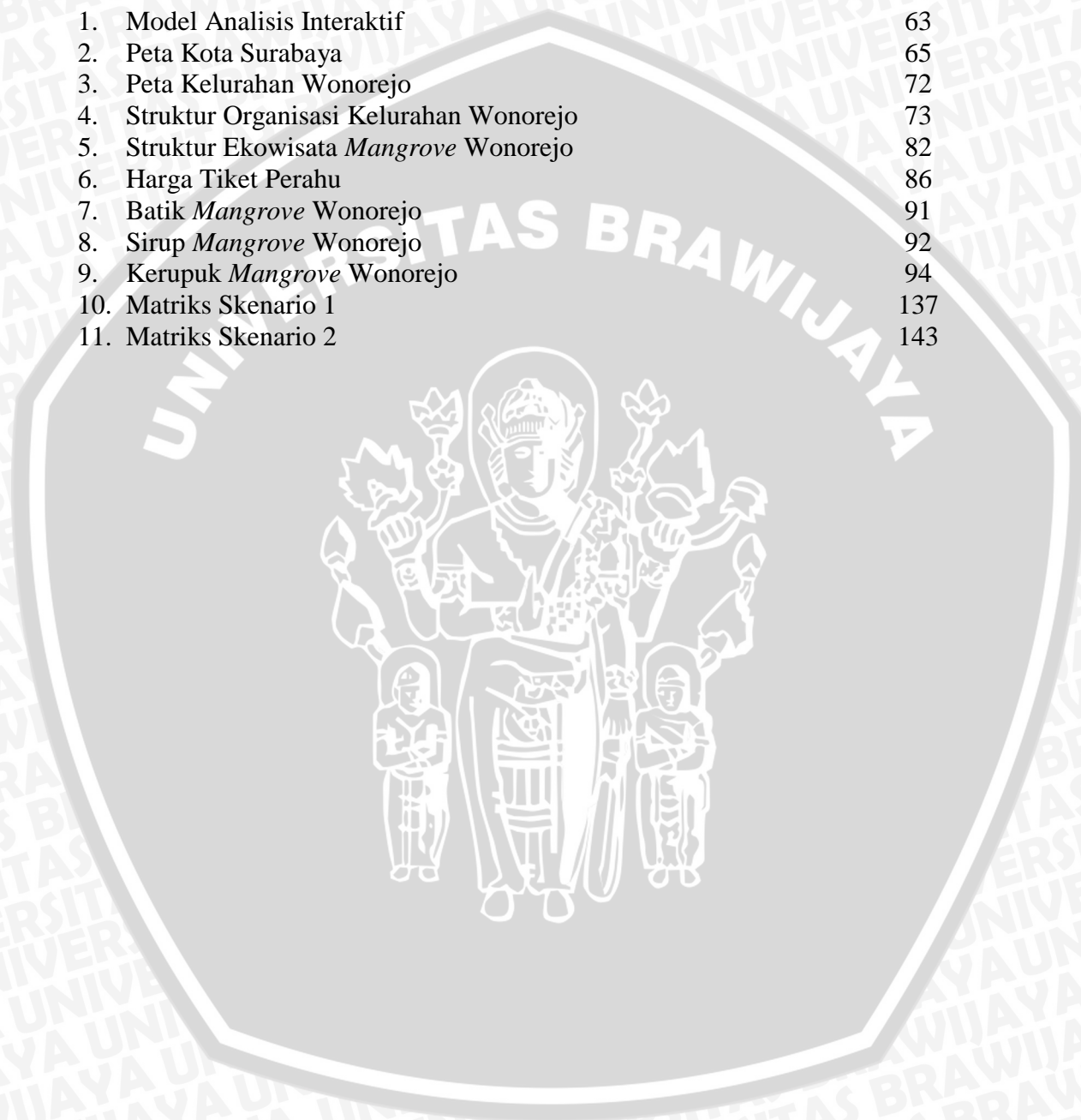
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Luas Hutan <i>Mangrove</i> Pamurbaya Tahun 2010-2013	6
2.	Perbedaan Antara <i>Scenario</i> , <i>Forecasting</i> dan <i>Visions</i>	28
3.	Luas Hutan <i>Mangrove</i> Wonorejo Tahun 2010-2013	84
4.	Fasilitas Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	85
5.	Jumlah Penanaman <i>Mangrove</i> Berdasarkan Lokasi Di Kelurahan Wonorejo Tahun 2011-2013	96
6.	Analisis SWOT	126
7.	<i>Driving Forces</i> Perencanaan Skenario Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	135
8.	Penjelasan Q ₁ (+,+) (Paling Baik)	143
9.	Penjelasan Q ₂ (-,+) (Baik)	145
10.	Penjelasan Q ₃ (+,-) (Buruk)	147
11.	Penjelasan Q ₄ (-,-) (Paling Buruk)	149



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Model Analisis Interaktif	63
2.	Peta Kota Surabaya	65
3.	Peta Kelurahan Wonorejo	72
4.	Struktur Organisasi Kelurahan Wonorejo	73
5.	Struktur Ekowisata <i>Mangrove</i> Wonorejo	82
6.	Harga Tiket Perahu	86
7.	Batik <i>Mangrove</i> Wonorejo	91
8.	Sirup <i>Mangrove</i> Wonorejo	92
9.	Kerupuk <i>Mangrove</i> Wonorejo	94
10.	Matriks Skenario 1	137
11.	Matriks Skenario 2	143



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Peraturan Walikota (PERWALI) No. 65 Tahun 2011 Tentang Prosedur dan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan *Mangrove* di Surabaya
- Lampiran 3 Kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya Tahun 2011-2015
- Lampiran 4 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya (Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007)
- Lampiran 5 Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kota Surabaya
- Lampiran 6 Hasil Foto Kondisi Ekowisata *Mangrove* Wonorejo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik adalah aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayanan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain (Hughes dalam Nababan, 2004:2). Sedangkan Wilson dalam Syafri (2012: 21) menjelaskan administrasi publik adalah urusan atau praktik pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat atau swasta.

Administrasi publik memiliki fungsi atau tugas utama yaitu merencanakan dan merumuskan kebijakan politik, kemudian melaksanakan dan menyelenggarakannya. Menurut Wayong dalam Syafri (2012:139), fungsi administrasi publik adalah merumuskan atau menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah dalam kegiatan administrasi publik tersebut mempunyai kewajiban dalam menyusun perencanaan yang matang sesuai dengan negara yang dipimpinnya. Menurut Conyers dan Hills dalam Tarigan (2012:5) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yaitu yang pertama ialah

penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula (Widjojo dalam Tjokroaminoto, 1987:14).

Perencanaan merupakan hal terpenting yang harus disusun, karena dengan perencanaan dapat lebih teratur dan terperinci. Penyusunan perencanaan dapat menggunakan perencanaan skenario. Menurut Trisnantoro (2008), perencanaan skenario adalah alat bantu untuk melihat ke depan yang penuh ketidak-pastian. Inti dari perencanaan skenario adalah pengembangan gambaran mengenai kemungkinan-kemungkinan kondisi di masa mendatang dan mengidentifikasi perubahan-perubahan, serta implikasinya yang muncul sebagai akibat dari kondisi tersebut. Perencanaan skenario dilakukan untuk menilai skenario-skenario yang memungkinkan untuk suatu kegiatan, misalnya kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk dan berbagai kemungkinan diantaranya. Sedangkan menurut Schwartz dalam Lindgreen dan Bandhold (2003:21) perencanaan skenario adalah sebuah alat untuk menyampaikan persepsi seseorang tentang masa depan yang bertujuan mengambil keputusan.

Perencanaan skenario dapat memberikan gambaran mengenai masa depan dengan mengidentifikasi dan memahami kondisi yang terjadi sebelumnya dari

obyek yang akan direncanakan. Tujuan dari perencanaan skenario tersebut diperkuat oleh pendapat Ringland (2002:16), yaitu perencanaan skenario bertujuan membuat gambaran kehidupan nyata masa depan sehingga dapat menjawab dua hal mendasar. Pertama, untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian pada masa depan yang sebelumnya tidak di perkirakan, dengan menggali berbagai hambatan perubahan lingkungan eksternal atau hubungan antar berbagai faktor terkait, kedua untuk membuat sebuah model yang memungkinkan untuk mengetahui bukti-bukti yang terlihat jelas maupun tidak sejak awal. Selain itu, Lindgreen dan Bandhold (2003:38) memberikan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyusun skenario, yang dinamakan sebagai TAIDA (*Tracking, Analysing, Imaging, Deciding* dan *Acting*). Metode ini memberikan kemudahan dalam melakukan penyusunan perencanaan skenario, karena dalam metode ini akan mengkaji tentang kondisi yang terjadi dari objek yang diteliti dan dilakukan analisis, sehingga dapat diambil keputusan dengan isu-isu yang mempengaruhi.

Perencanaan skenario dapat di gunakan untuk mengelola potensi yang ada di Indonesia. Sehingga potensi yang dimiliki akan lebih terkelola dengan baik dengan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik dari sisi positif maupun negatif, guna menganalisis sesuatu yang akan terjadi, salah satunya dalam sektor pariwisata yaitu pengembangan ekowisata. Sebab Indonesia memiliki pulau-pulau sebanyak 13.466 ribu (metronews.com, 2013) yang merupakan daerah potensial untuk mengembangkan ekowisata karena potensi alam, seni, budaya, dan etnis yang beragam. Pengembangan ekowisata ini sesuai dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 33 Tahun 2009

Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial-budaya etnis setempat, dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam di sekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal (Yoeti, 1999:38). Menurut Hector dan Lascurain dalam Hakim (2004:52), ekowisata adalah perjalanan wisatawan menuju daerah alamiah yang relatif belum terganggu atau terkontaminasi.

Pengembangan ekowisata sendiri memiliki berbagai macam, salah satunya adalah hutan *mangrove*, karena Indonesia memiliki sumber daya wilayah pesisir laut yang besar. Hutan *mangrove* adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembab dan berlumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Harahab, 2010:27). *Mangrove* tumbuh di tanah yang tidak mengandung oksigen dan harus memperoleh hampir seluruh oksigen untuk akar-akarnya dari atmosfer. Karena itu, akar tumbuhan *mangrove* terlihat unik dan khas, di antaranya ada yang melengkung, ada yang mencuat ke permukaan, dan ada yang mirip lutut. Spesies tumbuhan *Rhizophora* memenuhi kebutuhan oksigen dengan akar-akar tunjang yang mencuat sampai satu meter atau lebih di atas permukaan tanah. Akar-akar tersebut mempunyai banyak pori-pori yang disebut *lenticels*. Pada waktu air surut, oksigen terserap ke dalam tanaman melalui *lenticels* dan turun ke akar (Supriharyono dalam Ghufuran, 2012:15).

Kawasan hutan *mangrove* juga terdapat di kota Surabaya dan terbagi dalam beberapa wilayah yang terletak di pantai utara Surabaya dan pantai timur Surabaya. Untuk melindungi dan menjaga kawasan hutan *mangrove* tersebut, walikota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota (PERWALI) No. 65 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan *Mangrove* di Wilayah Kota Surabaya. Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Walikota tersebut adalah untuk melestarikan kawasan *mangrove* dan melindungi ekosistem di pesisir pantai kota Surabaya. Peraturan untuk melindungi kawasan hutan *mangrove* tidak hanya tercantum pada Peraturan Walikota, melainkan juga tercantum pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menetapkan bahwa kawasan pantai timur Surabaya (Pamurbaya) sebagai wilayah konservasi atau kawasan lindung. Pantai timur Surabaya ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Gunung Anyar dan Kecamatan Rungkut. Berikut data luas hutan *mangrove* pantai timur Surabaya (Pamurbaya) pada tahun 2010-2013:

Tabel 1
Luas Hutan *Mangrove* Pantai Timur Surabaya Tahun 2010-2013

Kecamatan/Kelurahan	Luas Hutan <i>Mangrove</i> (ha)			
	2010	2011	2012	2013
Kecamatan Mulyorejo				
- Kalisari	97,52	97,52	97,52	97,52
- Kejawan Putih Tambak	49,32	49,32	49,32	49,32
Kecamatan Sukolilo				
- Keputih	116,91	96,91	96,07	96,15
Kecamatan Rungkut				
- Wonorejo	64,27	63,8	64,83	73,28
- Medokan Ayu	89,74	89,74	90,06	90,31
Kecamatan Gunung Anyar				
- Gunung Anyar Tambak	73,86	73,86	73,95	75,28

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Dari keempat kecamatan tersebut, kecamatan Rungkut menjadikan potensi hutan *mangrove* sebagai objek wisata berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan ekowisata. Lokasi ekowisata tersebut terletak di kelurahan Wonorejo, karena lokasinya yang mudah di akses. Ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo diresmikan pada tahun 2009 oleh walikota Surabaya saat itu yaitu Bapak Bambang Dwi Hartono. Pengelolaan ekowisata tersebut dilakukan masyarakat kelurahan Wonorejo dengan membentuk suatu struktur organisasi dan didukung oleh pemerintah kota Surabaya dan pihak swasta. Pemerintah kota Surabaya memberikan bantuan sarana prasarana yang diwenangkan kepada Dinas Pertanian kota Surabaya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya. Pihak swasta pun memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana beserta perawatannya.

Pemerintah dan pihak swasta tersebut merupakan pihak yang mendukung untuk pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo, karena *mangrove* Wonorejo adalah potensi alam yang perlu untuk dilindungi dan dikelola tanpa harus menghilangkan aspek lingkungannya.

Proses pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo masih mengalami kekurangan dari faktor partisipasi masyarakat yang kurang dalam menjaga lingkungan dan fasilitas yang belum memadai. Faktor partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat Wonorejo dalam menjaga lingkungan *mangrove*. Sebagian dari masyarakat Wonorejo masih belum memahami tanaman *mangrove* dan fungsi juga manfaat dari tanaman tersebut. Jika pengetahuan masyarakat masih minim tentang pentingnya menjaga tanaman *mangrove*, maka tanaman tersebut sulit untuk bertahan. Sehingga dibutuhkan penyuluhan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat pentingnya menjaga tanaman *mangrove* beserta lingkungannya. Sedangkan untuk faktor fasilitas, tidak adanya transportasi umum menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo, kondisi jalan yang masih belum baik dan sarana prasarana yang masih membutuhkan perawatan. Fasilitas yang kurang memadai akan membuat pengunjung kesulitan menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo, sebab lokasi ekowisata *mangrove* Wonorejo berada di pinggiran kota Surabaya yang letaknya lumayan sulit untuk diakses oleh transportasi umum.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kurang memadainya fasilitas dapat menghambat berkembangnya obyek wisata yang berwawasan lingkungan di kelurahan Wonorejo ini, karena jika potensi alam ini

dapat dikelola secara baik dengan mempertimbangkan aspek lingkungan maka memberikan manfaat kepada semua pihak terkait. Manfaat dari ekowisata *mangrove* Wonorejo dapat dilihat dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Pada aspek ekonomi, masyarakat Wonorejo memiliki suatu hasil produksi dari tanaman *mangrove* yaitu batik *mangrove*, sirup *mangrove*, kerupuk *mangrove* dan sabun *mangrove*, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga daerah. Aspek lingkungan, batang dan buah tanaman *mangrove* bisa dijadikan hasil produksi dan hal tersebut adalah salah satu upaya ramah lingkungan. Sedangkan dari aspek sosial, masyarakat akan mendapatkan tambahan pendapatan dari mengelola tanaman *mangrove* dan sebagai pengurus atau pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo, sehingga kesejahteraan hidup meningkat.

Ekowisata *mangrove* Wonorejo sangat berpotensi dalam segala aspek, jika mampu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan perencanaan skenario sebagai alat untuk memberikan solusi dari kendala yang dihadapi tersebut. Sebab, potensi yang dimiliki ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo dapat memberikan banyak manfaat jika mampu dikembangkan dengan baik sesuai dengan kondisi dari ekowisata tersebut. Sehingga ketertarikan penulis dalam pengembangan ekowisata ini maka penulis mengambil judul mengenai **“Perencanaan Skenario Pengembangan Ekowisata Hutan *Mangrove* (Studi pada Ekowisata Hutan *Mangrove* Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)”**.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah kondisi ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo ?
- 2) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo ?
- 3) Bagaimanakah bentuk perencanaan skenario dalam pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo.
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan pendorong dalam mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo
- 3) Untuk menggambarkan dan menganalisis perencanaan skenario dalam pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian tentang Perencanaan Skenario Pengembangan Ekowisata Hutan *Mangrove* ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak terkait antara lain:

- 1) Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik.

2) Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelola ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo dan pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan obyek wisata dimana penelitian dilakukan.

E. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan isi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah mengenai pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, rumusan masalah mengenai kondisi ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, perencanaan skenario ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo dan faktor penghambat dan pendorong. Selain itu, pada bab ini berisi tentang kontribusi penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya: pengertian-pengertian, unsur-unsur, fungsi, prinsip, karakteristik, dan peraturan yang berkaitan dengan perencanaan skenario dan pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo.

BAB III : METODE PENELITIAN

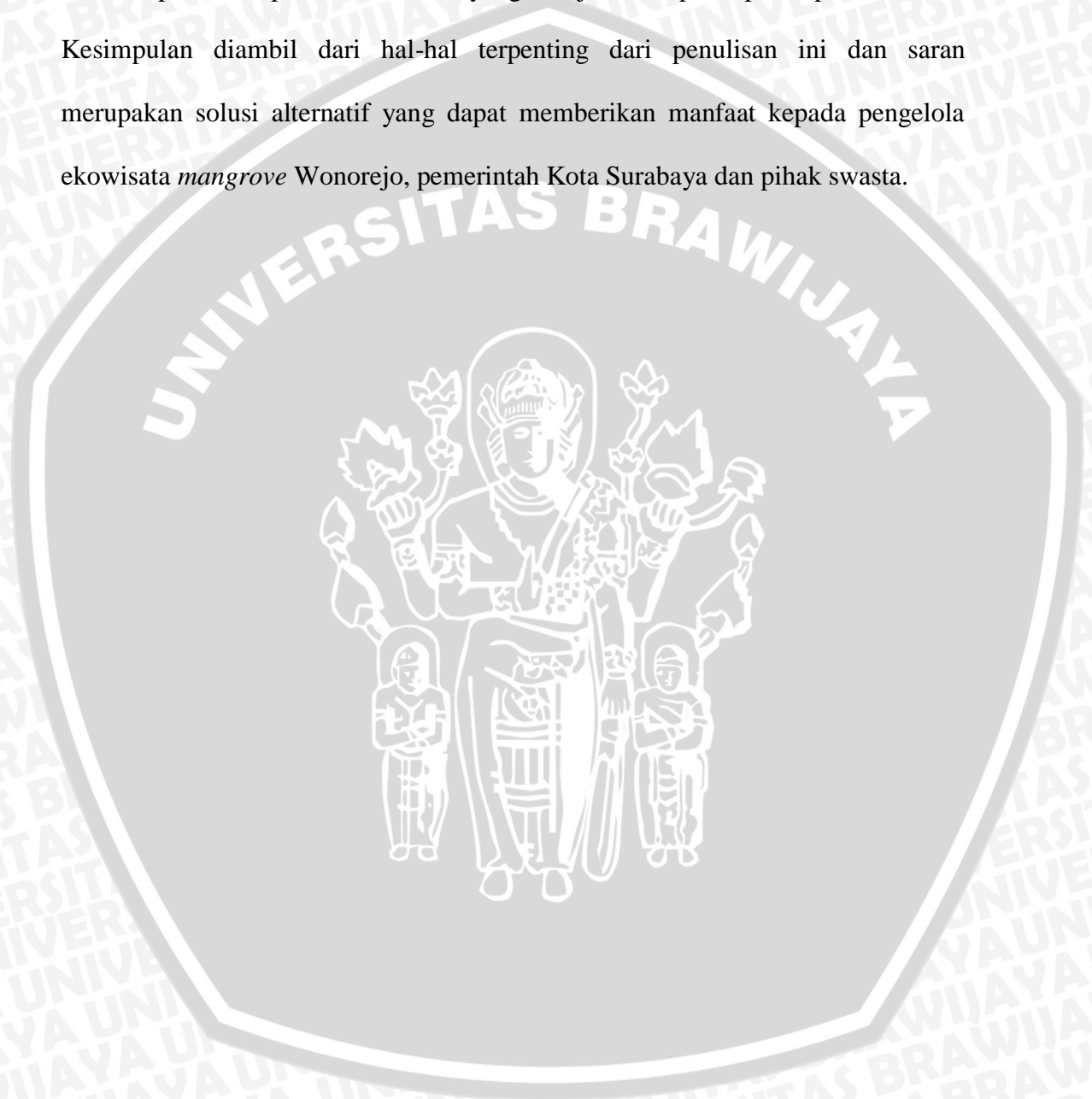
Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan yang mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisa data. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan mengungkapkan masalah, keadaan dan menjelaskan tentang perencanaan skenario pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai kondisi yang terjadi di ekowisata *mangrove* Wonorejo yang terdiri dari manfaat *mangrove* Wonorejo, hasil produksi *mangrove* Wonorejo dan peran *stakeholder*. Tidak hanya kondisi yang terjadi, melainkan faktor pendorong dan penghambat dalam mengembangkan objek wisata tersebut. Sehingga permasalahan yang dihadapi ekowisata *mangrove* Wonorejo tersebut, penulis menggunakan perencanaan skenario. Untuk membuat perencanaan skenario dari ekowisata *mangrove* Wonorejo, penulis menggunakan metode TAIDA (*tracking, analysing, imaging, deciding and acting*). Metode tersebut akan membantu untuk menyusun perencanaan skenario karena terdapat langkah-langkah yang memberikan kemudahan. Dari perencanaan skenario tersebut akan membantu mencari solusi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh ekowisata *mangrove* Wonorejo.

BAB V : PENUTUPAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Kesimpulan diambil dari hal-hal terpenting dari penulisan ini dan saran merupakan solusi alternatif yang dapat memberikan manfaat kepada pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo, pemerintah Kota Surabaya dan pihak swasta.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik sudah ada sejak dulu, namun istilah yang digunakan bukan administrasi publik melainkan administrasi negara. Administrasi publik didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara (Siagian dalam Syafri, 2012:9). Sedangkan Simon, Smithburg dan Thomson dalam Syafri (2012:23) mengemukakan administrasi publik adalah sebagai berikut :

“Administrasi publik adalah aktivitas cabang eksekutif dari pemerintah tingkat negara, negara bagian dan daerah, aktivitas badan dan komisi yang ditetapkan oleh kongres dan ketentuan perundang-undangan negara bagian, aktivitas perusahaan negara dan dinas-dinas tertentu lainnya yang bersifat khusus yang dikecualikan dalam hubungan ini adalah dinas yudisial dan legislatif di dalam administrasi pemerintah”.

Pengertian administrasi publik juga di jelaskan oleh Gordon dalam Nababan (2004:1) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Adminsitration publik memusatkan perhatiannya

pada berbagai kebijakan dan program organisasi pemerintah, termasuk perilaku para pejabat (yang biasanya tidak dipilih) yang secara formal bertanggung jawab atas perilaku mereka (Levine, Peters dan Thomson dalam Syafri, 2012:21).

Sedangkan Nicholas dalam Nababan (2004:5) menjelaskan pengertian administrasi publik adalah:

“Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan jugamendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administarasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan secara baik”.

Dari beberapa pengertian adminsitrası publik diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan tahap-tahap kebijakan publik yang meliputi formulasi dan implementasi kebijakan publik, berkaitan dengan proses kerjasama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, kegiatannya menghasilkan berupa barang dan jasa dan mempunyai aspek praktis dan teoritis.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Dalam adminstrasi publik terdapat ruang lingkup yang berhubungan, hal ini untuk menjangkau suatu tujuan yang akan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Secara lebih rinci Lembaga Administrasi Negara dalam Syafri (2012: 115) menjelaskan bahwa sebagai suatu disiplin dan sistem, ruang lingkup administrasi publik meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Tata nilai: menyangkut nilai cultural, spiritual, etika, falsafah hidup yang menjadi dasar dan tujuan serta acuan perilaku dari sistem dan proses administrasi publik.
- b. Organisasi pemerintah negara: terdiri dari organisasi lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (badan perwakilan rakyat), yudikatif (badan peradilan), dan lembaga-lembaga negara lainnya yang diperlukan serta saling hubungannya dalam rangka penyelenggaraan negara, termasuk organisasi kesekretariatan lembaga-lembaga tersebut.
- c. Manajemen pemerintahan negara: meliputi kegiatan pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan dan wilayah pemerintahan, merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, seperti pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hasil-hasilnya dari setiap atau keseluruhan organisasi pemerintahan negara.
- d. Sumber daya aparatur: sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya, mulai dari *recruitment*, pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan kesejahteraan serta pemensiunannya.
- e. Sistem dan proses kebijakan negara: sebagai sistem dan proses kebijakan negara, peran administrasi publik terutama dalam fungsi dan proses:
 1. Perumusan kebijakan.
 2. Penetapan kebijakan.
 3. Pelaksanaan kebijakan.
 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.
 5. Penilaian hasil (evaluasi kerja) pelaksanaan berbagai kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- f. Posisi, kondisi, dan peran masyarakat bangsa dalam bernegara: negara didiriakn oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama sehingga rakyatlah pemilik kedaulatan. Dengan demikian, organisasi dan manajemen pemerintahan tidak dapat mengabaikan aspirasi dan peran masyarakat atau rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- g. Hukum administrasi publik: menyangkut dimensi hukum yang bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara, saling berhubungan satu dengan yang lain dimaksudkan agar kelembagaan negara tersusun dan terselenggara secara efisien, proposional, efektif, dan *legitimate*.

Dari penjelasan ruang lingkup administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa aspek terpenting dalam menentukan ruang lingkup administrasi publik adalah kepentingan publik sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan

terhadap masyarakat yang menjadi sebuah hak yang patut masyarakat terima. Dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan berusaha menyusun sebuah perencanaan yang mampu memberikan kontribusi kepada rakyat dengan selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta guna memaksimalkan perencanaan.

3. Fungsi Administrasi Publik

Pelaksanaan administrasi publik memiliki fungsi yang bertujuan untuk mencapai target dan sasaran yang diharapkan, oleh karena itu menurut Syafri (2012:138) membagi kekuasaan pemerintah ke dalam dua kekuasaan, yakni sebagai berikut :

- a. Tingkat politik mempunyai fungsi merumuskan kebijakan umum (kebijakan negara atau kebijakan publik). Perumusan kebijakan umum dilakukan oleh badan perwakilan rakyat (legislatif) sebagai organ tingkat politik bersama Presiden.
- b. Tingkat administrasi mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan umum atau kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh tingkat politik. Di Indonesia, pelaksana kebijakan umum atau kebijakan publik dilaksanakan oleh Presiden dan pembantu-pembantu presiden (para menteri).

Sedangkan menurut pendapat Wayong dalam Syafri (2012:139) fungsi atau tugas utama administrasi publik pada dasarnya adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik kemudian melaksanakan dan menyelenggarakannya. Dengan kata lain, fungsi administrasi publik adalah merumuskan atau menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik.

Fungsi administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan dari administrasi publik adalah dari proses perencanaan dan pelaksanaan harus dikaji secara dalam oleh para pemangku kebijakan. Sehingga dalam hal ini

pemerintah mempunyai kewajiban penuh yang harus dilakukan untuk menyusun perencanaan yang matang dan dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan. Pada pelaksanaannya, peran masyarakat juga diperhitungkan sebagai pendukung berjalannya kebijakan yang disusun.

B. Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu arahan yang dirancang untuk melakukan suatu kegiatan pada waktu mendatang. Menurut Nugroho Iwan dalam Nurliana (2013:7) perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praktik (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik.

Pengertian perencanaan juga dijelaskan oleh Menurut Friedman dalam Tarigan (2003:4) sebagai berikut:

“Planning is prima a way of thinking about social and economic problems, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program”.

Dari penjelasan Friedman diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan cara berpikir dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang

bertujuan untuk menghasilkan sesuatu di masa depan dengan menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan program.

Pendapat tentang pengertian perencanaan diatas diperkuat dengan pendapat Mitzburg dalam Wibowo (2009:50), sebagai berikut:

- a) Perencanaan berarti pemikiran maju (masa depan).
- b) Perencanaan berarti mengontrol masa depan.
- c) Perencanaan adalah pengambilan keputusan.
- d) Perencanaan adalah pengambilan keputusan terintegrasi.
- e) Perencanaan adalah proses terformalisasi untuk menghasilkan hasil yang terartikulasi, dalam bentuk sistem yang terintegrasi dalam keputusan-keputusan yang ada.

Sedangkan Widjojo dalam Bintoro Tjokroaminoto (1987:14) menjelaskan perencanaan sebagai berikut:

“Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yaitu yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula”.

Menurut Conyers dan Hills dalam Tarigan (2012:5) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian-pengertian perencanaan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah memikirkan masa depan dengan melihat aspek yang mempengaruhi, sehingga dapat mengambil sebuah keputusan. Perencanaan

menjadikan sesuatu menjadi lebih terkendali, karena didalam perencanaan terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung. Faktor-faktor ini yang akan menjadi bahan untuk menyusun sebuah perencanaan. Oleh karena itu, pada saat menyusun perencanaan membutuhkan informasi yang terpercaya dari suatu permasalahan. Perencanaan ini juga sangat dibutuhkan untuk berbagai pihak, termasuk pengelola ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo yang menjadi objek penelitian. Tujuannya supaya objek wisata ini dapat terus berkembang dengan potensi yang dimiliki tanpa mengurangi maupun merusak ekosistem *mangrove* disana, karena potensi dari ekowisata hutan *mangrove* ini sangat baik untuk aspek lingkungan yang dapat memberikan manfaat dalam sektor ekonomi dan sosial.

2. Jenis-Jenis Perencanaan

Perencanaan memiliki berbagai jenis-jenis yang sesuai dengan kebutuhan dari proses pelaksanaan perencanaan tersebut. Menurut Tarigan (2012:14) di Indonesia di kenal jenis *top-down and bottom-up planning*, *vertical* dan *horizontal planning*, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis perencanaan diatas:

a. Perencanaan Fisik Versus Perencanaan Ekonomi

Perencanaan fisik adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah misalnya perencanaan tata ruang atau tata gunan tanah, perencanaan jalur transportasi atau komunikasi, penyediaan fasilitas untuk umum, dan lain-lain. Perencanaan ekonomi berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu

wilayah. Perencanaan ekonomi lebih didasarkan atas mekanisme pasar ketimbang perencanaan fisik yang lebih didasarkan atas kelayakan teknik.

b. Perencanaan Alokatif Versus Perencanaan Inovatif

Perencanaan Alokatif berkenaan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Jadi, inti kegiatannya berupa koordinasi dan sinkronisasi agar sistem kerja untuk mencapai tujuan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien sepanjang waktu, karena sifatnya, model perencanaan ini kadang-kadang disebut *regulatory planning* (mengatur pelaksanaan). Perencanaan inovatif, para perencana lebih memiliki kebebasan, baik dalam menetapkan target maupun cara yang ditempuh untuk mencapai target tersebut. Artinya, mereka dapat menetapkan prosedur atau cara-cara baru, yang penting target itu dapat dicapai atau dilampaui. Wujud perencanaan ini adalah menciptakan sistem baru ataupun perubahan-perubahan yang dapat memberikan hasil akhir yang lebih besar atau lebih baik.

c. Perencanaan Bertujuan Jamak Versus Perencanaan Bertujuan Tunggal

Pembedaan ini didasarkan atas luas pandang, yaitu antara perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal. Perencanaan dapat mempunyai tujuan dan sasaran tunggal atau jamak. Perencanaan bertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan bersifat tunggal. Perencanaan bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa tujuan sekaligus.

d. Perencanaan Bertujuan Jelas Versus Perencanaan Bertujuan Laten

Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan yang dengan tegas menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yang sasarnya dapat diukur keberhasilannya. Perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran dan bahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga sulit untuk dijabarkan.

e. Perencanaan Indikatif Versus Perencanaan Imperatif

Perencanaan Indikatif adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi, artinya tidak dipatok dengan tegas. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang mengatur baik sasaran, prosedur, pelaksanaan, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut.

f. Top Down Versus Bottom Up Planning

Perencanaan model *Top Down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada instansi yang lebih tinggi dimana institusi perencana pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Sebaliknya, *bottom up planning* adalah kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah, di mana institusi perencana pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencana pada tingkat yang lebih rendah.

g. Vertical Versus Horizontal Planning

Vertical planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Model ini mengutamakan keberhasilan sektoral, jadi menekankan pentingnya koordinasi antar berbagai jenjang pada instansi yang sama (sektor yang sama). *Horizontal planning* adalah menekankan keterkaitan antar berbagai sektor sehinggalah berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi, *horizontal planning* melihat pentingnya koordinasi antar berbagai instansi pada level yang sama, ketika masing-masing instansi menangani kegiatan atau sektor yang berbeda.

h. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung Versus yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung

Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana tersebut. Sedangkan perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dalam perencanaan tersebut dan biasanya hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis perencanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan memiliki cara yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Hal tersebut akan lebih memudahkan perencana dalam menyusun rencana dengan menetapkan target yang ingin dicapai. Jenis-jenis perencanaan tersebut akan menjadi salah satu cara dalam mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo di Surabaya. Sehingga yang akan digunakan untuk objek wisata ini harus sesuai dengan kondisi yang terjadi di Wonorejo, sehingga dapat dilihat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi.

3. Fungsi Perencanaan

Perencanaan pada dasarnya melakukan suatu kegiatan yang akan dilakukan untuk waktu kedepan dengan melihat aspek yang mempengaruhi dan faktor yang dapat menghambat dari perencanaan tersebut. Menurut Solihin dalam

Wibowo (2009:57) membagi fungsi perencanaan menjadi enam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah.
- c. Perencanaan dapat memperkirakan (*forecast*) terhadap hal-hal yang akan dilalui.
- d. Perencanaan memberi kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik.
- e. Perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas (tujuan, sasaran, maupun tindakan).
- f. Dengan perencanaan maka akan ada alat ukur untuk melakukan evaluasi.

Fungsi dari perencanaan juga diperkuat dengan pendapat Soeparto dalam Yosin (2013:813) sebagai berikut:

1. Alat efisiensi dan alat untuk mengurangi biaya (*a cost reducing tool*).
2. Alat pengarahan kegiatan kepada pencapaian tujuan.
3. Pembentuk masa datang dengan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminimal mungkin.
4. Alat-alat untuk memilih alternatif cara terbaik untuk kombinasi alternatif cara yang terbaik.
5. Alat penentuan prioritas dari pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan.
6. Alat pengukur atau standar untuk pengawasan dan penilaian (*control and evaluation*).

Perencanaan memiliki beberapa fungsi yang terdapat diatas dan memberikan manfaat bahwa perencanaan sangat baik dalam sebuah pembangunan, karena mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan masa yang akan datang. Tidak hanya itu, dengan perencanaan lebih bisa tertata dengan baik karena perencanaan memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi saat proses pelaksanaannya. Perencanaan memiliki fungsi yang tidak hanya yang sedang terjadi melainkan yang akan terjadi sehingga pembuat kebijakan dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan.

4. Pendekatan Perencanaan

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah :

- a. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:
 - 1) Mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
 - 2) Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - 3) Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
 - 4) Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
 - 5) Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
 - 6) Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
 - 7) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
 - 8) Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
 - 9) Menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:
 - 1) Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - 3) Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
 - 4) Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
 - 5) Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - 6) Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

- c. Pendekatan politis, bahwa program program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
- 1) Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan.
 - 2) Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
 - 3) Pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
 - 4) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas bawah (*top-down*), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pendekatan perencanaan yang telah dijelaskan diatas dapat gunakan pada saat melakukan implementasi perencanaan untuk ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo. Pengelola ekowisata pada saat melakukan perencanaan tersebut harus melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan. Pemerintah daerah merupakan pihak terkait yang perannya sangat penting terutama berkaitan dengan potensi yang dimiliki. Peran dari pemerintah adalah membuat kebijakan dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi potensi alam dan membuat perencanaan yang perlu melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.

C. Perencanaan Skenario

1. Pengertian Perencanaan Skenario

Perencanaan skenario merupakan suatu langkah yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap masa yang akan datang dengan mengidentifikasi

isu-isu yang mempengaruhi guna menyusun skenario. Menurut Schwartz dalam Mats Lindgreen and Hans Bandhold (2003:21) menjelaskan perencanaan skenario, *“A tool (for) ordering one’s perceptions about alternative future environments in which one’s decision might be played out right”*. Perencanaan skenario merupakan sebuah alat untuk menggambarkan masa depan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi.

Perencanaan skenario juga di jelaskan oleh Menurut Schoemaker dalam Wulf, Philip dan Stubner (2010), *“Scenario planning is a method for developing and thinking through possible future states on the basis of different scenario”*. Perencanaan skenario adalah metode untuk mengembangkan dan memikirkan kemungkinan masa depan dari suatu negara dengan skenario yang berbeda.

Menurut Trisnantoro (2008) menjelaskan perencanaan skenario sebagai berikut:

“Perencanaan skenario adalah alat bantu untuk melihat ke depan yang penuh ketidak-pastian. Inti perencanaan skenario adalah pengembangan gambaran mengenai kemungkinan-kemungkinan kondisi di masa mendatang dan mengidentifikasi perubahan-perubahan, serta implikasinya yang muncul sebagai akibat dari kondisi tersebut. Perencanaan skenario dilakukan untuk menilai skenario-skenario yang memungkinkan untuk suatu kegiatan: kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk dan berbagai kemungkinan diantaranya”.

Pengertian perencanaan skenario juga di kemukakan oleh Chermack dan Lynham dalam Topinos (2002:5), yaitu: *“The majority of definitions agree that scenario planning is about creating images of the future in order to deal with uncertainty”*. Dari pendapat Chermack dan Lynham tersebut adalah sebagian besar setuju perencanaan skenario adalah sesuatu yang akanmenciptakan gambaranpada masa depan untuk menghadapi ketidakpastian. Namun, dalam

perencanaan skenario harus mampu memahami kondisi pada masa sebelumnya dan sekarang, sehingga akan terlihat faktor positif dan negatif yang berpengaruh. Dari faktor-faktor tersebut akan disusun perencanaan skenario berdasarkan identifikais masalah yang ada.

Pengertian perencanaan skenario juga diperkuat dengan pendapat Blyth (2005:1) yang dikemukakan sebagai berikut:

“Scenario planning is a strategic planning tool or method for improving decision making against a background of possible future environments. In simple terms, a scenario is an internally consistent account of how the business environment, the external environment, in which an organisation operates might develop and change over time. An organisation assessing long term prospects with the aid of scenarios as part of its strategic planning would typically build up multiple scenarios to make sense of the large number of diverse, but inter-connected factors in the external environment”.

Pengertian perencanaan skenario menurut Bltyh diatas bahwa perencanaan skenario merupakan alat perencanaan strategis atau metode untuk mengambil keputusan dengan melihat masa lalu untuk sesuatu di masa depan. Dan dalam skenario, sebuah organisasi harus mengetahui bagaimana lingkungan internal dan lingkungan eksternal, pada saat organisasi tersebut beroperasi untuk berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Sebuah organisasi tersebut harus mampu memikirkan untuk jangka panjang dengan menggunakan perencanaan skenario sebagai bagian dari perencanaan strategis yang biasanya akan membangun beberapa skenario yang beragam, namun saling berkaitan dengan faktor-faktor ekstenal.

Pengertian perencanaan skenario diatas menekankan bahwa perencanaan skenario bukan suatu ilmu peramalan, karena perencanaan skenario disusun

dengan melihat dan memahami sejarah, masa sekarang dan masa depan beserta faktor-faktornya yang bertujuan untuk mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang akan dihadapi. Sehingga perencanaan skenario ini sangat baik untuk pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, supaya dapat terkendali dengan baik dan bisa mengetahui kemungkinan terbaik dan terburuk beserta skenario-skenario yang telah disusun.

2. Dasar-Dasar Perencanaan Skenario

Perencanaan skenario merupakan suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan masa depan, akan tetapi skenario bukanlah sebuah *forecasting* (ramalan). Dalam pengertian bahwa skenario bukanlah suatu proyeksi masa depan dari data yang ada pada masa ini. Skenario juga bukan merupakan sebuah visi (*vision*) atau kondisi masa depan yang diinginkan (*a desired future*). Berikut ini akan dijelaskan dalam tabel perbedaan antara *scenario*, *forecasting* and *visions* menurut Lingdren dan Bandhold (2003:24). Dimana perbedaan itu terlihat saling berkaitan antara konsep-konsep yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Perbedaan antar *Scenario, Forecasting and Visions*

<i>Scenario</i>	<i>Forecasting</i>	<i>Visions</i>
Kemungkinan yang masuk akal berjangka	Kemungkinan masa	Diinginkan masa depan
Berbasis ketidakpastian	Berdasarkan hubungan tertentu	Berbasis nilai
Menggambarkan risiko	Sembunyikan resiko	Sembunyikan resiko
Kualitatif atau kuantitatif	Kuantitatif	Biasanya kualitatif
Perlu tahu apa yang diputuskan	Dibutuhkan untuk berani untuk memutuskan	Energi
Jarang digunakan	Digunakan sehari-hari	Relatif sering digunakan
Kuat dalam medium untuk perspektif jangka panjang dan menengah untuk ketidakpastian yang tinggi	Kuat dalam perspektif jangka pendek dan rendahnya ketidakpastian	Sebagai pemicu untuk perubahan suka rela

Sumber : Lingdren dan Bandhold (2003:24)

Tabel 2 diatas menjelaskan perbedaan antara skenario, visi dan peramalan. Karena masing-masing dari skenario, visi dan peramalan memiliki konsep yang berbeda, meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melihat masa depan. Namun dalam skenario melihat dan memahami sejarah terlebih dahulu sebelum membuat skenario. Setiap permasalahan dilakukan identifikasi sehingga dapat mengetahui kelemahan, kelebihan, peluang dan ancaman. Sehingga skenario dibuat berdasarkan kenyataan yang telah terjadi dan sedang terjadi untuk menggambarkan masa yang akan datang.

3. Tujuan Perencanaan Skenario

Perencanaan skenario adalah suatu alat yang digunakan untuk memberikan gambaran pada masa datang dengan menggali faktor-faktor yang terjadi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ringland (2002:16) yang mengemukakan:

“Konsep skenario bertujuan membuat gambaran kehidupan nyata masa depan sehingga dapat menjawab dua hal mendasar. Pertama, untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian pada masa depan yang sebelumnya tidak di perkirakan, dengan menggali berbagai hambatan perubahan lingkungan eksternal atau hubungan antar berbagai faktor terkait, kedua untuk membuat sebuah model yang memungkinkan untuk mengetahui bukti-bukti yang terlihat jelas maupun tidak sejak awal”.

Skenario dirancang untuk memperluas pikiran pembuat kebijakan tentang perubahan yang muncul serta peluang dan ancaman bahwa masa depan akan terus berlanjut dengan mengangkap kemungkinan baik dan buruk. Menurut Ringland (2002:66) “*Scenario planning* memungkinkan dapat membuat para pembuat kebijakan untuk menimbang pilihan lebih hati-hati ketika membuat keputusan stretegi jangka pendek dan jangka panjang”.

Scenario planning dapat memberikan suatu gambaran masa depan yang matang dalam membuat kebijakan untuk menghadaapi suatu kemungkinan yang tidak pasti. Ketika suatu kondisi berubah dengan cepat, maka suatu perencanaan yang matang akan membantu dalam mengatasi suatu kondisi tersebut. Hal ini yang akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, sehingga mampu melakukan suatu tindakan yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Meskipun terdapat hambatan yang akan dihadapi, namun dengan perencanaan skenario yang akan dimiliki nantinya dapat melewati hambatan tersebut dengan berbagai skenario-skenario yang telah dikaji secara mendalam.

4. Penggunaan Perencanaan Skenario

Penggunaan perencanaan skenario dalam suatu kegiatan penyusunan harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dilakukan untuk menciptakan skenario yang baik. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Lindgren dan Baldhood (2003:47), yaitu metodologi yang digunakan dalam *scenario planning* mewajibkan untuk para aktor memiliki pemikiran terbuka dan kesediaan untuk menanggukkan percaya untuk melihat apa yang muncul dari diskusi.

Terdapat tujuh kriteria menurut Lindgreen dan Bandhold (2003:31) untuk skenario yang baik, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan. Masing-masing skenario disusun secara keseluruhan dan harus memberikan wawasan yang berguna sebagai pertimbangan.
- b. Masuk akal. Skenario harus berada dalam batas-batas peristiwa yang sedang terjadi tanpa harus melebihi-lebihkan.
- c. Alternatif. Dalam membuat skenario harus mempunyai lebih dari satu skenario, untuk menghadapi suatu ketidakpastian yang mungkin tidak sesuai dengan skenario yang digunakan. Sehingga dapat menggunakan skenario yang lainnya.
- d. Konsistensi. Setiap skenario harus konsisten dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.
- e. Diferensiasi. Dalam membuat skenario harus memiliki kualitas yang baik, karena skenario membutuhkan suatu pemikiran yang harus kreatif untuk menciptakan skenario yang berbeda dan bervariasi.
- f. Mudah diingat. Skenario yang dibuat harus mudah diingat untuk membedakan antara skenario satu dengan skenario yang lainnya
- g. Menantang. Kriteria terakhir adalah skenario benar-benar menantang, karena skenario mampu memberikan suatu gambaran masa depan yang tidak pasti.

Penjelasan diatas tentang penggunaan perencanaan skenario harus memenuhi beberapa syarat yang harus dilakukan yang telah dijelaskan diatas. Hal ini bertujuan agar *scenario planning* yang dibuat benar-benar mencakup segala aspek yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi.

Penyusunan perencanaan skenario membutuhkan isu-isu yang harus bernilai akurat dan jelas., karena isu-isu tersebut akan menjadi bahan untuk pembuatan *scenario planning*. Perencanaan skenario membutuhkan suatu kekreatifitasan untuk membuat beberapa skenario yang lain karena skenario yang dibuat bervariasi dan berbeda dari yang lainnya.

D. Pengembangan Ekowisata

1. Pengertian Ekowisata

Ekowisata adalah perjalanan wisatawan menuju daerah alamiah yang relative belum terganggu atau terkontaminasi (Hector dan Lascurain dalam Hakim, 2004: 52). Sedangkan menurut *Australian National Tourism Strategy* dalam Yoeti (1999: 37) ekowisata adalah wisata wisata berbasis alam yang berkaitan dengan pendidikan dan pemahaman lingkungan alam dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan.

Pengertian ekowisata juga di jelaskan oleh Panos dalam Damanik dan Weber (2006:38) ekowisata adalah bentuk industri pariwisata berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri.

Menurut Alan dalam Yoeti (1999: 37) ekowisata adalah kegiatan petualangan, wisata alam, budaya dan alternatif yang mempunyai karakteristik:

- a. Adanya pertimbangan yang kuat pada lingkungan dan budaya lokal.
- b. Kontribusi positif pada lingkungan dan sosial-ekonomi lokal.

- c. Pendidikan dan pemahaman, baik untuk penyedia jasa maupun pengunjung mengenai konservasi alam dan lingkungan.

Pendapat tentang pengertian ekowisata diatas diperkuat oleh pendapat Yoeti (1999:38) yang mengemukakan bahwa “ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial-budaya etnis setempat, dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam di sekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal”. Sedangkan menurut Linberg dan Harkins dalam Yoeti (1999: 38) ekowisata adalah wisata alam asli yang bertanggung jawab menghormati dan melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

2. Unsur-Unsur Pengelolaan Kawasan Ekowisata

Pengelolaan kawasan ekowisata merupakan suatu bentuk dari kepedulian terhadap potensi alam yang dimiliki. Karena manfaat dari ekowisata tidak hanya dalam perekonomian namun juga beberapa manfaat yang lain. Sehingga dalam mengelola kawasan ekowisata terdapat beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan agar mampu memberikan dampak yang baik dan manfaat bagi semua pihak. Menurut Yoeti (1999: 40) unsur-unsur pengelolaan kawasan ekowisata sebagai berikut:

a. Pendidikan (*Education*)

Aspek pendidikan merupakan bagian utama dalam mengelola ekowisata karena membawa misi sosial untuk menyadarkan keberdaaan manusia, lingkungan, dan akibat yang mungkin ditimbulkan bila terjadi kesalahan

atau kekeliruan dalam manajemen pemberdayaan lingkungan. Misi tersebut tidak mudah karena untuk menjabarkan dalam satu paket wisata seringkali bentrok dengan kepentingan anatar perhitungan ekonomi dan terjebak dalam misi pendidikan konservatif yang kaku.

b. Perlindungan atau Pembelaan (*Advocasy*)

Setiap pengelolaan ekowisata memerlukan integritas kuat karena kadang-kadang nilai pendidikan dari ekowisata sering terjadi salah paham. Prasarana yang dibuat hendaknya mampu memberikan nilai-nilai berwawasan lingkungan dan menggunakan bahan-bahan di sekitar obyek itu walau kelihatan sederhana. Dengan demikian, keaslian dapat dipertahankan karena dengan kesederhanaan itu masyarakat di sekitar kawasan mampu mengelola dan mempertahankan kelestarian alam dengan sendirinya tanpa mengada-ada.

c. Keterlibatan Komunitas Setempat (*Community Involment*)

Dalam pengelolaan ekowisata, peran serta masyarakat setempat tidak bisa diabaikan. Masyarakat lebih tahu dari pendatang yang punya proyek karena keterlibatan mereka dalam persiapan dan pengelolaan kawasan sangat diperlukan.

d. Pengawasan (*Monitoring*)

Budaya yang berkembang pada masyarakat di sekitar kawasan tidak sama dengan budaya yang pendatang. Dalam melakukan aktivitas, akan terjadi pergeseran yang lambat laun akan mengakibatkan hilangnya kebudayaan asli. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan (*monitoring*) yang berkesinambungan sehingga masalah integritas, loyalitas, atau kualitas dan kemampuan untuk mengelola akan sangat menentukan untuk mengurangi dampak tersebut.

e. Konservasi (*Conservation*)

Pengelola dan pengunjung yang datang harus meyakini bahwa tujuan pengembangan ekowisata adalah aspek konservasi bagi suatu kawasan dengan memperhatikan kesejahteraan, kesetaraan, dan mempertahankan kelestarian lingkungan kawasan itu sendiri.

Pengelola ekowisata perlu adanya strategi khusus, sehingga tidak menghilangkan makna dan prinsip dari ekowisata sendiri yaitu pariwisata berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengelola kawasan ekowisata harus memiliki unsur-unsur yang baik dan sesuai, seperti yang telah dijelaskan diatas. Unsur-unsur yang terdapat diatas, akan dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak terkait dengan sebaik mungkin. Namun, tidak hanya dapat diambil

manfaatnya, melainkan pihak terhait harus namun tetap menjaga kelestarian dari potensi yang ada di kawasan ekowisata dengan tidak merusak lingkungan sekitar.

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Ekowisata

Dalam pelaksanaannya, faktor budaya, masyarakat dan lingkungan menjadi ciri khas dari sebuah ekowisata sehingga harus tetap dilestarikan dengan semaksimal mungkin. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pengembangan ekowisata. Hal ini dilakukan agar perencanaan yang dibuat mampu menciptakan pengembangan yang sesuai dengan karakter ekowisata sendiri tanpa harus menghilangkan unsur dan aspek yang ada. Menurut TIES dalam Damanik dan Weber (2006:39) prinsip ekowisata, yakni sebagai berikut :

- a. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
- b. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya.
- c. Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW.
- d. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.
- e. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
- f. Meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan dan politik di daerah tujuan wisata.
- g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pariwisata dalam Yoeti (1999: 45) prinsip-prinsip pengembangan ekowisata, sebagai berikut:

- a. Kegiatan ekowisata harus bersifat ramah lingkungan, secara ekonomis dapat berkelanjutan dan serasi dengan kondisi sosial dan kebudayaan Daerah Tujuan Ekowisata (DTE).
- b. Untuk menjamin konservasi alam dan keanekaragaman hayati sebagai sumber daya kepariwisataan utama, segenap upaya penting harus dilaksanakan untuk menjamin fungsi dan daya dukung lingkungan agar tetap terjaga.
- c. Kegiatan ekowisata yang secara langsung mendukung pada upaya perlindungan alam dan kelestarian keanekaragaman hayati harus dipromosikan.
- d. Harus ada tindakan pencegahan untuk menghindari dan meminimalkan dampak negatif keanekaragaman hayati yang disebabkan kegiatan ekowisata.
- e. Pengembangan kegiatan ekowisata hendaknya hendaknya selalu menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- f. Semua yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata, termasuk pemerintah swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus bertanggung jawab secara bersama untuk mencapai bentuk ekowisata yang berkelanjutan.
- g. Konsep dan kriteria ekowisata berkelanjutan harus dikembangkan dan dikaitkan dengan program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja dibidang kepariwisataan.
- h. Masyarakat harus diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai manfaat perlindungan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui bentuk ekowisata yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan ekowisata harus tetap menjaga prinsip yang ada dengan tujuan untuk tetap menjaga nilai dari kawasan pariwisata berwawasan lingkungan ini. Sebab kawasan ekowisata memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan tersebut dalam bidang ekonomi. Potensi yang ada di ekowisata sendiri memberikan manfaat yang baik untuk lingkungan, sehingga harus tetap dijaga dengan tidak merusak meskipun dijadikan obyek wisata.

4. Kebijakan Pengembangan Ekowisata

Potensi alam merupakan suatu kekayaan alam yang perlu dilestarikan dan dijaga semaksimal mungkin, meskipun potensi tersebut dimanfaatkan sebagai ekowisata. Proses dari pengembangan ekowisata sendiri harus disertai dengan peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi potensi alam tersebut. Menurut Yoeti (1999: 39) kebijaksanaan pengembangan ekowisata dapat dilihat dari ruang lingkup kepentingan nasional, seperti dijelaskan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kebijaksanaan pengembangan ekowisata sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.
- b. Kepmen Parpostel No.KM.98/PW.102/MPpt-1987 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata.
- c. Surat Keputusan Dirjem Pariwisata No. Kep. 18/U.11/1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata.
- d. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Parpostel No. 24/KPTS-11/89dan No.KM. 1/UM.209/MPPT-1998 tentang Peningkatan Koordinasi dua instansi tersebut untuk mengembangkan Obyek Wisata Alam sebagai Obyek Daya Tarik Wisata.
- e. Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- f. Undang-Undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
- g. Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruangan.
- h. Undang-Undang No.5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- i. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- j. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Alam di zona pemanfaatan kawasan pelestarian alam.
- k. Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Menurut Yoeti (1999:39) pada dasarnya, kebijaksanaan pengembangan ekowisata hendaknya dapat berpedoman pada hal-hal yang disebutkan sebagai berikut :

1. Dalam pembangunan, prasana dan saran sangat dianjurkan dilakukan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah tersebut.
2. Diusahakan agar pengguna teknologi dan fasilitas modern seminimal mungkin.
3. Pembangunan dan aktivitas dalam proyek dengan melibatkan penduduk lokal semaksimal mungkin dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
4. Masyarakat setempat dihimbau agar tetap memelihara adat dan kebiasaannya sehari-hari tanpa terpengaruh kedatangan wisatawan yang berkunjung.

Kebijakan mengenai ekowisata diatas dibuat dengan tujuan untuk melindungi ekowisata meskipun terjadi dalam proses pengembangan. Sebab banyak pihak-pihak yang ingin mengalih fungsikan lahan ekowisata yang akan digunakan sebagai perumahan, industri dan kegiatan yang mengandung nilai ekonomi. Adanya undang-undang ekowisata ini akan tetap bisa dikembangkan dengan potensi yang ada tanpa harus menghilangkan makna dari ekowisata sendiri. Pada kenyataannya, obyek wisata berwawasan lingkungan untuk saat ini mulai berkurang karena dengan adanya bangunan-bangunan untuk kegiatan ekonomi, sehingga ekowisata harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dengan potensi yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang telah ada dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

E. Hutan *Mangrove*

1. Pengertian Hutan *Mangrove*

Hutan *mangrove* adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembab dan berlumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Harahab, 2010:27).

Pendapat diatas diperkuat oleh Supriharyono dalam Ghufran (2012:37) yang dikemukakan sebagai berikut:

“*Mangrove* tumbuh di tanah yang tidak mengandung oksigen dan harus memperoleh hampir seluruh oksigen untuk akar-akarnya dari atmosfer. Karena itu, akar tumbuhan *mangrove* terlihat unik dan khas, di antaranya ada yang melengkung, ada yang mencuat ke permukaan, dan ada yang mirip lutut. Spesies tumbuhan *Rhizophora* memenuhi kebutuhan oksigen dengan akar-akar tunjang yang mencuat sampai satu meter atau lebih di atas permukaan tanah. Akar-akar tersebut mempunyai banyak pori-pori yang disebut *lenticels*. Pada waktu air surut, oksigen terserap ke dalam tanaman melalui *lenticels* dan turun ke akar”.

Menurut Bengen dalam Harahab (2010:28) bahwa hutan *mangrove* merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon *mangrove* yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Hutan *mangrove* sebagai sekelompok tumbuhan yang terdiri atas berbagai macam jenis tumbuhan dari famili yang berbeda, namun memiliki persamaan daya adaptasi morfologi dan fisiologi yang sama terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut (Sukardjo dalam Pramudji, 2001:14).

Direktorat Jenderal Kehutanan dalam Pariyono (2006:19) mendefinisikan hutan *mangrove* lebih spesifik lagi, yaitu tumbuhan yang berkembang di daerah tropika dan subtropika pantai diantara batas-batas permukaan air pasang dan sedikit diatas rata-rata dari permukaan air laut. Hutan *mangrove* sebagai hutan yang terutama tumbuh pada lumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai, yang eksistensinya selalu dipengaruhi oleh air pasang-surut, dan terdiri dari jenis *Avicennia*, *Sonneratia*, *Rhizophora*, *Bruguiera*, *Ceriops*, *Lumnitzera*, *Excoecaria*, *Xylocarpus*, *Scyphyphora* dan *Nypa* (Sorianegara dalam Pramudji, 2001:14).

2. Zonasi Hutan Mangrove

Hutan *mangrove* memiliki zonasi yang bermacam dan menurut Nac Nae dalam Ghufran (2012:15) membagi zona *mangrove* berdasarkan jenis pohon ke dalam 6 (enam) zona, yaitu:

- a) Zona perbatasan dengan daratan
- b) Zona semak-semak tumbuhan *Ceriops*
- c) Zona hutan *Brugueria*
- d) Zona hutan *Rhizophora*
- e) Zona *Avicennia* yang menuju ke laut
- f) Zona *Sonneratia*

Sedangkan zonasi menurut Watson dalam Ghufran (2012:15) terbagi menjadi lima zona berdasarkan frekuensi air pasang, yaitu:

1. Hutan yang paling dekat dengan laut di tumbuh oleh *Avicennia* dan *Sonneratia*. *Sonneratia* tumbuh pada lumpur lembek dengan kandungan organik yang tinggi. *Avicennia marina* tumbuh pada substrat berliat yang agak keras, sedangkan *Avicennia alba* tumbuh pada substrat yang agak lembek.
2. Hutan pada substrat yang sedikit lebih tinggi biasanya dikuasai oleh *Bruguiera cylindria*. Hutan ini tumbuh pada tanah liat yang cukup keras dan di capai oleh beberapa air pasang saja.
3. Ke arah daratan lagi hutan di kuasai oleh *Rhizophora mucronata* dan *Rhizophora apiculata*. *Rhizophora mucronata* lebih banyak dijumpai pada kondisi yang agak basah dan lumpur yang agak dalam. Pohon-pohon dapat tumbuh setinggi 35-40 m. pohon lain juga terdapat pada hutan ini mencakup *Bruguiera parviflora* dan *Xylocarpus granatum*. Gundukan lumpur yang dibuat oleh udang lumpur ditumbuhi oleh pakis piai, *Acrostichum aureum*.
4. Hutan yang dikuasai oleh *Bruguiera parviflora* kadang-kadang dijumpai tanpa jenis pohon lainnya. Dalam hutan ini juga terdapat pohon *Rhizophora* yang telah ditebang.
5. Hutan mangrove terakhir dikuasai oleh *Bruguiera gymnorrhiza*. Selain pohon ini toleran terhadap naungan pada kondisi di mana *Rhizophora* tidak dapat tumbuh, seperti pohon cemara dan *Bruguiera gymnorrhiza* tidak mampu tumbuh dibawah induknya. Peralihan anatar hutan ini dan hutan dataran di tandai oleh adanya *Lumnitzera racemosa*, *Xylocarpus moluccensis*, *Intsia bijuga*, *Ficus retusa*, rotan, pandaan dan nibong pantai, *Oncosperma tigillaria*.

Mangrove tumbuh dengan baik di pantai berlumpur yang terlindungi, seperti esturia dan teluk. Umumnya pohon-pohonnya berbatang lurus dan tingginya mencapai 35-45 m. Di pantai berpasir atau terumbu karang, *mangrove* tumbuh rendah dan batangnya seringkali bengkok. Daun-daun berbagai jenis tumbuhan dalam hutan *mangrove* biasanya mempunyai tekstur serupa. Komposisi *mangrove* berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tergantung dari keadaan fisiologis pantai dan dinamika pasang surut, sehingga di satu tempat terdapat jalur *mangrove* yang lebih lebar daripada di tempat lainnya (Ghufran, 2012:20).

3. Fungsi Hutan *Mangrove*

Menurut Departemen Kehutanan dalam Punamawati dkk (2007:158), fungsi hutan *mangrove* dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Fungsi fisik
 - a. Mencegah garis pantai agar tetap stabil atau mencegah kerusakan pantai dari bahaya erosi pantai.
 - b. Mempercepat terjadinya perluasan pantai dan pulau.
 - c. Melindungi pantai dari tebing sungai dari bahaya longsor.
 - d. Sebagai pengolah bahan limbah.
 - e. Sebagai penahan hembusan angin.
2. Fungsi biologi
 - a. Tempat berkembangbiaknya benih ikan, udang, karang, kepiting dan biota laut lainnya.
 - b. Tempat bersarangnya burung-burung besar.
 - c. Tempat habitat reptilia.
 - d. Habitat alami biota laut.
3. Fungsi ekonomi
 - a. Tempat pengambilan kayu dan kulit kayu.
 - b. Tempat budidaya tambak ikan dan udang.
 - c. Tempat pembuatan lading garam.
 - d. Tempat rekreasi tamasya pantai.
 - e. Sebagai bahan arang kayu yang berkualitas tinggi.

Sedangkan fungsi hutan *mangrove* menurut Naamin dalam Pariyono (2006:24) mengemukakan, yaitu:

“Hutan *mangrove* merupakan ekosistem yang unik dengan fungsi bermacam-macam, yaitu : fungsi fisik, fungsi biologi dan fungsi ekonomi atau produksi. Fungsi fisik dari hutan *mangrove* atau ekosistem *mangrove*, yaitu : menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya erosi pantai serta sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah. Fungsi biologi dari hutan atau ekosistem *mangrove*, yaitu sebagai daerah pasca larva dan yuwana jenis-jenis tertentu dari ikan , udang dan bangsa krustacea lainnya serta menjadi tempat bersarangnya burung-burung dan menjadi habitat alami berbagai jenis biota. Fungsi ekonomi atau produksi dari ekosistem hutan *mangrove* ada 67 macam produk yang dapat dihasilkan dan sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat”.

Ekosistem *mangrove* yang menempati daerah pasang surut dan dipengaruhi oleh arus laut, mengalami perubahan secara terus-menerus. Tumbuhan dan dan hewan yang berinteraksi di dalamnya beradaptasi secara berkesinambungan. Banyak jenis hewan menggunakan ekosistem *mangrove* untuk mencari makan dan tempat berlindung semasa masih muda, atau selama siklus hidupnya secara penuh. Ada pergerakan materi organik dan anorganik ke dalam dan ke luar ekosistem *mangrove* secara terus-menerus. Proses-proses eksternal yang menentukan tersedianya air, hara dan stabilitas habitat, seringkali tidak tampak sebagai bagian dari ekosistem *mangrove* (Pronobasuki dalam Ghufuran, 2012:53). *Mangrove* memiliki fungsi yang banyak untuk segala makhluk hidup dengan kebutuhannya masing-masing. Potensi tanaman *mangrove* perlu dilestarikan, sehingga dapat terus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa harus merusak ekosistemnya.

4. Karakteristik Hutan *Mangrove*

Tanaman *mangrove* merupakan suatu tanaman yang dapat memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup di darat maupun di laut. Akan tetapi hutan *mangrove* memiliki karakteristik yang beranekaragam, sehingga Bengen dalam Harahab (2010:52) menjelaskan karakteristik dari hutan *mangrove* sebagai berikut:

- a) Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir.
- b) Daerahnya tergenangi air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan *mangrove*.
- c) Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.
- d) Terlindungi dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air bersalinitas payau (2-22 permil) hingga asin (mencapai 38 permil).

Tumbuhan *mangrove* memiliki daya adaptasi yang khas untuk dapat terus hidup di perairan laut yang dangkal. Menurut Nybakken dalam Harahab (2010:52) daya adaptasi tersebut meliputi:

- a. Perekaran yang pendek dan melebar luas, dengan akar penyangga atau tundung akar yang tumbuh dari batang dan dahan sehingga menjamin kokohnya batang.
- b. Berdaun kuat dan mengandung banyak air.
- c. Mempunyai jaringan internal penyimpan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Beberapa tumbuhan *mangrove* mempunyai kelenjar garam yang menolong menjaga keseimbangan osmotik dengan mengeluarkan garam.

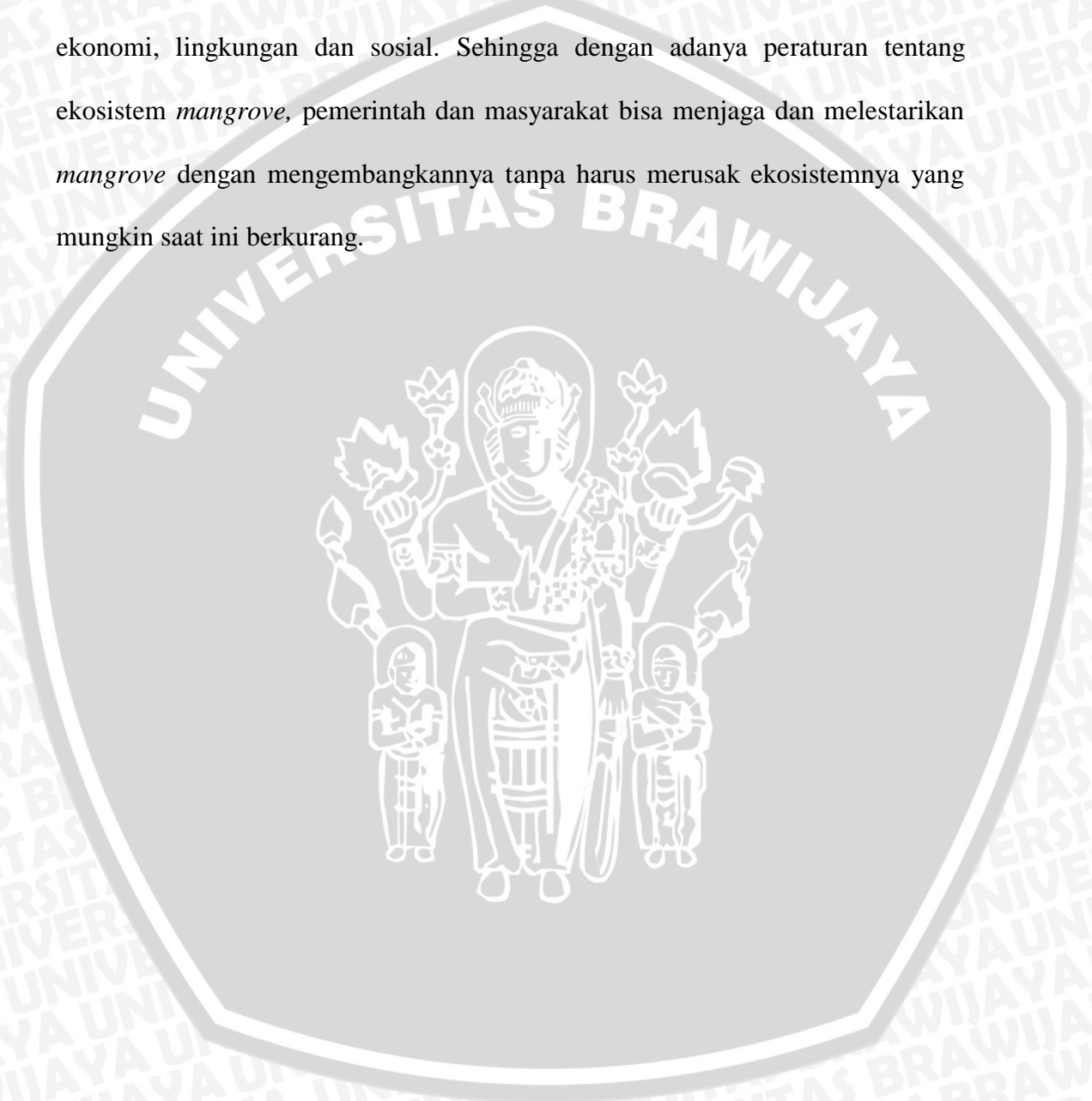
Sedangkan pengertian hutan *mangrove* menurut Romimohtarti dan Juwana dalam Harahab (2010:53) menjelaskan kemampuan beradaptasi *mangrove*, bahwa untuk menghadapi salinitas air hampir semua jenis tumbuhan *mangrove* mempunyai kutikula yang tebal untuk menyimpan air. Beberapa diantaranya mampu menyerap air laut dan membuang garamnya melalui kelenjar pembuangan garam.

5. Kedudukan Hutan *Mangrove* dalam Perundangan dan Peraturan

Potensi alam yang luar biasa seperti hutan *mangrove* harus mendapatkan suatu perlindungan, agar nilai ekologinya tetap terjaga dengan baik. Menurut Harahab (2010:30) kedudukan sumberdaya hutan *mangrove* secara normatif sudah diatur melalui perundangan dan peraturan. Pembangunan kehutanan pada umumnya dan *mangrove* pada khususnya, berdasarkan pada peraturan perundangan dan kebijaksanaan yang diterangkan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3.
- b) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.
- c) Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan, sekarang menjadi Undang-undang No. 31 tahun 2004.
- d) Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- e) Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Pariwisata.
- f) Undang-undang No. 24 tahun 1992 Penataan Ruang.
- g) Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h) Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sekarang menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004.
- i) Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekarang menjadi Undang-undang No. 33 tahun 2004.
- j) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- k) Peraturan Pemerintah 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
- l) Peraturan Pemerintah 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
- m) Peraturan Pemerintah 29 tahun 1986 tentang Analisa Lingkungan.
- n) Peraturan Pemerintah 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.
- o) Keputusan Presiden 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- p) Keputusan Presiden 48 tahun 1991 tentang Pengesahan Convention On Wetland of International Importance Especially as Waterfowl Habitat.
- q) Keputusan Menteri Kehutanan No. 20/Kpts.II/2001 tentang Pola Umum dan Standar Kriteria RHL.
- r) Keputusan Direktur Jendral RRL No. 009/Kpts/V/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan dan Penilaian Tanaman Rehabilitas Hutan *Mangrove*.
- s) Keputusan Direktur jendral Kehutanan No. 60/Kpts/Dj/78 tentang pedoman Silvikultur Hutan Payau.

Dengan adanya peraturan tentang hutan *mangrove* dapat melindungi ekosistem hutan *mangrove* dengan tidak merusak dalam alasan apapun, karena hutan *mangrove* merupakan potensi yang memberikan banyak manfaat dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Sehingga dengan adanya peraturan tentang ekosistem *mangrove*, pemerintah dan masyarakat bisa menjaga dan melestarikan *mangrove* dengan mengembangkannya tanpa harus merusak ekosistemnya yang mungkin saat ini berkurang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:35), jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena yang ada.

Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme karena digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada data yang sebenarnya (Sugiyono, 2011:9).

Penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang akan digunakan oleh penulis untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu penelitian ini akan menggambarkan mengenai Perencanaan Skenario Pengembangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam sebuah penelitian sangat berperan penting karena dengan adanya fokus penelitian akan membantu penulis menuju kerassah mana peneliti ini akan dibawa dan diarahkan. Selain itu fokus penelitian ini merupakan pokok dari topik-topik yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini kearah yang lebih dalam. Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi agar peneliti yang dilakukan dapat terarah dan tidak meluas serta relevan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi fokus peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo meliputi :

a. Manfaat hutan *mangrove* Wonorejo.

Hutan *mangrove* Wonorejo memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, lingkungan dan juga hewan. Manfaat *mangrove* Wonorejo adalah sebagai pelindung dan penahan pantai agar tetap stabil atau mencegah kerusakan pantai dari arus ombak, sebagai habitat fauna *mangrove*, sebagai sumber bahan baku makanan, minuman dan batik yang digunakan untuk hasil produksi, sebagai kawasan konservasi yang dilindungi oleh Peraturan Daerah (PERDA) dan sebagai kawasan edukasi.

b. Hasil produksi *mangrove* Wonorejo.

Mangrove tidak hanya sebuah pohon yang tumbuh di pinggir laut melainkan pohon *mangrove* di Wonorejo sendiri dapat menghasilkan sebuah produk seperti sirup *mangrove* dan batik *mangrove* yang bahan bakunya dari buah dan batang tanaman *mangrove* sendiri. Pengelolaan

dari hasil produksi tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat kelurahan Wonorejo.

c. Peran *stakeholder*.

Pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo harus melibatkan semua *stakeholder*, yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Kerjasama yang dilakukan akan memberikan sebuah kontribusi terhadap berkembangnya ekowisata yang berpotensi untuk berlangsungnya lingkungan dan dapat memberikan manfaat bagi kota Surabaya. Peran dari masyarakat kelurahan Wonorejo yaitu sebagai pengelola ekowisata dan hasil produksi. Pemerintah sebagai pelindung kawasan *mangrove* dengan menyusun Peraturan Daerah (PERDA) dan memberikan bantuan saran prasarana yang dilakukan Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya. Sedangkan pihak swasta pun memberikan bantuannya dengan menyumbangkan sarana prasarana untuk ekowisata *mangrove* Wonorejo, misalnya jaring-jaring untuk menahan sampah agar tidak masuk ke hutan *mangrove*.

2. Faktor pendukung dan pendorong dalam mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo.

a. Faktor pendukung

1). Masyarakat sebagai pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo.

Faktor pendukung untuk mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo adalah masyarakat kelurahan Wonorejo sebagai pengurus atau pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo. Masyarakat di kelurahan

Wonorejo merupakan pengurus dari ekowisata sendiri dari pedagang PKL, penjaga loket tiket, penjaga perahu, tukang parkir dan pegawai kebersihan.

2). Hasil produksi dari tanaman *mangrove*.

Tanaman *mangrove* di kelurahan ini juga dapat di olah sebagai hasil produksi yang dapat menghasilkan nilai ekonomis dan tentunya dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar, yaitu yang berupa sirup *mangrove*, batik *mangrove* dan kerupuk *mangrove*. Pengelolaan tanaman *mangrove* tersebut merupakan salah satu langkah ramah lingkungan karena bahannya diambil dari tanaman *mangrove* yang buah dan batangnya sudah jatuh.

3). Sebagai kawasan konservasi.

Ekowisata *mangrove* Wonorejo yang berlokasi di kecamatan Rungkut merupakan salah satu kawasan konservasi atau kawasan lindung di kota Surabaya. Oleh karena itu, kawasan *mangrove* Wonorejo perlu untuk dilestarikan guna menjaga potensi alam yang memberikan banyak manfaat. Adanya kawasan konservasi ini merupakan suatu dukungan yang sangat baik untuk melindungi tanaman *mangrove* di kelurahan Wonorejo.

4). Adanya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta.

Faktor pendukung untuk mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo adalah dari pemerintah kota Surabaya dan pihak swasta. Pemerintah kota Surabaya untuk mendukung dan melindungi kawasan *mangrove* ini menyusun Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga Peraturan

Walikota (PERWALI) No. 65 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan *Mangrove* di Wilayah Kota Surabaya. Peran pemerintah tidak hanya dalam penyusunan peraturan dan kebijakan, melainkan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan kegiatannya penanamannya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya dengan mempromosikan obyek wisata tersebut. Sedangkan pihak swasta memberikan bantuan sarana dan prasarana beserta perawatannya yang dibutuhkan oleh ekowisata *mangrove* Wonorejo.

b. Faktor penghambat

1). Kurangnya pengetahuan masyarakat.

Pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan potensi alam yang dimiliki oleh kota Surabaya, karena dilihat kota Surabaya adalah kota modern yang masih mempunyai potensi alam yang luar biasa seperti hutan *mangrove* Wonorejo. Potensi hutan *mangrove* tersebut perlu mendapatkan perhatian yang khusus termasuk masyarakat sekitar. Namun, tidak semua masyarakat kelurahan Wonorejo memahami pentingnya menjaga dan melestarikan tanaman *mangrove*. Jika pengetahuan masyarakat sekitar masih kurang dalam menjaga tanaman *mangrove*, maka tanpa disadari masyarakat akan merusak tanaman *mangrove*.

2). Fasilitas yang kurang memadai dan kurang terawat.

Faktor penghambat untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah fasilitas yang kurang memadai yaitu transportasi yang belum tersedia menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo, kondisi jalan yang masih kurang baik dan masih banyaknya sarana prasarana yang kurang terawat.

3). Kurangnya bahan baku hasil produksi.

Pengelolaan hasil produksi selama ini menggunakan bahan baku tanaman *mangrove* yang diambil dari buah dan batang yang telah jatuh. Sehingga hasil produksi masih belum maksimal.

4). Kebersihan yang masih kurang terjaga.

Ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan wisata berwawasan lingkungan dimana aspek lingkungan perlu untuk dijaga. Namun, obyek wisata ini masih terlihat kurang bersih dari adanya sampah yang berserakan di tempat wisata, meskipun telah banyak tempat sampah telah disediakan oleh pengelola.

5). Belum adanya alat pembatas sampah di laut.

Sampah di obyek wisata ini tidak hanya terlihat didaratan, melainkan juga terlihat di hutan *mangrove* Wonorejo yang berasal dari laut. Jumlah sampah yang ada di hutan *mangrove* Wonorejo ini sangat banyak, karena terus berdatangan dari tetangga kota Surabaya. Sehingga dibutuhkan alat yang canggih untuk menahan sampah tersebut agar tidak masuk ke hutan *mangrove*. Saat ini, pengelola hanya memberikan jaring-jaring dari

pertamina, akan tetapi jaring-jaring tersebut tidak bertahan lama karena kalah dengan sampah dari laut.

Penulis menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat*) untuk menganalisis faktor-faktor diatas. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan dalam analisis SWOT yang tujuannya untuk mengelompokkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

3. Perencanaan skenario dalam pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo.

Pada fokus penelitian ini digunakan untuk mengatasi permasalahan yang diteliti dalam upaya penyusunan perencanaan skenario pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo. Perencanaan skenario harus mengetahui *focal concern* terlebih dahulu yaitu perencanaan skenario pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo 2015. *Focal concern* tersebut dilakukan dengan menentukan *driving forces* (kekuatan pendorong) yaitu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan pendorong untuk dilakukan perencanaan skenario. Untuk menentukan *driving forces* sendiri terdiri dari lima kelompok yaitu politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Sehingga dalam pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo ini, penulis menetapkan *driving forces* dalam kelompok sosial dan teknologi yaitu partisipasi masyarakat dan transportasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengembangan ekowisata hutan *mangrove* dibutuhkan partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan yang diharapkan untuk mengembangkan obyek wisata ini dengan menjaga kelestarian *mangrove* dan lingkungan sekitar. Masyarakat kelurahan Wonorejo ini telah berpartisipasi dalam mengelola ekowisata, namun masyarakat masih belum memiliki pengetahuan yang luas dalam melestarikan tanaman *mangrove* dan lingkungan sekitar, karena di kawasan *mangrove* Wonorejo masih terlihat kurang bersih. Masyarakat disini tidak hanya masyarakat kelurahan Wonorejo, melainkan pengunjung, karena pada kawasan obyek wisata sampah masih berserakan meski sudah disediakan tempat sampah.
- b. Pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo tentunya perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang mampu mendukung. Saat ini, transportasi umum masih belum tersedia untuk menuju kawasan ekowisata *mangrove* Wonorejo, sehingga masyarakat yang ingin mengunjungi dengan menggunakan transportasi umum masih sangat sulit. Faktor tidak adanya alat pembatas sampah di hutan *mangrove* pun menjadi suatu hambatan, karena sampah yang berasal dari laut terus bertambah. Jika sampah tersebut di bersihkan pada pagi hari, malam hari sampah tersebut akan terus bertambah. Saat ini pengelola hanya menggunakan jaring-jaring dari Pertamina dan jaring-jaring tersebut tidak mampu menahan sampah untuk tidak masuk ke hutan *mangrove* Wonorejo.

Penulis menggunakan metode TAIDA (*Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting*) sebagai alat dalam penyusunan perencanaan skenario pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo yang dikemukakan oleh Lingdren dan Bandhold (2003:38-42). Metode perencanaan skenario TAIDA dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tracking (melacak)

The first step in the TAIDA process is tracking. the main purposes of the step is to trace and describe changes in the surrounding world that may have an impact on the focal question.

Langkah pertama dalam proses TAIDA adalah pelacakan. Tujuan utama untuk melacak dan menggambarkan perubahan dalam dunia sekitar yang dapat berdampak pada pertanyaan fokus. Proses ini dilakukan dengan melakukan penelusuran perubahan lingkungan di sekitarnya yang meliputi tanda-tanda keberadaan tantangan dan peluang, selain juga mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Selain itu, dalam proses *tracking* juga ditemukan kecenderungan (*trend*), *driver change* dan ketidakpastian yang mempengaruhi masa depan dari pembuatan skenario.

2. Analysing (menganalisis)

The analysing phase is about identifying drivers and consequences in order to understand how the identified trends interact. If it not already been done, it many be fruitful to carry out a player analysis in the phase, to identify conceivable actions from other players that will affect the system. All this will give the deeper understanding that is necessary for identifying the uncertainties that the scenarios will be based upon.

Fase menganalisis ini adalah mengidentifikasi perubahan dan konsekuensi untuk memahami bagaimana kecenderungan dapat diidentifikasi dengan dilakukan analisis mengenai konsekuensi yang dapat muncul akibat keberadaan tantangan dan peluang. Pada tahap ini pula logika skenario mulai dikembangkan. Jika dalam tahap *tracking* telah dilakukan pengidentifikasian mengenai perubahan, penemuan pola, kecenderungan, ancaman dan peluang, tahap *analysing* merupakan tahap menemukan konsekuensi yang terjadi terhadap masa depan dengan melihat kondisi atau perubahan di masa sekarang. Tahap *analysing* termasuk tahap lebih jauh dari apa yang disebut pelacakan.

3. *Imaging* (membayangkan)

After gathering insights about plausible futures, it is time to create images of what is desired : visions.

Setelah mengumpulkan wawasan tentang masa depan yang masuk akal, tahap ini untuk menciptakan gambar dari apa yang diinginkan: visi. Tahap *imaging* adalah membayangkan yang merupakan tahap identifikasi kemungkinan dan membangun visi mengenai apa yang diharapkan (*vision of what desired*). Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi pula dampak yang terjadi jika setiap skenario muncul.

4. *Deciding* (memutuskan)

Deciding is the phase where everything is put together. The future environment is tracked and analysed and the vision is in place. What can be done to go in the direction of the vision, taking advantage of the opportunities and avoiding the threats of the future environment.

Memutuskan adalah tahap di mana semuanya diputuskan secara bersama-sama. Masa depan dapat dilacak dan di analisis. Hal apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi, serta mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari ancaman di masa depan. Pada tahapan ini segala tindakan yang berhubungan dengan perencanaan skenario akan diputuskan untuk selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu bertindak. Tahap *Deciding* juga berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai skenario apa yang akan disasarkan dan strategi seperti apa nantinya yang akan digunakan.

5. *Acting* (bertindak)

Acting is about taking action and following up. we will show how scenario planning can be followed up. Acting can have two different meanings in a scanrio planning process. One is putting the strategies that you have decided upon into action. The others meaning has to do with continuous follow up work of the scenario planning proceses: monitoring environmental changes, defining proceses for continuous environmental scanning, scenario planning and so on.

Pada tahapan ini, tindakan diambil dan ditindaklanjutan sehingga memiliki dua arti yang berbeda dalam proses perencanaan skenario. Pertama adalah menempatkan strategi yang telah diputuskan dalam tindakan. Kedua berkaitan dengan tindak lanjut yang berkesinambungan dari proses perencanaan skenario seperti memantau perubahan lingkungan, mendefinisikan proses untuk perencanaan berkelanjutan, pemindaian skenario dan sebagainya.

Penggunaan metode TAIDA (*Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting*) dalam perencanaan skenario bertujuan untuk lebih memahami kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman, karena metode ini mengidentifikasi masalah dan isu-isu yang terkait saat proses penyusunan perencanaan skenario. Metode ini memberikan keputusan yang akan diambil telah berdasarkan apa yang sebelumnya terjadi dan sedang terjadi, sehingga pada waktu yang akan datang akan lebih bijak dalam bertindak sesuai dengan skenario yang telah dirancang.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya memiliki potensi hutan *mangrove* yang memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

2. Situs Penelitian

Setelah menentukan fokus penelitian dan juga lokasi penelitian, situs penelitian juga digunakan peneliti dalam mencari data yang relevan. Situs penelitian adalah tempat yang digunakan oleh seorang peneliti untuk dapat memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Situs dalam penelitian ini adalah ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo. Informasi yang di dapat tidak hanya

dari ekowisata hutan *mangrove*, melainkan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (BAPPEKO), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Dinas Pertanian Kota Surabaya yang memberikan data-data tentang ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data informan yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo.
- b. Ibu MR (P, 30 Tahun) Staff Bidang Tata Guna Lahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (BAPPEKO).

- c. Bapak YL (L, 45 Tahun) Kasi Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Surabaya.
- d. Bapak AD (L, 27 Tahun) Staff Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Surabaya.
- e. Ibu RA (P, 35 Tahun) Staff Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperlukan serta dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumen formal maupun non formal yang dimiliki narasumber, yaitu pengelola ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dan Dinas Pertanian Kota Surabaya.
- b. Data mengenai gambaran umum Ekowisata Hutan *Mangrove* Wonorejo, yaitu sejarah berdirinya ekowisata *mangrove* Wonorejo, manfaat dan hasil produksi ekowisata *mangrove* Wonorejo.
- c. Data atau arsip atau dokumen yang mendukung data primer, yaitu Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya, data mengenai luas hutan *Mangrove* Kota Surabaya dari Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Dokumen Lomba Kelurahan Wonorejo dari Kecamatan Rungkut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik yang terdiri dari tiga teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama adalah melakukan observasi (pengamatan), peneliti akan memperoleh data tentang ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, karena secara langsung dapat melihat kondisi dari ekowisata *mangrove* Wonorejo yang terjadi di lapangan.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab atau *interview* langsung dengan pihak yang berkepentingan yakni kepada pengelola ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, yaitu Staff Tata Guna Lahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Staff Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Staff Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Sugiyono (2011: 231), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara akan mendukung dalam teknik pengumpulan data sehingga nantinya akan membantu dalam menjawab permasalahan dan fenomena yang sedang diteliti.

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tulisan dengan penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, dan majalah. Dokumentasi tersebut

tentunya yang berhubungan dengan perencanaan skenario pengembangan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo kota Surabaya, yaitu hasil foto sarana prasarana ekowisata, hasil rekaman dari wawancara dengan narasumber dan dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTKS).

F. Instrument Data

Instrument pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Peneliti sendiri, yaitu menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Secara langsung meluncur ke lapangan untuk menghimpun data dari apa yang akan diteliti.
- 2) Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk memperoleh data guna kelengkapan penelitian.
- 3) Catatan lapangan (*field note*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dilapangan.
- 4) Buku dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data-data dokumen, laporan-laporan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

G. Metode Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2011: 296) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Sugiyono (2011: 270) adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Ini berarti peneliti dengan narasumber akan semakin akrab dan saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Berapa lama perpanjangan pengamatan dilakukan, tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali data yang telah ditemukan salah atau tidak. Demikian juga meningkatkan ketekunan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada tiga macam triangulasi, yaitu :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. misalnya data diperoleh dengan wawancara, setelah itu dapat dicek dengan observasi, dokumentasi atau melakukan kuesioner.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data, karena data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

4. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Dengan melakukan analisis kasus negatif berarti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

5. Menggunakan bahan referensi

Dengan bahan referensi terdapat adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh fot-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat perekam suara sangat diperlukan.

6. Mengadakan *membercheck*.

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.

Metode pengujian keabsahan data diatas merupakan teknik untuk memeriksa data pada sebuah penelitian yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang diambil oleh peneliti tersebut sah hasil dari penelitiannya sendiri.

H. Analisis Data

Setelah data dilapangan terkumpul, maka peneliti mengelola data dengan menggunakan teknik yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah yang telah diteliti. Data yang diperoleh dianalisis dengan tujuan menyederhanakan data agar mampu diinterpretasikan, sehingga permasalahan dapat dipecahkan. Analisis dilakukan berdasarkan pertimbangan logika yang rasional dan mengandalkan teori atau dalil yang berlaku umum. Adapun tahap analisis dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992:77) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, observasi ke lapangan dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalankan, menggolongkan, membuang data yang dianggap tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan.

3. Penyajian data

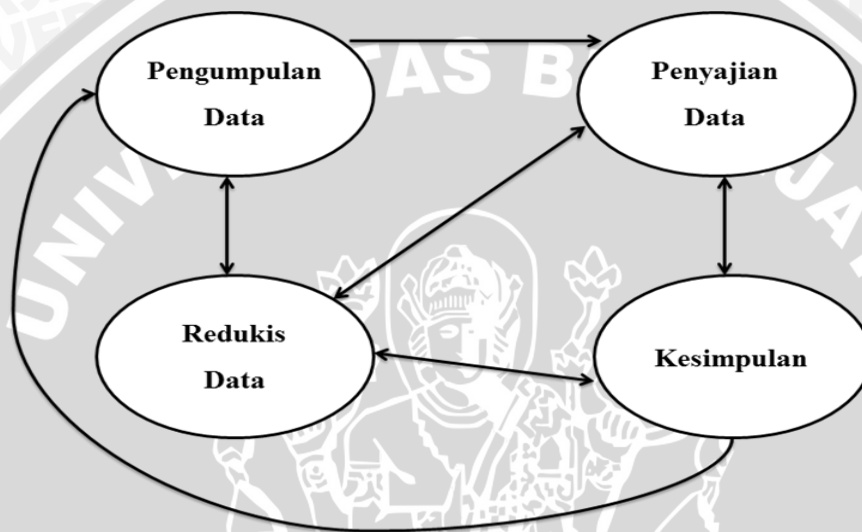
Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk table maupun bentuk klaimat atau uraian.

4. Penarikan kesimpulan

Data yang telah dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sehingga peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjawab rumusan masalah dan dikembangkan. Sehingga temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu proyek yang sebelumnya belum jelas dapat digambarkan berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis maupun teori.

Komponen-komponen analisis data tersebut diatas disebut sebagai model interaktif yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Analisis Interaktif
Sumber: Miles Dan Huberman, 1992:20

Analisis interaktif ini, lebih memudahkan dalam mengelola data karena terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Setelah melakukan langkah yang telah dijelaskan diatas, kemudian yang dilakukan adalah dengan memadukan secara interaktif ketiga komponen utama tersebut, di mana peneliti selalu bergerak di antara kegiatan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal ini dilakukan agar peneliti benar-benar mendapatkan analisis yang mendalam, sehingga penelitian yang dilakukan dapat disajikan oleh peneliti dengan akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kota Surabaya

a. Kondisi Geografis

Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Letak kota Surabaya adalah 07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur). Dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut. Luas Kota Surabaya 33.306,30 Ha.

Berikut adalah batas-batas wilayah kota Surabaya:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.



Gambar 2 Peta Kota Surabaya
Sumber: kopertis7.go.id

Kota Surabaya merupakan wilayah yang memiliki 31 kecamatan dan 160 desa atau kelurahan. Kelembaban udara kota Surabaya rata-rata minimum 50% dan maksimum 92%. Tekanan udara kota Surabaya mencapai rata-rata minimum 1012,3 Mbs dan maksimum 1012,5 Mbs. Sedangkan curah hujan rata-rata 165,3 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan januari s/d maret dan nopember s/d desember. Kecepatan angin rata-rata 6,4 Knot dan maksimum 20,3 Knot. Struktur tanah Kota Surabaya terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. Topografi : 80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3% 20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15%.

b. Demografi

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaaur dengan penduduk asli Surabaya membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura. Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka, walaupun tampak seperti bertemperamen kasar. Masyarakat Surabaya sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain.

Jumlah penduduk kota Surabaya yang mencapai sekitar 3,110,187 orang di Tahun 2012. Kota Surabaya berkembang sebagai kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis dan menjadi pusat aktivitas sama artinya menjadi jujugan bagi orang dari berbagai daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona kota Surabaya yang menjanjikan segala macam kemudahan. Maka tantangan besar berikutnya ialah menyiapkan kehidupan yang layak. Kota Surabaya haruslah tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi penghuninya.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Surabaya telah mengklaim dirinya sebagai kota jasa dan perdagangan. Lebih dari itu Kota Surabaya adalah kota bisnis dengan berbagai aktivitas yang

berlangsung. Ibarat sebuah toko, Surabaya adalah Toko Serba Ada. Didalamnya berlangsung segala aktivitas, serta tersedia segala fasilitas yang mendukung. Posisi Surabaya sebagai kota perdagangan dan pasar modern adalah pilar utamanya. Tampilan menarik, suasana nyaman, serta harga yang pasti merupakan keunggulan pasar modern yang sesuai dengan sibuknya aktivitas masyarakat kota. Pasar modern tersebar di seluruh penjuru kota Surabaya, baik di pusat maupun di pinggiran kota. Keberadaan pasar modern yang banyak ini memberikan pilihan lebih banyak kepada masyarakat. Jumlahnya akan terus berkembang seiring meningkatnya investasi di Surabaya.

Tanjung Perak merupakan pelabuhan penting di Indonesia timur. Pelabuhan ini diakui sebagai pusat kolektor dan distributor barang ke kawasan timur Indonesia. Tanjung Perak terhubung dengan beberapa kawasan industri dan pergudangan seperti SIER, Berbek, maupun Margomulyo. Aktivitas bongkar muat yang tak kenal henti menandakan pergerakan barang yang lancar. Untuk mendukung aktivitas perdagangan, di Surabaya juga terdapat pusat-pusat perkantoran. Layaknya pasar modern, perkantoran pun tersebar baik di pusat maupun pinggiran kota Surabaya. Di pusat kota, berdiri wisma Intiland, BRI Tower, Bumi Mandiri, dan lainnya. Selain itu pusat perkantoran berkembang pesat di kawasan Surabaya Barat seiring munculnya pusat bisnis baru di daerah HR Muhammad, kawasan perkantoran dan bisnis di Graha Family dan Pusat perbelanjaan Supermall Pakuwon.

Di era modern, Bank mengambil peran sentral dalam aktivitas manusia. Masyarakat perkotaan seperti di Surabaya, bank dimanfaatkan oleh masyarakat dalam

level kebutuhan pribadi, keluarga, maupun instansi bisnis. Keberadaan layanan perbankan di Surabaya mutlak diperlukan demi keamanan dan kemudahan bertransaksi. Di Surabaya berdiri 61 instansi perbankan yang terdiri atas 6 bank pemerintah, 2 bank pembangunan daerah, 42 Bank Swasta Nasional, serta 11 Bank Internasional.

Sebagai kota bisnis, banyak wisatawan berkunjung ke Surabaya baik untuk kepentingan bisnis maupun berwisata. Untuk mendukung aktivitas tersebut, fasilitas hotel berbagai kelas terdapat di Surabaya. Surabaya memiliki berbagai tipe hotel di seluruh sisi kota. Beberapa hotel berbintang yang ada di Surabaya misalnya Shangri La, Sheraton, Majapahit, dan JW Marriot. Selain hotel berbintang, kini mulai muncul banyak pula hotel dengan tarif terjangkau atau ekonomis. Berdirinya banyak pusat perbelanjaan modern tak membuat pasar tradisional ditinggalkan. Di Surabaya, pasar tradisional masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Harga murah, keakraban suasana, serta seni tawar-menawar selalu menjadi daya pikat pasar tradisional ketimbang pasar modern. Pembenahan pasar-pasar tradisional terus dilakukan agar menjadi lebih nyaman dan aman.

Kampung Surabaya menjadi ruang kehidupan bagi masyarakat Surabaya. Selain untuk tinggal, kampung-kampung di Surabaya pun adalah lokasi beraktivitas produksi. Kini muncul kampung-kampung yang menjadi pusat aktivitas industri kecil rumahan. Setiap kampung hadir dengan produk khasnya baik panganan, pernak-pernik, pakaian, dan lain-lain. Dengan sentuhan pemerintahan kota, kini kampung-

kampung tersebut dilabeli kampung unggulan dan menjadi potensi pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

d. Kebudayaan

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya akan budaya. Beragam etnis bermigrasi ke Surabaya. Sebut saja etnis Melayu, China, India, Arab dan Eropa sementara etnis Nusantara sendiri antara Lain Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi datang dan menetap, hidup bersama serta membaaur dengan penduduk asli membentuk pluralisme budaya yang kemudian menjadi ciri khas kota Surabaya. Inilah yang membedakan kota Surabaya dengan kota-kota di Indonesia. Bahkan ciri khas ini sangat kental mewarnai kehidupan pergaulan sehari-hari. Sikap pergaulan yang sangat egaliter, terbuka, berterus terang, kritik dan mengkritik merupakan sikap hidup yang dapat ditemui sehari-hari. Bahkan kesenian tradisonal dan makanan khasnya mencerminkan pluralisme budaya Surabaya.

Budaya daerah, tradisi dan gaya hidup yang berbeda di setiap daerah merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Budaya daerah ini antara lain, kesenian, pakaian adat, upacara adat, gaya hidup, dan kepercayaan. Budaya Surabaya yang terkenal antara lain Undukan Doro, Musik Patrol dan Manten Pegon. Salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk melestarikan budaya kota Surabaya adalah dengan pemilihan Cak dan Ning Surabaya, yaitu duta budaya kota Surabaya.

e. Kesenian

Kehidupan berkesenian Kota Surabaya tumbuh dengan baik. Kesenian tradisional dan modern saling melengkapi membentuk keragaman kesenian Surabaya. Kesenian tradisional tumbuh karena perjalanan sejarah melawan penjajahan zaman dahulu sampai saat ini tetap dilestarikan. Bentuk kesenian tradisional banyak ragamnya. Ada seni tari, seni musik, seni panggung dan seni lainnya adalah Ludruk. Ludruk adalah kesenian rakyat asli Jawa Timur. Kesenian rakyat yang berasal dari Jombang ini, menjadi maskot budaya khas Surabaya, terutama tarian Ngremonya. Ludruk sudah ada sejak jaman Jepang sekitar tahun 1942. Dan menjadi sangat populer di Surabaya sejak zaman revolusi. Gending Jula-Juli Suroboyo, Tari Remo, Kentrung, Okol, Seni Ujung, Besutan, upacara Loro Pangkon, Tari Lenggang Suroboyo dan Tari Hadrah Jidor.

Sementara kesenian modern juga tumbuh pesat. Sejumlah sanggar tari berkonsentrasi mengembangkan perpaduan seni tradisional dan modern. Namun demikian banyak group tari mengembangkan kreasi modern, misalnya Marlupi Dance, Gito Maran. Upaya untuk mewujudkan kehidupan berkesenian di Surabaya dikembangkan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) maupun perkumpulan-perkumpulan seni teater, seni lukis dan music. Pameran seni lukis maupun seni teater seringkali diselenggarakan di Gedung Balai Pemuda. Sementara pagelaran seni tari tradisional selalu digelar di Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Budaya. *Surabaya Symphony Orchestra* (SSO) juga mengambil peran penting dalam menumbuhkan seni musik di Surabaya.

2. Gambaran Umum Kelurahan Wonorejo

a. Kondisi Geografis

Kelurahan Wonorejo merupakan salah satu kelurahan dari kecamatan Rungkut kota Surabaya. Luas wilayah kelurahan Wonorejo adalah 650 Ha, dengan jumlah pemukiman 150 ha dan kawasan konservasi atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) 500 ha. Ketinggian tanah kelurahan Wonorejo dari permukaan laut adalah 2,5 meter dengan curah hujan 13.300 mm/tahun. Berikut adalah batas wilayah kelurahan Wonorejo:

- a. Batas Wilayah Sebelah Utara : Sungai Wonokromo
- b. Batas Wilayah Sebelah Timur : Selat Madura
- c. Batas Wilayah Sebelah Selatan : Kelurahan Medokan ayu
- d. Batas Wilayah Sebelah Barat : Kelurahan Penjaringan sari





Gambar 3 Peta Kelurahan Wonorejo
 Sumber: rungkut-surabaya.org

Pada pemerintahannya kelurahan Wonorejo memiliki susunan organisasi yang tercantum pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan pembentukan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi kelurahan kota Surabaya. Berikut adalah susunan organisasi dari kelurahan Wonorejo:



Struktur Organisasi



Gambar 4 Struktur Organisasi Kelurahan Wonorejo
Sumber: Kelurahan Wonorejo

Kelurahan Wonorejo untuk menjalankan tugas dan fungsinya memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Berikut adalah visi dan misi dari kelurahan Wonorejo:

Visi : Menjadikan Kelurahan Wonorejo Sebagai Kelurahan Yang Unggul dan Terpercaya

Misi :

1. Mewujudkan Aparat yang Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur
2. Menciptakan Iklim dan Lingkungan yang Bersih, Sehat, Indah, Rindang, Tertib, Aman dan Nyaman
3. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Sehat, Produktif secara Sosial dan Ekonomi
4. Mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna
5. Mengembangkan Produk Unggulan Masyarakat

6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat/Kemitraan dalam Berbagai Kegiatan Pembangunan
7. Memberikan Pelayanan Prima dan Optimal Kepada Masyarakat
8. Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Memadai untuk Mendukung Pelayanan kepada Masyarakat
9. Menyediakan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi dan Memberikan Layanan Konseling bagi Masyarakat

Kelurahan Wonorejo dalam perjalanannya mendapatkan banyak prestasi yang telah diraih. Berikut adalah prestasi yang telah diraih sebagai wujud keberhasilan pembangunan:

- a. Juara I Lomba Kelurahan Berhasil Tingkat Kota Surabaya Tahun 2009;
- b. Juara II Lomba Toga Tingkat Kota Surabaya Tahun 2011;
- c. Juara I Lomba Toga Tingkat Kota Surabaya tahun 20012;
- d. Kampung *Mangrove* Juara Katagori Terinovasi Tahun 2012
- e. Merdeka dari Sampah (MDS) Juara III Tingkat Kota Tahun 2011
- f. SGC Berbunga Katagori Partisipasi Perumahan Tingkat Kota Tahun 2012
- g. Juara II Katagori Kreatif & Inovatif (Ekowisata *Mangrove*) Tahun 2012
- h. Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2011
- i. Inovasi Kerjasama dengan Swasta (Tabloit Nova) TP PKK Tahun 2011Calon Kalpataru Tingkat Nasional di bidang Lingkungan tahun 2013
Regional Symposium on Mangrove Ecosystem Management in Southeast Asia

b. Demografi

Kelurahan Wonorejo memiliki jumlah RW 10 dan Jumlah RT 50. Jumlah kepala keluarga 4.289 KK yang terdiri dari 7.530 orang laki-laki dan 7.389 orang perempuan dengan total 14.919 orang. Berikut adalah jumlah penduduk menurut agama:

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| a. Islam | : | 8.990 | Orang |
| b. Kristen | : | 2.996 | Orang |

c. Katolik	:	2.308	Orang
d. Hindu	:	131	Orang
e. Budha	:	494	Orang

Penduduk kelurahan Wonorejo juga memiliki jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan pekerjaan. Berikut adalah jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dan pekerjaan:

1. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan:

a. Taman kanak-kanak	:	850	Orang
b. Sekolah dasar	:	950	Orang
c. SMP / SLTP	:	550	Orang
d. SMU / SLTA	:	500	Orang
e. Akademi (D1 – D3)	:	230	Orang
f. Sarjana (S1 – S3)	:	175	Orang

2. Jumlah Penduduk Tingkat Pekerjaan:

a. Pegawai Negeri Sipil	:	338	Orang
b. TNI	:	32	Orang
c. POLRI	:	12	Orang
d. Swasta	:	5.013	Orang
e. Pensiunan / Purnawirawan	:	272	Orang
f. Wiraswasta	:	522	Orang
g. Tani / Ternak	:	22	Orang
h. Pelajar / Mahasiswa	:	3.375	Orang
i. Buruh tani	:	16	Orang
j. Dagang	:	748	Orang
k. Nelayan	:	22	Orang
l. Ibu Rumah Tangga	:	2.465	Orang
m. Belum Bekerja	:	3.261	Orang

c. Kelembagaan Masyarakat

1. LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan)

- a. Ketua Pelaksana Pendataan Keluarga Miskin.
- b. Ketua Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- c. Menggerakkan partisipasi Kegiatan Padat Karya, Pembuatan saluran, Pavingisasi yang dikerjakan oleh Keluarga Miskin.

2. FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat)

Berperan dengan kegiatan antara lain :

- a. Memprakarsai pembangunan Gazebo *Mangrove* polrestabes Surabaya.
- b. Membangun Pos Pantau *Mangrove* di muara sungai Jagir dengan dana swadaya.
- c. Melakukan Penanaman *Mangrove* bersama elemen masyarakat lainnya.
- d. Menjaga Keberadaan Konservasi bersama sama PAMSUS Pamurbaya.

3. Karang Taruna “Pamors”

Bekerjasama dengan lembaga LSM Australia (PLAN) dalam mengadakan kegiatan :

- a. Korespondensi dengan penghuni Lapas Anak di Tangerang bertujuan merubah *image* anak Lapas tidak seburuk yang dibayangkan
- b. Kampanye Pendidikan (Pementasan Drama /Operet) kepada warga dengan maksud memberikan pesan pendidikan.
- c. Sosialisasi Global Warming kepada masyarakat.
- d. Mempunyai usaha Video Shooting dan Dokumentasi.

4. Kelompok tani

- a. Terdapat 6 kelompok tani di Kelurahan Wonorejo.
- b. Bintang Timur mengelola pembibitan *mangrove* dan olahan hasil tambak.
- c. Kelompok tani *mangrove* menginovasikan hasil olahan *mangrove* berupa Sirup *Mangrove*, Jenang *Mangrove*, Tepung, Beras dan Teh.

5. LPEM (Lembaga Pengelola Ekowisata *Mangrove*)

- a. Mempunyai Perahu Wisata sebanyak 3 buah.
- b. Membangun 4 Gazebo Wisata di muara sungai jagir.
- c. Dari Omzet 50 juta sekarang menjadi 362 juta.
- d. Berdampak ekonomi kepada warga dengan menyediakan sentra PKL di dermaga Ekowisata.

6. Komunitas Batik

Komunitas batik di kelurahan Wonorejo ini merupakan salah satu hasil produksi dari tanaman *mangrove*. Pengelola dari batik *mangrove* tersebut adalah masyarakat Wonorejo sendiri yaitu dari warga miskin yang membuat batik tulis dengan motif *mangrove*. Batik *mangrove* tersebut telah mengikuti acara pameran batik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Surabaya, propinsi dan nasional beserta pihak swasta. Sehingga, hasil produksi batik ini dapat membantu kehidupan ekonomi warga kelurahan Wonorejo.

d. Upaya Kelurahan Wonorejo

Dalam menjalankan pemerintahannya, kelurahan Wonorejo memiliki upaya untuk mensejahterkan masyarakatnya. Berikut adalah upaya-upaya kelurahan Wonorejo:

1. Upaya Dalam Pendidikan

- a. Dukungan APBD Pemkot Surabaya 30% untuk pendidikan.
- b. Program bantuan peralatan dan seragam sekolah (Swadaya).
- c. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk sweeping anak putus sekolah (kecamatan dan upkd BPS).
- d. Pelayanan perpustakaan yang terjangkau masyarakat melalui TBM.
- e. Mengikutkan warga dalam program paket belajar C yang berada di wilayah Kec.Rungt.
- f. Mengadakan Try Out UNAS SD bekerjasama dg PRIMAGAMA Wonorejo.
- g. Adanya Pondok Sosial “Kampung Anak Negeri”.
- h. Adanya 6 PAUD dan Taman Bacaan Masyarakat untuk meningkatkan minat baca dan pendidikan sejak dini.

2. Upaya Dalam Kesehatan Masyarakat

- a. Terbentuk Kelurahan Siaga sejak th. 2006.
- b. Adanya Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel).
- c. Puskesmas Medokanayu mendapat sertifikat ISO 9001-2000.
- d. POSYANDU Mandiri 2 lokasi.
- e. Bayi gizi buruk 2011 dan Tahun 2012 nihil .
- f. Mensosialisasikan dan merencanakan kelurahan Wonorejo bebas ODF.

3. Upaya Dalam Ekonomi Masyarakat

- a. Koperasi berbadan Hukum 2 Buah dan 1 (satu) buah Pra Koperasi yang omset kekayaan sebesar 127.000.000.
- b. Koprasi Wanita omset semula 25 jt berkembang menjadi 54,33 jt.
- c. Usaha produksi Sirup dan Jenang dari *Mangrove*.
- d. Batik Motif *Mangrove* Berasal dari Ibu-ibu yang mayoritas dari Keluarga Miskin.
- e. Adanya Pasar yang di prakarsai LKMK Wonorejo.
- f. Berkembangnya kelompok-kelompok tani sehingga menambah penghasilan warga..

- g. Bertumbuhnya UKM ataupun industri-industri kecil rumah tangga di masyarakat.
4. Upaya dalam keamanan dan ketertiban
- FKPM Nirwana Eksekutif yang sangat berperan aktif dalam bidang keamanan dan ketertiban.
 - Mengaktifkan kelompok Anggota Linmas sejumlah 65 orang.
 - Pengamanan PEMILU.
 - Memiliki 1 (satu) buah speedboat untuk memantau Hutan *Mangrove* Wonorejo, dan 2 (dua) buah sepeda motor patroli.
 - Mengadakan pelatihan pemadam kebakaran bagi Para Hansip dan Satpam Perumahan se Kelurahan Wonorejo sejumlah 30 orang.
 - Total Pengeluaran FKPM dari dana swadaya sekitar Rp. 850 jt.
5. Upaya Dalam Partisipasi Masyarakat
- Pelaksanaan program kebersihan yang ditangani langsung oleh semua anggota masyarakat dengan kesadaran cukup tinggi. Kerja bakti rutin di masing-masing RT pada minggu ke- II tiap bulan.
 - Kerja Bakti dalam pelestarian ekosistem pantai dengan melaksanakan penanaman *mangrove*.
 - Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dengan melibatkan warga.

Didalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala lurah, sekretaris lurah dan kasi-kasi diatas tercantum pada sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya dan Peraturan WaliKota (PERWALI) Surabaya No. 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya.

B. Penyajian Data

1. Kondisi ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo.

a. Sejarah Berdirinya Ekowisata *Mangrove* Wonorejo

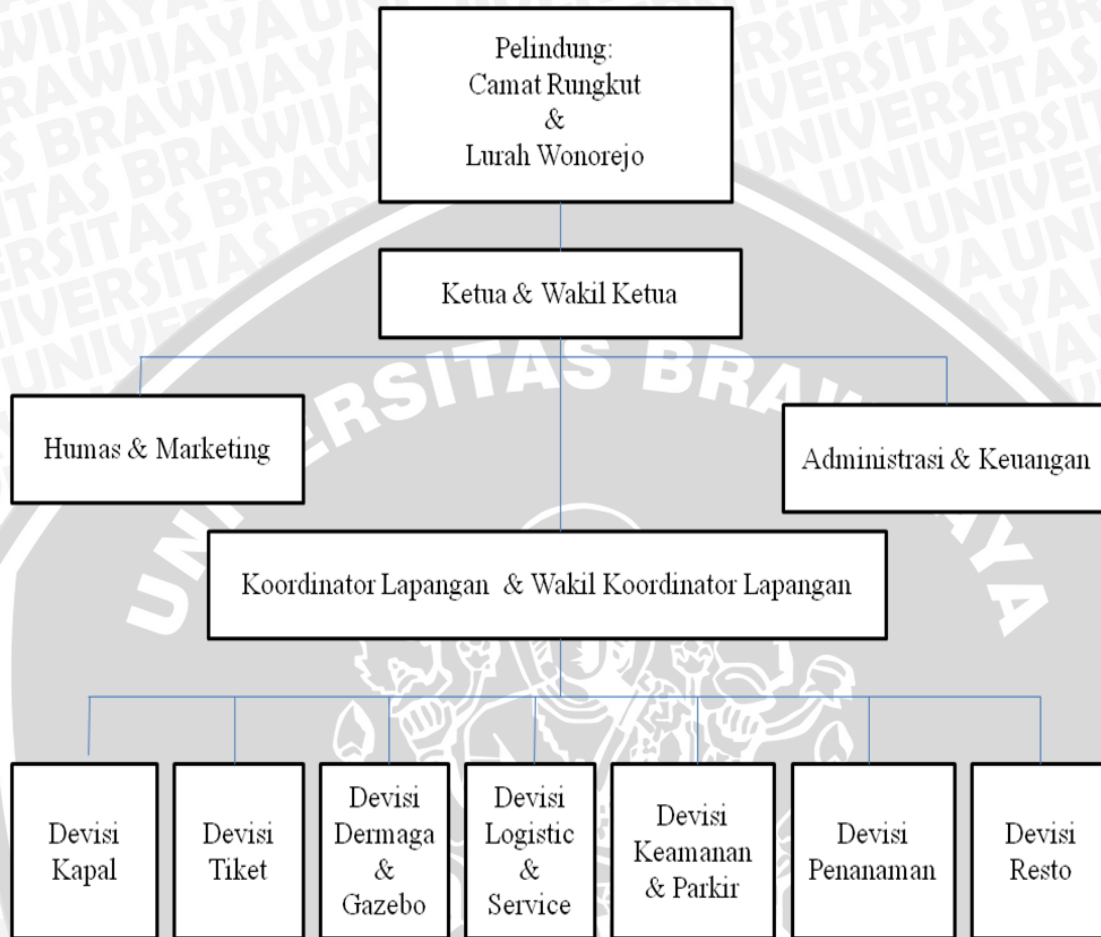
Ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah, suatu lembaga yang di bentuk oleh swadaya masyarakat Wonorejo. Awal mula terbentuknya ekowisata *mangrove* ini dikarenakan adanya pembalakan pohon *mangrove* secara besar-besaran yang di alih fungsikan menjadi tambak dan pohonnya di pakai untuk kayu bakar. Dari situlah awal berdirinya ekowisata, yang terletak di sebelah timur kota Surabaya, tepatnya di kelurahan Wonorejo, kecamatan Rungkut.

Dengan misi pada awalnya untuk mengembalikan hutan *mangrove* akibat penebangan liar. Dari situlah gerakan Bapak Djoko Suwondo dan kawan-kawan membuat rehabilitasi hutan dan lahan dengan cara melakukan penanaman pohon *mangrove* secara rutinitas yang di lakukan oleh warga Wonorejo dengan dana swadaya. Kegiatan tersebut di dukung oleh pemerintah daerah antara lain kelurahan dan kecamatan. Akhirnya dari situ dukungan dari beberapa pihak antara lain Walikota, Kepolisian, Dinas Pertanian. Dari situlah kelurahan Wonorejo mengadakan pemilihan ketua umum lembaga ekowisata *mangrove* secara voting, dan pemenang pilihan tersebut ialah bapak Djoko suwondo, dan di sahkan oleh keputusan lurah Wonorejo No : 556/ 157/436.11.15.5/ 2009 tgl 1 juli 2009 dan di kukuhkan oleh walikota Surabaya pada tgl 09 agustus 2009, bersamaan dengan peresmian gazebo yang di sumbangkan dari polwil tabes, serta pengelolaanya di serahkan ke pada warga Wonorejo Surabaya. dan dari situ kelurahan Wonorejo mendapatkan juara 1, kategori

kelurahan berhasil dan mendapatkan hadiah bentuk uang sebesar Rp 60.000.000,- di potong 20% tinggal 48.000.000,- dan ekowisata *mangrove* mendapat dana hibah dari kelurahan sebesar 19.000.000,- yang dibuatkan 1 unit kapal.

Setelah ketua terbentuk di bentuklah managementnya, selain itu konsep ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, disamping menjaga dan mengembalikan hutan *mangrove*, juga mengedepankan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan hutan *mangrove* yang berkesinambungan. Sesuai tujuannya yakni pengelolaan hutan *mangrove* yang berkelanjutan. Suatu bentuk kegiatan wisata yang tetap memperhatikan kelestarian hutan *mangrove* beserta flora dan fauna yang terdapat di hutan *mangrove* Wonorejo, atau yang lazim disebut **EKOWISATA** yaitu **suatu bentuk kegiatan wisata yang Ramah Lingkungan dan Bertanggung Jawab**. Berikut adalah struktur organisasi ekowisata *mangrove* Wonorejo:





Gambar 5 Struktur Organisasi Ekowisata *Mangrove* Wonorejo
 Sumber: Ekowisata *Mangrove* Wonorejo

Berikut adalah nama-nama dari struktur organisasi Ekowisata *Mangrove* Wonorejo:

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Pelindung 1 | : Camat Rungkut |
| b. Pelindung 2 | : Lurah Wonorejo |
| c. Ketua Ekowisata | : Ir. Djoko Soewondo |
| d. Wakil Ketua | : Drs. Adi Pramono |
| e. Humas & Marketing | : Muhammad Wachid S. Sos |
| f. Administrasi & Keuangan | : Nurul Fatmawati |
| g. Koordinator Lapangan | : M. Sodikin |
| h. Divisi Kapal | : Mat Roni, Syaiful, Taufik, Samuji, Iwandono. |
| i. Divisi Tiket | : Nur Chosidah |
| j. Divisi Dermaga & Gazebo | : Arman Dan Mat Nazir |

- k. Divisi Logistic & Servis : Iswandi
- l. Divisi Keamanan : Vand, Mulyadi, Dio Dan Mad Madura
- m. Divisi Penanaman : M. Fatoni
- n. Divisi Resto & PKL : Sodikin Dan Sumarti
- o. Pemandu Wisata : Karang Taruna

Gambar 5 diatas menunjukkan struktur organisasi ekowisata *mangrove* Wonorejo yang anggota pengurusnya adalah masyarakat kelurahan Wonorejo sendiri. Pada setiap pengurus objek wisata tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab kerja masing-masing. Keikutsertaan masyarakat dalam mengurus ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan suatu peluang terciptanya lapangan pekerjaan.

Ekowisata ini diakui sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar dan juga daerah. Meskipun terjadi peningkatan penghasilan, ekowisata *mangrove* Wonorejo harus tetap dijaga lingkungannya supaya tidak mengalami kerusakan, karena pada kenyataannya aspek ekologi sering dikesampingkan ketika melihat nilai ekonomi. Oleh karena itu, ekosistem dari *mangrove* harus tetap dilestarikan dan dirawat, meskipun terjadi pengembangan. Jika *mangrove* tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal, maka luas *mangrove* Wonorejo akan semakin berkurang dan tentunya merusak lingkungan, karena tanaman *mangrove* memberikan banyak manfaat untuk semua aspek. Berikut adalah luas hutan *mangrove* Wonorejo pada tahun 2010-2013 :

Tabel 3
Luas hutan *mangrove* Wonorejo tahun 2010-2013

Tahun	Luas hutan <i>mangrove</i> (ha)
2010	64,27
2011	63,8
2012	64,83
2013	73,28

Sumber : Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa luas dari hutan *mangrove* di kelurahan Wonorejo mengalami penurunan dan kenaikan pada tahun 2010 sampai 2013. Interview dengan Bapak YL (L, 40 Tahun) Kasi Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Surabaya menyatakan bahwa:

“Berubahnya luas ini dipengaruhi oleh beberapa hal mbak, yang penurunan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Pada faktor alam dipengaruhi oleh adanya ombak yang menyeret tanaman *mangrove*, sedangkan faktor manusia terjadi karena penebangan liar yang dilakukan masyarakat. Kenaikan luas hutan *mangrove* disebabkan karena dilakukan kegiatan penanaman. Dinas Pertanian sendiri mempunyai target dalam melakukan penanaman *mangrove* yaitu keberhasilan minimal 10%, karena keberhasilan penanaman *mangrove* tingkat nasional kurang dari 30% sehingga jika tercapai 10% sudah sangat bagus” (wawancara 22 April 2014 di Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak YL diatas, kegiatan penanaman *mangrove* sangat perlu dilakukan karena akan menunjang berkembangnya ekowisata

berbasis ramah lingkungan. Wisata lingkungan ini membuat pengelola harus selalu menonjolkan potensi *mangrove* yang ada di Wonorejo supaya tidak rusak karena beberapa faktor. Sedangkan untuk menunjang berjalannya ekowisata *mangrove* Wonorejo memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengunjung. Sarana dan prasarana yang terdapat di ekowisata *mangrove* Wonorejo ini sebagian adalah bantuan dari pemerintah dan pihak swasta. Berikut adalah fasilitas yang ada di ekowisata *mangrove* Wonorejo :

Tabel 4
Fasilitas ekowisata *mangrove* Wonorejo

Fasilitas	Jumlah	Kondisi
<i>Jogging track</i>	500 m	Memadai
Pos pantau	1	Memadai
Dermaga	1	Memadai
Toilet	7	Bersih
Genset	3	Memadai
Perahu karet	1	Memadai
Perahu tradisional	3	Memadai
<i>Speed boat</i>	2	Memadai
Perahu gayung	1	Memadai
Gazebo	4	Memadai
Kolam pancing	1	Memadai
Mushola	1	Bersih
Taman bermain anak	1	Masih membutuhkan perawatan
Resto	1	Memadai

Sumber: Hasil wawancara pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo

Sarana dan prasarana ekowisata *mangrove* Wonorejo yang terdapat di atas terlihat bahwa fasilitas yang ada terbilang lengkap, akan tetapi ada beberapa yang masih memerlukan perawatan supaya terlihat lebih tertata. Untuk lahan parkir di objek wisata ini tidak perlu khawatir karena parkir yang disediakan lumayan luas dan cukup membayar Rp. 3000,00 untuk mobil dan Rp. 2000,00 untuk sepeda motor. Sedangkan tiket masuk ke wisatanya sendiri tidak perlu membayar, hanya pada saat naik perahu dikenakan biaya sebagai berikut :



Gambar 6 Harga tiket perahu
Sumber: Dokumentasi penulis

Tiket perahu dan kapal tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana oleh pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo. Jika pada hari sabtu, minggu dan hari libur, pengunjung yang naik perahu lumayan banyak, namun

pada hari-hari biasa terlihat sepi dan bahkan tidak ada. Jika ekowisata *mangrove* Wonorejo ini sedang kedatangan tamu dari berbagai kalangan akan disuguhkan untuk mengelilingi ekowisata *mangrove* Wonorejo menggunakan perahu, kapal atau *speed boat*.

b. Manfaat dan fungsi *mangrove* Wonorejo

Tanaman *mangrove* memiliki banyak manfaat dan fungsi masing-masing bagi semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan dan tumbuhan juga dari aspek ekologiannya. Banyaknya manfaat dan fungsi *mangrove* tersebut di dukung dengan pernyataan dari Bapak YL (L, 40 Tahun) Kasi Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Surabaya:

“*Mangrove* itu punya banyak manfaat mbak, yaitu sebagai pelindung dan penahan pantai karena sistem perakaran yang khas berupa akar tunjang dan akar lutut dapat menghambat arus air dan ombak. Lalu perakaran tumbuhan menyebabkan kekutan arus dan ombak jadi lemah dan garis pantai terhindar dari pengikisan mbak. Nggak hanya itu mbak melemahnya arus akan menyebabkan masa lumpur yang terbawa air akan mengendap dan terjebak di antara akar-akar *mangrove* sehingga dapat menyebabkan garis pantai bergerak ke arah laut” (wawancara 02 Maret 2014 di Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya).

Selain sebagai pelindung dan penahan pantai, tanaman *mangrove* juga memiliki manfaat sebagai habitat fauna *mangrove*. Hal ini dituturkan oleh Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *mangrove* Wonorejo:

“Manfaat *mangrove* itu banyak sih mbak, di ekowisata ini biasanya dibuat tempat nyari makan, berlindung, berpijah, dan pembesaran bagi jenis-jenis binatang air seperti ikan dan udang serta organisme air lainnya. Nggak cumin itu aja mbak, *mangrove* juga jadi tempat

berkembang biak berbagai jenis binatang darat, seperti burung air dan kalong. Banyak juga burung pengembara yang datang dari daratan atau dari daerah lainnya mbak dan juga ada satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah” (wawancara 03 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Wawancara dengan Ibu NL diatas, manfaat *mangrove* masih banyak, karena di Wonorejo ini tanaman *mangrove* juga dapat diolah untuk makanan, minuman dan juga batik. Berikut adalah pernyataan Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo:

“Terus manfaat *mangrove* yang lain itu bisa diolah mbak jadi makanan, minuman sama batik. Semua bahannya dari *mangrove* yang ada disini mbak dan yang ngolah juga masyarakat Wonorejo sendiri. Makanannya itu berupa kerupuk *mangrove*, dodol *mangrove* sama ada juga permennya mbak. Terus minumannya itu situp *mangrove* yang diambil dari buah bogemnya *mangrove* itu. Kalau batik juga dari buah sama batangnya mbak dan motifnya juga tentang *mangrove*. entah *mangrovenya*, hewannya dan yang lain mbak”(wawancara 03 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Mangrove merupakan potensi dan kekayaan alam yang harus terus dilestarikan, karena banyak tanaman *mangrove* yang mengalami kerusakan karena beberapa faktor. Menurut bapak YL (L, 40 Tahun) Kasi Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Surabaya, menyatakan bahwa:

“*Mangrove* sekarang itu udah banyak yang rusak mbak. Faktornya sih dari ulah manusianya yang melakukan penebangan hutan *mangrove* untuk digunakan perumahan atau aktivitas pembangunan lainnya. Makanya itu Surabaya membuat kelompok kawasan konservasi atau perlindungan dan salah satunya di Wonorejo itu. Ya tujuannya pasti buat melindungi *mangrovenya* mbak. Biar nggak terus dimanfaatkan seenaknya sendiri. Kan *mangrove* punya banyak manfaat mbak, jadi sayang kalau harus dirusak gitu aja” (wawancara 02 Maret 2014 di Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya).

Wawancara diatas merupakan suatu usaha untuk melindungi hutan *mangrove* dari upaya manusia yang ingin merusak potensi alam tersebut. Upaya untuk melestarikan hutan *mangrove* selain sebagai kawasan konservasi juga dapat dimanfaatkan sebagai wisata edukasi. Hal ini diungkapkan oleh Ibu NL (P, 26 Tahun)

Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowista *Mangrove* Wonorejo:

“Disini itu nggak cuman buat wisata-wisata aja sih mbak, banyak kok sekolah-sekolah yang datang kesini buat wisata sekalian belajar bagaimana menanam *mangrove* dan belajar tentang *mangrovenya*. Biasanya sekolah SD, SMP sama SMA di Surabaya. Tapi juga ada perguruan tinggi sama dari pihak pemerintah juga kunjungan-kunjungan buat belajar tentang *mangrove*. Lha dari situ bisa sekalian buat ngenalin *mangrove* mbak biar semakin banyak yang ngerti”(wawancara 03 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Wawancara diatas menunjukan bahwa ekowisata *mangrove* sendiri memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas dalam bidang pendidikan sebagai menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman *mangrove*.

c. Hasil produksi *mangrove* Wonorejo

Tanaman *mangrove* memiliki banyak manfaat yang berguna untuk lingkungan, hewan dan masyarakat di sekitarnya. Manfaat yang dimiliki tanaman *mangrove* terdapat pada hasil produksinya. Di kelurahan Wonorejo sendiri, tanaman *mangrove* memberikan hasil produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa hasil produksi dari tanaman *mangrove* di kelurahan Wonoejo:

1. Batik *mangrove*

Batik *mangrove* merupakan salah satu dari hasil produksi tanaman *mangrove* di Wonorejo yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan batik *mangrove* ini dilakukan oleh ibu-ibu di kelurahan Wonorejo sendiri Menurut Bapak YL (L, 40 Tahun) Kasi Bidang Kehutanan Dinas Pertanian bahwa :

“Yang unik dari bahan pewarna batik *mangrove* ini adalah pewarnanya yang berasal dari buah dan batang dari tanaman *mangrove* itu sendiri. Buah dan batang yang digunakan ini pun tidak mengambil langsung dari pohonnya, melainkan buah dan batang yang sudah jatuh dengan sendiri. Hal seperti ini merupakan salah satu tindakan ramah lingkungan, karena biasanya buah atau batang tanaman yang jatuh akan menjadi sampah dan dibuang begitu saja, tetapi yang terjadi di kelurahan Wonorejo ini menggunakannya sebagai bahan pewarna dari pembuatan batik *mangrove* yang sangat ramah lingkungan. Dalam proses pembuatan batik *mangrove* tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena bahan pewarnanya dari buah *mangrove* (wawancara 03 Maret 2014 di Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya).

Batik *mangrove* Wonorejo merupakan salah satu wujud dari ramah lingkungan juga di ungkapkan oleh Ibu RA (P, 36 Tahun) Staff Bidang Promosi Dinas Pariwisata menyatakan bahwa:

“Batik tersebut merupakan yang ramah lingkungan ini juga memiliki keunikan mbak soalnya motif antara batik satu dengan batik yang lain tidak akan sama karena pembuatannya menggunakan masih pake teknik manual atau nggak pake mesin, sehingga meskipun konsumen memesan sama pasti ada ketidaksamaan. Keunikan yang dimiliki batik *mangrove* ini juga terdapat dalam motif yang menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan *mangrove* mbak, misalnya hewan yang terdapat di daerah *mangrove*, bentuk tanaman dari *mangrove* sendiri dan berbagai motif lainnya yang berhubungan dengan *mangrove*.Lha sebab itu disebutlah batik *mangrove* karena bahan pewarnanya yang langsung dari buah dan batang tanaman *mangrove* dan motif batik yang menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan *mangrove*, dari proses produksi yang membutuhkan waktu lama dan keunikan bahan

pewarna juga motif yang dimiliki batik *mangrove* ini menyebabkan harga jual batik ini tidak murah mbak. Biasanya pembelian batik *mangrove* ini dilakukan oleh orang-orang kalangan menengah keatas karena harga dari batik *mangrove* ini mulai Rp 600.000,00 keatas per satu meternya” (wawancara 02 April 2014 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Hasil wawancara dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata diatas, batik *mangrove* Wonorejo merupakan suatu hasil produksi yang unik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi sebab bahan baku yang digunakan, motif pada batik itu sendiri, cara pembuatan yang masih tradisional sehingga membutuhkan waktu yang lama. Berikut adalah gambar dari batik *mangrove* Wonorejo:



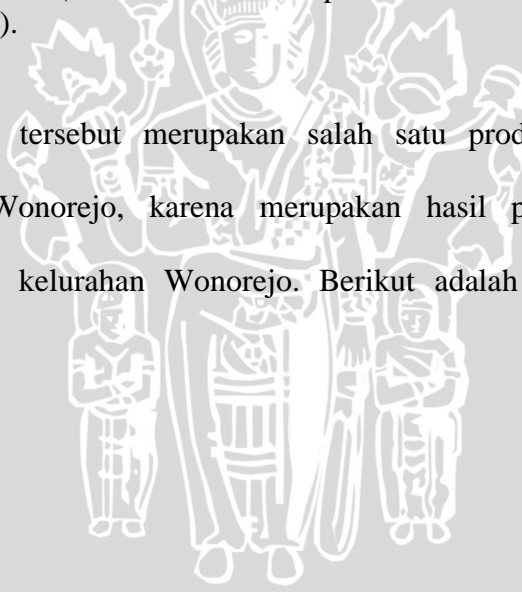
Gambar 7 Batik *Mangrove* Wonorejo
Sumber: Dokumentasi penulis

2. Sirup *Mangrove*

Hasil produksi dari tanaman *mangrove* selain batik *mangrove* adalah sirup *mangrove*. Menurut Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan bahwa:

“Sirup *mangrove* ini dikelola oleh masyarakat Wonorejo sendiri dan tersedia di ekowisata *mangrove* Wonorejo di lokasi para PKL mbak. Bahannya digunakan dari buah dari buah *mangrove* sendiri. Sirup buah *mangrove* mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai anti oksidan dan proses pembuatan sirup *mangrove* ini cukup mudah mbak, nggak kayak proses pembuatan batik *mangrove* yang membutuhkan waktu lama, sehingga produksi sirup *mangrove* ini dapat di produksi setiap minggunya” (wawancara 02 April 2014 di Kantor kelurahan Wonorejo).

Sirup *mangrove* tersebut merupakan salah satu produk yang dijual di ekowisata *mangrove* Wonorejo, karena merupakan hasil produksi dari buah *mangrove* yang ada di kelurahan Wonorejo. Berikut adalah gambar dari sirup *mangrove* Wonorejo:





Gambar 8 Sirup *mangrove* Wonorejo
Sumber: Dokumentasi penulis

3. Kerupuk *Mangrove*

Salah satu hasil produksi tanaman *mangrove* di Wonorejo adalah kerupuk *mangrove*. Hal ini dijelaskan oleh Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo:

“Produksi dari *mangrove* sini juga ada kerupuknya mbak. Bahan tentu dari buahnya *mangrove*. Tapi untuk bikin kerupuk ini nggak cuman buahnya aja tapi juga dicampu dengan bahan-bahan lainnya mbak, kayak ikan bandeng atau mujaer, tepung tapioka, garam, bawang putih dan air mineral. Dan yang ngelola kerupuk *mangrove* ini juga masyarakat Wonorejo sendiri mbak sama seperti hasil produksi yang lainnya” (wawancara 24 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Berikut adalah contoh gambar dari hasil produksi tanaman *mangrove* yaitu kerupuk *mangrove*:



Gambar 9 Kerupuk *mangrove*
Sumber: Dokumentasi penulis

Manfaat dari hasil produksi tanaman *mangrove* di Wonorejo ini merupakan salah satu prinsip dari ekowisata yaitu ramah lingkungan. Sebab buah-buah dan batang yang berjatuhan tidak dibuang, tetapi dapat diolah dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di kelurahan Wonorejo tersebut. Sehingga hal tersebut membantu pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo dalam melestarikan tanaman *mangrove* dan mengembangkan objek wisata yang berbasis ramah lingkungan dengan mengelola buah dari tanaman *mangrove* tersebut.

d. Peran Stakeholder

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah dari aspek

perencanaannya. Perencanaan yang disusun tentunya melihat kondisi yang terjadi di objek yang akan direncanakan sesuai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya dan yang tercantum oleh Peraturan Daerah (PERDA No. 3 Tahun 2007). Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu MR (P, 30 Tahun) Staff Bidang Tata Guna Lahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya:

“Kita udah bikin perencanaan mbak buat *mangrove* itu, tapi pada kenyataannya nggak berjalan dengan baik. Kalau kita buat pasti sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayahnya mbak jadi nggak sembarangan. Jadi sampe sekarang kita nggak bisa berperan penuh, paling ya dinas-dinas saja. Kayak pertanian yang ada program penanaman dan pariwisata yang promosiin. Ya sekedar itu aja mbak. Kalau kita mau ngurusin secara penuh kita harus beli lahan disana, padahal ada beberapa yang memang punya pemkot” (wawancara 22 April 2014 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya).

Hasil wawancara dengan Ibu MR Diatas merupakan peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya atau dikenal dengan BAPPEKO dalam mengembangkan bidang pariwisata. Meskipun perencanaan terus dilakukan tapi aspek ekologi tetap diperhitungkan oleh pemerintah untuk tidak merusak lingkungan.

2. Dinas Pertanian

Peran dinas pertanian dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah sebagai pengelola kegiatan penanaman pohon *mangrove* yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait yang ingin melakukan penanaman *mangrove*. Kegiatan penanaman ini, Dinas Pertanian memiliki peran dalam menentukan jenis *mangrove* apa yang harus ditanam, karena untuk menanam *mangrove* sendiri harus sesuai

dengan tempat yang ingin ditanam sehingga harus menyesuakannya dengan jenis *mangrove*. Menurut Bapak YL (L, 40 Tahun) Kasi Bidang Kehutanan Dinas Pertanian bahwa :

“Jarak tanam yang biasa dilakukan sekitar 1,5-2 meter dan tinggi tanaman *mangrove* sekitar setengah meter mbak. Penanaman *mangrove* juga dilakukan di sela-sela yang berguna untuk penebalan, karena jika penanaman semakin ke laut akan tersangkut ombak. Bukan dalam kegiatan penanaman saja melainkan juga dalam mengelola ekowisata ini tapi kita juga melakukan pengawasan terhadap objek wisata *mangrove* untuk mengetahui kondisi *mangrove* yang ada” (wawancara 02 April 2014 di Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya).

Berikut adalah jumlah penanaman *mangrove* yang di pantau oleh Dinas Pertanian:

Tabel 5
Jumlah penanaman *mangrove* berdasarkan lokasi di Kelurahan Wonorejo tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah tanaman (batang)	Lokasi (Ha)			Jumlah (Ha)
		Pantai	Tambak	KA-KI Sungai	
2011	205.802	1,45	3,91	17,34	22,70
2012	133.800	5,06	12,10	10,27	27,43
2013	131.070	9,76	11,99	30,40	52,15

Sumber: Dinas Pertanian, 2014

Jumlah penanaman *mangrove* di kelurahan Wonorejo diatas dilakukan oleh berbagai pihak dari sekolah-sekolah, perguruan tinggi, pemerintah dan pihak swasta. Akan tetapi kegiatan penanaman *mangrove* tersebut tetap dalam pengawasan Dinas Pertanian Kota Surabaya karena untuk melakukan penanaman *mangrove* harus sesuai

dengan tempat yang akan ditanam. Dinas Pertanian memilih jenis tanaman *mangrove* yang seperti apa yang akan ditanam pada tempat yang akan ditentukan dan juga berapa *mangrove* yang akan ditanam. Sehingga peran dari Dinas Pertanian sendiri sangat berpengaruh dalam kegiatan penanaman *mangrove* yang akan dilakukan oleh pihak mana pun. Bantuan sarana prasarana juga diberikan oleh Dinas Pertanian, antara lain: *Jogging track* dan dermaga yang ada di darat untuk sandaran kapal.

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembang ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah dalam bidang pemasaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu RA (P, 37 Tahun) Staff Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa :

“Kita sudah melakukan pemasaran secara rutin dalam setiap *event-event* yang sedang dilaksanakan mbak. Pemasaran biasanya dilakukan dengan cara memberikan brosur wisata Kota Surabaya pada setiap event lokal maupun internasional. Nggak cuman dalam *event-event* yang diadakan aja sih mbak, promosi juga dilakukan di sebuah tempat yaitu pusat informasi wisata Surabaya yang biasa disebut TIC (*Tourism Information Center*) yang berlokasi di Balai Pemuda. Berbagai cara pemasaran dilakukan dari brosur dan juga media sosial yang bertujuan lebih mengenalkan kepada masyarakat bahwa Surabaya memiliki potensi alam yang luar biasa padahal Surabaya merupakan kota besar yang modern, tapi sayangnya masyarakat Surabaya lebih memilih untuk mengunjungi wisata lain yang ada di luar kota di banding ekowisata *mangrove* mbak” (wawancara 02 April 2014 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Hasil wawancara diatas, kendala dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo terganjal dengan ketertarikan masyarakat terhadap objek wisata tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah melakukan pemasaran pada tiap acara yang ada dengan memberikan brosur dan tempat informasi tentang wisata di kota Surabaya.

4. Masyarakat

Peran masyarakat Wonorejo sendiri tidak kalah pentingnya dengan pemerintah Kota Surabaya. Bahkan pengelolaan ekowisata *mangrove* Wonorejo terdiri dari masyarakat kelurahan Wonorejo sendiri. Menurut Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan bahwa :

“Keikutsertaan masyarakat Wonorejo dalam mengelola ekowisata tersebut sangat terlihat mbak, karena semua pegawai yang ada dalam ekowisata adalah masyarakat Wonorejo sendiri, yaitu: para PKL, penjual tiket perahu, penjual tiket masuk dan pegawai yang lainnya juga mbak, dari situ aja sudah terlihat peran dari masyarakat kelurahan Wonorejo”(wawancara 03 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Hasil wawancara diatas peran masyarakat Wonorejo dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo sangat berpengaruh karena sebagai aktor untuk mngembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo.

5. Pihak swasta

Pihak swasta yang ikut serta dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo juga tidak kalah penting hal ini dituturkan oleh Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *mangrove* Wonorejo:

“Kayak pemerintah sama masyarakat sih mbak, pihak swasta juga ikut peran serta dari ngasih bantuan perlengkapan gitu kayak gazebo, jarring-jaring buat dilaut biar sampahnya nggak masuk kehutan sama ada kegiatan nanem *mangrove* juga. Biasanya dari pertambangan san sampoerna mbak” (wawancara 10 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Wawancara dengan Ibu NL diatas menunjukkan bahwa banyak yang mendukung potensi alam ini dengan adanya bantuan sarana prasarana dan fasilitas. Dukungan telah diperoleh, tentunya pengelola dan masyarakat harus melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk tetap berperan serta dalam mengembangkan objek wisata *mangrove* tersebut.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo diungkapkan oleh Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo:

“Untuk faktor pendukungnya itu dari masyarakatnya sendiri sama hasil produksinya mbak. Soalnya yang mengelola *mangrove* ini kan masyarakat Wonorejo sendiri, trus juga mereka punya hasil produksi dari olahan *mangrove* yang tentunya bisa dijual. Trus yang ngelola

hasil produksinya juga masyarakat disini sama dibantu ibu-ibu PKK mbak. Hasilnya itu ada batik *mangrove*, sirup *mangrove*, kerupuk *mangrove*, dodol *mangrove*, permen *mangrove* dan sabun *mangrove*. Pemerintah sama swasta juga ngasih bantuan dalam sarana prasarana mbak. Kalau dari pemerintah itu Dinas Pertanian sama Pariwisata. Yang swasta itu salah satunya Pertamina ngasih jaring-jaring penahan samapah biar nggak masuk ke hutan. Dari sekolah dan perguruan tinggi juga banyak yang datang buat nanem *mangrove*. Wonorejo juga merupakan kawasan konservasi jadi ya dilindungi sama pemerintah (wawancara 03 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Peran dari masyarakat Wonorejo, pemerintah dan pihak swasta merupakan salah satu faktor pendukung, karena tanpa adanya peran dari pihak tersebut maka objek wisata ini belum tentu bisa berkembang. Semua pihak tersebut memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugas dan porsinya, sehingga jika kerjasama yang baik bisa terjalin dengan baik maka ekowisata *mangrove* Wonorejo akan dapat berkembang secara lebih meningkat.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo diungkapkan oleh Pak YL (L, 40 Tahun) Kasi Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Surabaya:

“Bahan baku dari hasil produksi olahan *mangrove* itu juga menghambat mbak, soalnya bahan yang digunakan nunggu buahnya jatuh, jadi nggak metik. Kalau ada yang jatuh ya baru di buat” (wawancara 05 Maret 2014 di Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya).

Hasil wawancara diatas dengan Bapak YL, hasil produksi tidak akan meningkat jika hanya menunggu buah jatuh dari pohonnya. Sehingga permasalahan bahan baku tersebut akan menghambat proses produksi.

Faktor penghambat eksternal dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo dituturkan oleh Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo:

“Kalau penghambat itu ya nggak ada transportasi yang kesini sama jalannya jelek mbak, belum halus trus sempit juga. Masyarakatnya ya kurang paham tentang fungsi *mangrove* sendiri mbak. Dulu pernah ada kejadian kalau sebelum ekowisata ini ada ituada penebangan liar yang dilakukan masyarakat sini, tapi mereka seperti itu karena nggak tau mbak apa sih *mangrove* itu. Mereka menebang untuk kayunya dijual. Trus ada pak Joko menjamin bahwa tidak ada penebangan liar lagi dan akhirnya dibikin ekowisata ini” (wawancara 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Adanya faktor penghambat diatas menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memiliki pengetahuan secara luas dalam melestarikan tanaman *mangrove*. adanya faktor penghambat tersebut akan sangat menghambat proses pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo, karena pengetahuan tentang melestarikan *mangrove* sangat penting dan jika hal tersebut belum dimiliki oleh masyarakat sekitar maka secara tidak langsung masyarakat dapat merusak lingkungan.

3. Perencanaan skenario pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo

a. *Tracking* (Melacak)

Pada tahapan ini adalah tahapan permulaan untuk mempelajari dan memahami kondisi yang ada pada perencanaan skenario mengenai ekowisata *mangrove* Wonorejo. Menurut Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo:

“Ekowisata ini berdiri karena upaya pak Djoko mbak yang sekarang jadi ketua pengelola. Dulu disini itu rawa-rawa dan kotor sekali nggak ada yang ngurus. Lha ada penebangan liar yang dilakuin sama warga sini, karena mereka nggak tau apa itu *mangrove*, trus sama pak Djoko itu masyarakat dikasih pengarahan biar mau ikut serta buat benerin *mangrove* ini. Akhirnya masyarakat mau dan pengurusnya ya masyarakat itu sendiri mbak. Trus diresmikan sama Bapak Bambang DH mbak waktu itu jadi menjabat Walikota. Biayanya juga pak Djoko semua yang ngeluarin, sampek akhirnya ikut lomba trus menang, lalu uangnya dipake buat nambah sarana prasarana mbak. Itu awal mulanya juga ekowisata ini ada. Kita juga dapet dukungan dari pemerintah sama swasta mbak. Pemerintah dari dinas pertanian sama pariwisata mbak. Kegiatan penanaman mbak kalau pertanian, kalo pariwisata pemasarannya” (wawancara 27 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Pernyataan mengenai kondisi ekowisata *mangrove* Wonorejo ini tidak hanya diungkapkan oleh Ibu NL melainkan juga Bapak AD (L, 27 Tahun) Staff Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Kota Surabaya:

“*Mangrove* Wonorejo itu bagus mbak, karena merupakan potensi alam yang alhamdulillah sekarang sudah dimanfaatkan sebagai ekowisata. Dari situ juga bisa meningkatkan pendapat masyarakat mbak, soalnya kan masyarakat disana kebanyakan kerja nelayan karena tinggal dipesisir. Jadi pengurusnya ya mereka sama ibu-ibu disana membuat hasil produksi dari tanaman *mangrove*. *Mangrove* disana juga dilindungi sama daerah mbak, itu ada di Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2007. Di situ menyatakan kalau Wonorejo

adalah salah satu kawasan konservasi” (wawancara 28 Februari 2014 di Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya).

Ekowisata *mangrove* Wonorejo tersebut juga mendapatkan suatu dukungan dari pemerintah dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA) seperti yang telah dijelaskan Bapak AD diatas. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu MR (P,30 Tahun) Staff Bidang Tata Guna Lahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya:

“Untuk kawasan *mangrove* sendiri sudah ada banyak peraturan yang melindungi mbak, salah satu Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2007 itu. Kita juga udah ada perencanaan buat ngembangin Wonorejo tapi ya ada kendala lah mbak. Jadi perencanaannya masih belum terealisasi dengan baik. Perencanaan kita buat juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 sama Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mbak” (wawancara 22 April 2014 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya).

Potensi daerah tersebut sudah memiliki peraturan-peraturan yang dapat melindungi dan dimanfaatkan secara baik tanpa merusak lingkungan dari potensi alam yang ada. Sehingga dibutuhkan upaya untuk mengenalkan potensi alam tersebut kepada masyarakat bahwa Kota Surabaya mempunyai kekayaan alam yang perlu untuk dilestarikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibu RA (P, 37 Tahun) Staff Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya:

“Tugas kita adalah mengenalkan kepada masyarakat mbak tentang adanya wisata alam itu, karena kan ini merupakan suatu kebanggaan Surabaya memiliki wisata alam yang bisa dilihat Surabaya penuh dengan bangunan-bangunan besar. Promosi terus kita lakukan mbak, tapi ya tentunya ada kendalanya yaitu masyarakat masih belum sadar bahwa ini lho kota ku punya potensi alam yang luar biasa, mbok ya

ikut berpartisipasi. Minimal berwisata lah mbak, tapi mereka lebih tertarik untuk datang ke kota lain” (wawancara 02 April 2014 di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

Kondisi pada objek wisata diatas dikemukakan oleh pihak-pihak terkait yang tentunya berperan dalam proses pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo sesuai dengan peran masing-masing. Sehingga hal tersebut dapat memberikan dukungan yang baik untuk kemajuan potensi daerah dan tentunya dilindungi oleh peraturan-peraturan yang menjauhkan dari ancaman yang ada.

b. *Analysing* (Analisis)

Pada tahapan ini akan menjelaskan permasalahan yang ada pada ekowisata *mangrove* Wonorejo untuk dapat diidentifikasi apa yang mendorong untuk disusun perencanaan skenario. Ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan suatu potensi yang sangat bermanfaat bagi semua pihak. Pengembangan objek wisata ini mengalami beberapa kendala yang dapat mempengaruhi proses berkembangnya ekowisata ini. Kendala yang terjadi adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat kelurahan Wonorejo tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan fungsi dari tanaman *mangrove*. Faktor dari fasilitas juga menjadi kendalam dalam mengembangkann ekowisata *mangrove* Wonorejo ini, karena fasilitas yang ada belum memadai. Kondisi jalan yang masih rusak, tidak adanya akses transportasi umum yang menuju ke obyek wisata, masih belum adanya alat untuk menahan sampah dari laut agar tidak

masuk ke hutan *mangrove* dan hasil produksi masih mengandalkan bahan baku dari tanaman *mangrove* yang jatuh.

c. *Imaging* (Membayangkan)

Tahapan *imaging* atau membayangkan ini merupakan langkah dimana memikirkan apa yang terjadi di masa depan dengan menggunakan cara alternatif. Perencanaan skenario pada tahapan ini adalah salah satu langkah yang keras untuk memikirkan apa yang akan terjadi sesuai visi yang ada. Perumusan visi tersebut harus dilihat dari apa yang menjadi kekuatan yang ada dalam sebuah organisasi tersebut, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Pemerintah kota Surabaya yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya memiliki perencanaan untuk ekowisata *mangrove* Wonorejo yang diungkapkan oleh Ibu MR (P, 30 Tahun) Staff Bidang Tata Guna Lahan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya, bahwa:

“Perencanaan yang kita buat itu tetep ngelihat aspek lingkungannya mbak, jadi meskipun ada pembangunan ya tetep terjaga lingkungannya. Jadi kita nggak pernah tinggalin yang namanya aspek lingkungan” (wawancara 22 April 2014 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya).

Wawancara dengan Ibu MR diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya memiliki perencanaan untuk kawasan hutan *mangrove* yang sesuai dengan tata ruang kota Surabaya tanpa mengesampingkan aspek lingkungan meskipun terjadi

pembangunan, karena pemerintah Surabaya tetap ingin menjaga kelestarian lingkungan kota Surabaya.

d. *Deciding* (Memutuskan)

Tahapan *deciding* atau memutuskan ini merupakan tahapan dimana harus memilih mana saja langkah yang akan diambil. Untuk melakukan tahapan ini, tentunya dibutuhkan isu-isu yang akurat, sehingga dapat diambil keputusan yang paling baik. Proses pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil, karena setiap pihak dapat menyalurkan inspirasi atau ide-ide. Setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dan pihak. Menurut Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo, bahwa:

“Selama ini kita jalannya spontan mbak, yang diputuskan pas kita ngadain rapat biasa aja dan disesuaikan dengan biaya yang ada mbak. Kalau kita nggak ada biaya ya kita nggak jalan mbak, baru kalau ada biaya kita jalan” (wawancara 03 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Langkah pengambilan keputusan dalam perencanaan skenario ini terdapat 5 aspek yang berpengaruh, yaitu ekonomi, politik, teknologi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan keterangan dari Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo:

“Untuk teknologi sendiri kita masih belum ada mbak buat mengatasi sampah biar nggak masuk ke hutan *mangrove*. Selama ini kita

mendapatkan bantuan jaring-jaring dari Pertamina itu aja. Kalau yang alat yang lebih masih belum ada” (wawancara 03 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Hasil wawancara diatas, ekowisata *mangrove* Wonorejo masih belum menemukan alat untuk menghalangi sampah masuk ke hutan *mangrove* secara efektif. Saat ini, pengelola masih menggunakan jaring-jaring yang diberikan oleh pihak swasta yaitu Pertamina., namun jaring-jaring tersebut kalah dengan sampah yang ada.

e. Acting (Bertindak)

Tahapan *acting* atau bertindak ini merupakan tahapan terakhir dari perencanaan skenario. Pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo. Menurut pendapat Ibu NL (P, 26 Tahun) Staff Bidang Administrasi dan Keuangan Ekowisata *Mangrove* Wonorejo:

“Selama ini kita udah melakukan upaya untuk mengenalkan wisata ini ke masyarakat mbak, juga hasil produksinya. Dari situ kita juga memiliki beberapa media massa yang bisa dilihat oleh banyak orang, kayak website dan facebook. Dari situ masyarakat akan tau bagaimana ekowisata ini dan penasaran untuk datang. Usaha pemasaran kita telah lakuin, juga pembangunan sarana prasarana juga sudah tapi ya bertahap mbak” (wawancara 03 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Wonorejo).

Upaya telah dilakukan pengelola untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo. Akan tetapi upaya tersebut juga tidak lepas dari peran pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah yang telah menyusun perencanaan dan pihak

swasta yang memberikan dukungan melalui bantuan fasilitas menunjukkan bahwa kerjasama harus terus dijaga untuk mencapai tujuan.

C. PEMBAHASAN

1. Kondisi ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo

a. Sejarah Berdirinya Ekowisata *Mangrove* Wonorejo

Ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah, suatu lembaga yang di bentuk oleh swadaya masyarakat Wonorejo. Wisata *mangrove* ini menawarkan sensasi alam yang berwawasan lingkungan. Menurut Yoeti (1999:38) ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial budaya etnis setempat dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan di sekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal.

Awal mula terbentuknya ekowisata *mangrove* ini dikarenakan adanya pembalakan pohon *mangrove* secara besar-besaran yang di alih fungsikan menjadi tambak dan pohonnya di pakai untuk kayu bakar. Dari situlah awal berdirinya ekowisata, yang terletak di sebelah timur kota Surabaya, tepatnya di kelurahan Wonorejo, kecamatan Rungkut. Hal tersebut sesuai dengan unsur-unsur pengelolaan ekowisata menurut Yoeti (1999: 40) sebagai berikut:

1. Pendidikan (*Education*)

Aspek pendidikan merupakan bagian utama dalam mengelola ekowisata karena membawa misi sosial untuk menyadarkan keberdaaan manusia, lingkungan, dan akibat yang mungkin ditimbulkan bila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam manajemen pemberdayaan lingkungan. Misi tersebut tidak

mudah karena untuk menjabarkan dalam satu paket wisata seringkali bentrok dengan kepentingan anatar perhitungan ekonomi dan terjebak dalam misi pendidikan konservatif yang kaku.

2. Perlindungan atau Pembelaan (*Advocacy*)

Setiap pengelolaan ekowisata memerlukan integritas kuat karena kadangkadangkang nilai pendidikan dari ekowisata sering terjadi salah paham. Prasarana yang dibuat hendaknya mampu memberikan nila-nilai berwawasan lingkungan dan menggunakan bahan-bahan di sekitar obyek itu walau kelihatan sederhana. Dengan demikian, keaslian dapat dipertahankan karena dengan kesederhanaan itu masyarakat di sekitar kawasan mampu mengelola dan mempertahankan kelestarian alam dengan sendirinya tanpa mengada-ada.

3. Keterlibatan Komunitas Setempat (*Community Involment*)

Dalam pengelolaan ekowisata, peran serta masyarakat setempat tidak bisa diabaikan. Masyarakat lebih tahu dari pendatang yang punya proyek karena keterlibatan mereka dalam persiapan dan pengelolaan kawasan sangat diperlukan.

4. Pengawasan (*Monitoring*)

Budaya yang berkembang pada masyarakat di sekitar kawasan tidak sama dengan budaya yang pendatang. Dalam melakukan aktivitas, akan terjadi pergeseran yang lambat laun akan mengakibatkan hilangnya kebudayaan asli. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan (*monitoring*) yang berkesinambungan sehingga masalah integritas, loyalitas, atau kualitas dan kemampuan untuk mengelola akan sangat menentukan untuk mengurangi dampak tersebut.

5. Konservasi (*Conservation*)

Pengelola dan pengunjung yang datang harus meyakini bahwa tujuan pengembangan ekowisata adalah aspek konservasi bagi suatu kawasan dengan memperhatikan kesejahteraan, kesetaraan, dan mempertahankan kelestarian lingkungan kawasan itu sendiri.

Dengan misi pada awalnya untuk mengembalikan hutan *mangrove* akibat penebangan liar. Dari situlah gerakan Bapak Djoko Suwondo dan kawan-kawan membuat rehabilitasi hutan dan lahan dengan cara melakukan penanaman pohon *mangrove* secara rutinitas yang di lakukan oleh warga Wonorejo dengan dana swadaya. Kegiatan tersebut di dukung oleh pemerintah daerah antara lain kelurahan dan kecamatan. Akhirnya dari situ dukungan dari beberapa pihak antara lain Walikota, Kepolisian, Dinas Pertanian. Dari situlah kelurahan Wonorejo mengadakan

pemilihan ketua umum lembaga ekowisata *mangrove* secara voting, dan pemenang pilihan tersebut ialah bapak Djoko suwondo, dan di sahkan oleh keputusan lurah Wonorejo No : 556/ 157/436.11.15.5/ 2009 tgl 1 juli 2009 dan di kukuhkan oleh walikota Surabaya pada tgl 09 agustus 2009, bersamaan dengan peresmian gazebo yang di sumbangkan dari polwil tabes, serta pengelolaanya di serahkan ke pada warga Wonorejo Surabaya. Dan dari situ kelurahan Wonorejo mendapatkan juara 1, kategori kelurahan berhasil dan mendapatkan hadiah bentuk uang sebesar Rp 60.000.000,- di potong 20% tinggal 48.000.000,- dan ekowisata *mangrove* mendapat dana hibah dari kelurahan sebesar 19.000.000,- yang di buat kan 1 unit kapal.

Setelah ketua terbentuk di bentuk lah managementnya, selain itu konsep ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo, disamping menjaga dan mengembalikan hutan *mangrove*, juga mengedepankan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan hutan *mangrove* yang berkesinambungan. Sesuai tujuannya yakni pengelolaan hutan *mangrove* yang berkelanjutan. Suatu bentuk kegiatan wisata yang tetap memperhatikan kelestarian hutan *mangrove* beserta flora dan fauna yang terdapat di hutan *mangrove* Wonorejo, atau yang lazim disebut **EKOWISATA** yaitu **suatu bentuk kegiatan wisata yang Ramah Lingkungan dan Bertanggung Jawab.**

Pada setiap pengurus objek wisata tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab kerja masing-masing. Keikutsertaan masyarakat dalam mengurus ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan suatu peluang terciptanya lapangan pekerjaan. Adanya ekowisata diakui sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar dan juga daerah.

Meskipun terjadi peningkatan penghasilan, ekowisata *mangrove* Wonorejo harus tetap dijaga lingkungannya supaya tidak mengalami kerusakan, karena pada kenyataannya aspek ekologi sering dikesampingkan ketika melihat nilai ekonomi. Oleh karena itu, ekosistem dari *mangrove* harus tetap dilestarikan dan dirawat, meskipun terjadi pengembangan. Jika *mangrove* tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal, maka luas *mangrove* Wonorejo akan semakin berkurang dan tentunya merusak lingkungan, karena tanaman *mangrove* memberikan banyak manfaat untuk semua aspek.

Pada kenyataannya, luas *mangrove* tidak stabil karena masih mengalami penurunan dan kenaikan pada tahun 2010 sampai 2013. Perubahan luas hutan *mangrove* tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Penyebab penurunan terjadi karena adanya kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Pada faktor alam dipengaruhi oleh adanya ombak yang menyeret tanaman *mangrove*, sedangkan faktor manusia terjadi karena penebangan liar yang dilakukan masyarakat. Kenaikan luas hutan *mangrove* disebabkan karena dilakukan kegiatan penanaman. Dinas Pertanian mempunyai target dalam melakukan penanaman *mangrove* yaitu keberhasilan minimal 10%, karena keberhasilan penanaman *mangrove* tingkat nasional kurang dari 30% sehingga jika tercapai 10% sudah sangat bagus.

Kegiatan penanaman *mangrove* adalah salah satu upaya untuk melakukan memperbaiki *mangrove* yang telah rusak. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menunjang berkembangnya ekowisata berbasis ramah lingkungan. Wisata lingkungan ini membuat pengelola harus selalu menonjolkan potensi *mangrove* yang ada di

Wonorejo supaya tidak rusak karena beberapa faktor. Sedangkan untuk menunjang berjalannya ekowisata *mangrove* Wonorejo memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengunjung. Sarana dan prasarana yang terdapat di ekowisata *mangrove* Wonorejo ini sebagian adalah bantuan dari pemerintah dan pihak swasta.

Pemerintah kota Surabaya sendiri telah memberikan peraturan-peraturan yang dapat melindungi ekowisata *mangrove* Wonorejo, yaitu Peraturan Walikota No. 65 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan *Mangrove* di Kota Surabaya dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2007 dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aktivitas pemerintah kota Surabaya tersebut dikenal dengan administrasi publik. Menurut Simon, Smithburg dan Thomson dalam Syafri (2012: 23) mengemukakan administrasi publik adalah sebagai berikut :

“Administrasi publik adalah aktivitas cabang eksekutif dari pemerintah tingkat negara, negara bagian dan daerah, aktivitas badan dan komisi yang ditetapkan oleh kongres dan ketentuan perundang-undangan negara bagian, aktivitas perusahaan negara dan dinas-dinas tertentu lainnya yang bersifat khusus yang dikecualikan dalam hubungan ini adalah dinas yudisial dan legislatif di dalam administrasi pemerintah”.

Kegiatan pemerintah kota Surabaya yang disebut dengan administrasi publik tersebut memiliki wewenang untuk membuat perencanaan dengan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan begitu pemerintah kota Surabaya memiliki wewenang untuk mengelola dan melindungi ekowisata *mangrove* Wonorejo, karena *mangrove* tersebut merupakan potensi alam yang perlu untuk mendapatkan perlindungan dan hal tersebut terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2007 yang menyatakan *mangrove* merupakan kawasan konservasi atau kawasan

lindung pantai timur Surabaya (Pamurbaya). Administrasi publik tersebut memiliki fungsi atau tugas utama adalah merencanakan dan merumuskan kebijakan politik kemudian melaksanakan dan menyelenggarakannya. Dengan kata lain, fungsi administrasi publik adalah merumuskan atau menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik (Wayong dalam Syafri, 2012:139).

b. Manfaat dan fungsi *mangrove*

Sebagai kawasan ekologis yang potensial hutan *mangrove* memiliki banyak fungsi. Secara lengkap fungsi ekosistem *mangrove*, antara lain adalah:

1. Sebagai Pelindung dan Penahan Pantai

Tumbuhan *mangrove* mempunyai sistem perakaran yang khas berupa akar tunjang dan akar lutut dapat menghambat arus air dan ombak. Perakaran tumbuhan menyebabkan kekutan arus dan ombak menjadi lemah dan garis pantai terhindar dari pengikisan. Bahkan dengan melemahnya arus akan menyebabkan masa lumpur yang terbawa air akan mengendap dan terjebak di antara akar-akar *mangrove* sehingga dapat menyebabkan garis pantai bergerak ke arah laut.

2. Sebagai Habitat Fauna *Mangrove*

Hutan *mangrove* berfungsi sebagai tempat mencari makan, berlindung, berpijah, dan pembesaran bagi jenis-jenis binatang air seperti ikan dan udang serta organisme air lainnya. Hutan *mangrove* juga menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis binatang darat, seperti burung air dan kalong. Bahkan banyak burung pengembara yang datang dari daratan atau dari daerah lainnya yang memanfaatkan hutan

mangrove. Termasuk satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Kondisi perairan yang tenang serta dilindungi dengan berbagai macam tumbuhan dan bahan makanan menyebabkan perairan hutan *mangrove* menjadi tempat yang sangat baik untuk berkembang biak.

3. Sebagai Sumber Bahan Baku Makanan, Minuman dan Batik.

Hutan *mangrove* sangat penting artinya terutama bagi penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam ini, misalnya sebagai sumber bahan bangunan, kayu bakar, arang, bahan baku kertas, tatal kayu olahan dan lem. Kayu bakau dan *mangrove* pada umumnya dapat dipakai untuk tiang-tiang rumah serta perabot rumah tangga di tepi pantai. Seiring dengan perkembangan teknologi maka kayu bakau banyak di gunakan sebagai bahan baku kertas dan papan buatan. Selain itu, kulit pohon *Rhizophora*, *Bruguiera*, dan *Ceriops* banyak mengandung tannin yang bisa digunakan sebagai bahan penyamak kulit. Kecenderungan pola hidup masyarakat kembali kepada alam, mengakibatkan tanaman *mangrove* dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, karena memang bebrapa jenis *mangrove* mempunyai khasiat pengobatan untuk beberapa jenis penyakit. Tentu tidak menutup kemungkinan bahwa pemanfaatan *mangrove* sebagai bahan obat-obatan dapt dikembangkan dengan proses teknologi modern. Tidak hanya obat-obatan, melainkan juga dalam menghasilkan produksi berupa batik *mangrove*, sirup *mangrove*, kerupuk *mangrove*, dodol *mangrove*, permen *mangrove* dan juga sabun *mangrove*.

4. Sebagai Kawasan Konservasi.

Pengelolaan kawasan ekosistem *mangrove* di Indonesia masih mengizinkan adanya konversi *mangrove*, eksploitasi kayu dan pemanfaatan jasa lainnya. Kecenderungan masyarakat dunia dan beberapa negara dunia telah melarang adanya konversi *mangrove* untuk kegiatan pembangunan dan lainnya. Hal ini dilandasi akan kesadaran akan manfaat yang terkandung dalam ekosistem hutan *mangrove*. Oleh karena itu pemerintah kota Surabaya memberikan batas kawasan konservasi pada kelurahan Wonorejo untuk melindungi potensi hutan *mangrove* dari berbagai ancaman yang dapat merusak hutan *mangrove*.

5. Sebagai Kawasan Wisata Edukasi.

Mangrove merupakan kekayaan alam yang perlu untuk selalu dilestarikan dan dijaga. Saat ini, banyak tanaman *mangrove* yang mengalami kerusakan. Penyebabnya adalah karena ulah manusia sendiri yang melihat *mangrove* dapat dijadikan lahan untuk mencari uang, misalnya dengan mengalih fungsikan lahan untuk dijadikan perumahan atau lahan industri. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan *mangrove* sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan dan keamanan dari ancaman yang akan terjadi.

Manfaat dan fungsi dari *mangrove* Wonorejo diatas sesuai dengan pendapat Naamin dalam Pariyono (2006:24), yaitu:

“Hutan *mangrove* merupakan ekosistem yang unik dengan fungsi bermacam-macam, yaitu: fungsi fisik, fungsi biologi dan fungsi ekonomi atau produksi. Fungsi fisik dari hutan *mangrove* atau

ekosistem *mangrove*, yaitu: menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya erosi pantai serta sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah. Fungsi biologi dari hutan atau ekosistem *mangrove*, yaitu sebagai daerah pasca larva dan yuwana jenis-jenis tertentu dari ikan, udang dan bangsa krustacea lainnya serta menjadi tempat bersarangnya burung-burung dan menjadi habitat alami berbagai jenis biota. Fungsi ekonomi atau produksi dari ekosistem hutan *mangrove* ada 67 macam produk yang dapat dihasilkan dan sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat”.

Pendapat dari Naamin dalam Pariyono merupakan pendapat yang memperkuat bahwa *mangrove* mempunyai banyak manfaat dan fungsi dari fisik, biologi dan ekonomi. Adanya hutan *mangrove* di Wonorejo tersebut juga memberikan banyak manfaat dan mempunyai fungsi. Di kelurahan ini, tanaman *mangrove* dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan bahkan juga batik dan itu semua dikelola oleh masyarakat sendiri.

c. Hasil produksi *mangrove* Wonorejo

Tanaman *mangrove* memiliki banyak manfaat yang berguna untuk lingkungan, hewan dan masyarakat di sekitarnya. Manfaat yang dimiliki tanaman *mangrove* terdapat pada hasil produksinya. Di kelurahan Wonorejo sendiri, tanaman *mangrove* memberikan hasil produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa hasil produksi dari tanaman *mangrove* di kelurahan Wonorejo:

1. Batik *mangrove*

Batik *mangrove* merupakan salah satu dari hasil produksi tanaman *mangrove* di Wonorejo yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan batik *mangrove* ini dilakukan

oleh ibu-ibu di kelurahan Wonorejo sendiri. Bahan pewarna dari batik *mangrove* ini berasal dari buah dan batang tanaman *mangrove*. Buah dan batang yang digunakan ini pun tidak diambil langsung dari pohonnya, melainkan yang sudah jatuh dengan sendiri. Batik *mangrove* Wonorejo tersebut merupakan yang ramah lingkungan ini juga memiliki keunikan soalnya motif antara batik satu dengan batik yang lain, sehingga tidak akan sama karena pembuatannya menggunakan teknik manual. Keunikan yang dimiliki batik *mangrove* ini juga terdapat dalam motif yang menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan *mangrove*, misalnya hewan yang terdapat di daerah *mangrove*, bentuk tanaman dari *mangrove* sendiri dan berbagai motif lainnya yang berhubungan dengan *mangrove*. Proses produksi batik *mangrove* tersebut membutuhkan waktu lama menyebabkan harga jual batik ini mahal dan biasanya pembelian batik *mangrove* ini dilakukan oleh orang-orang kalangan menengah keatas karena harga dari batik *mangrove* ini mulai Rp 600.000,00 keatas per satu meternya.

2. Sirup *Mangrove*

Hasil produksi dari tanaman *mangrove* selain batik *mangrove* adalah sirup *mangrove*. Pengelolaan sirup *mangrove* ini juga dilakukan oleh masyarakat Wonorejo sendiri. Pemasaran hasil produksi minuman ini tersedia di ekowisata *mangrove* Wonorejo di lokasi para PKL. Bahan dari pembuatan sirup ini tentunya dari buah *mangrove*. Untuk proses pembuatan sirup ini tidak membutuhkan waktu yang lama seperti pembuatan batik, sehingga sirup *mangrove* dapat diproduksi

seminggu sekali. Sirup *mangrove* selain segar juga mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai anti oksidan.

3. Kerupuk *Mangrove*

Salah satu hasil produksi tanaman *mangrove* di Wonorejo adalah kerupuk *mangrove*. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk ini adalah buah *mangrove* sendiri, sama seperti hasil produksi *mangrove* yang lain. Tanaman *mangrove* yang dapat diolah menjadi makanan adalah buahnya, namun dalam pembuatan kerupuk *mangrove* ini juga dicampur dengan bahan yang lain misal ikan bandeng atau mujaer, tepung tapioka, garam, bawang putih dan air mineral. Pengelolaan kerupuk *mangrove* ini juga dikelola oleh masyarakat Wonorejo sendiri sama seperti hasil produksi yang lainnya. Manfaat dari hasil produksi tanaman *mangrove* di Wonorejo ini merupakan salah satu prinsip dari ekowisata yaitu ramah lingkungan. Sebab buah-buah dan batang yang berjatuhan tidak dibuang, tetapi dapat diolah dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di kelurahan Wonorejo tersebut. Sehingga hal tersebut membantu pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo dalam melestarikan tanaman *mangrove* dan mengembangkan objek wisata yang berbasis ramah lingkungan dengan mengelola buah dari tanaman *mangrove* tersebut.

d. Peran Stakeholder

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah dari aspek perencanaannya. Perencanaan yang disusun tentunya melihat kondisi yang terjadi di objek yang akan direncanakan sesuai kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya dan yang tercantum oleh Peraturan Daerah (PERDA No. 3 Tahun 2007). Perencanaan yang dilakukan tidak menyimpang dari aspek lingkungan. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya menyusun perencanaan bertujuan untuk mengelola potensi alam yang dengan dengan terus mempertahankan aspek lingkungan meskipun terjadi pengembangan pada ekowisata *mangrove* Wonorejo.

2. Dinas Pertanian

Peran Dinas Pertanian kota Surabaya dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah sebagai pengelola kegiatan penanaman pohon *mangrove* yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait yang ingin melakukan penanaman *mangrove*. Kegiatan penanaman ini, Dinas Pertanian memiliki peran dalam menentukan jenis *mangrove* apa yang harus ditanam, karena untuk menanam *mangrove* sendiri harus sesuai dengan tempat yang ingin ditanam sehingga harus menyesuaikannya dengan jenis *mangrove*. Kegiatan penanaman di kelurahan Wonorejo tersebut juga dilakukan oleh berbagai pihak dari sekolah-sekolah, perguruan tinggi, pemerintah dan pihak swasta. Akan tetapi kegiatan

penanaman *mangrove* tersebut tetap dalam pengawasan Dinas Pertanian Kota Surabaya karena untuk melakukan penanaman *mangrove* harus sesuai dengan tempat yang akan ditanam. Dinas Pertanian memilih jenis tanaman *mangrove* yang seperti apa yang akan ditanam pada tempat yang akan ditentukan dan juga berapa *mangrove* yang akan ditanam. Sehingga peran dari Dinas Pertanian sendiri sangat berpengaruh dalam kegiatan penanaman *mangrove* yang akan dilakukan oleh pihak mana pun. Bantuan sarana prasarana juga diberikan oleh Dinas Pertanian, antara lain: *Jogging trek* dan dermaga yang ada di darat untuk sandaran kapal.

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembang ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah dalam bidang pemasaran. Pemasaran dilakukan secara rutin dalam setiap *event-event* yang sedang dilaksanakan dengan cara memberikan brosur wisata Kota Surabaya pada setiap event lokal maupun internasional. Pemasaran juga dilakukan di sebuah tempat yaitu pusat informasi wisata Surabaya yang biasa disebut TIC (*Tourism Information Center*) yang berlokasi di Balai Pemuda. Meskipun upaya untuk memasarkan terus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masih terdapat kendala yaitu masyarakat Surabaya lebih tertarik untuk mengunjungi wisata lain yang ada di luar kota di banding ekowisata *mangrove*. Hal tersebut akan menghambat pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo, karena pada kenyataannya pengunjung masih terbilang

sedikit. Banyak masyarakat yang belum mengenal wisata alam ini, meskipun upaya terus dilakukan.

4. Masyarakat

Peran masyarakat Wonorejo sendiri tidak kalah pentingnya dengan pemerintah Kota Surabaya. Bahkan pengelolaan ekowisata *mangrove* Wonorejo terdiri dari masyarakat kelurahan Wonorejo sendiri. Keikutsertaan masyarakat Wonorejo dalam mengelola ekowisata tersebut sangat terlihat dari semua pegawai yang ada dalam ekowisata *mangrove* Wonorejo. Namun ada juga masyarakat yang tidak terjun langsung dalam ekowisata *mangrove* Wonorejo, melainkan melakukan pengolahan hasil produksi *mangrove* di rumah masing-masing, seperti batik *mangrove*, sirup *mangrove*, dodol *mangrove*, kerupuk *mangrove*, permen dan sabun *mangrove*. Tidak hanya hasil produksi *mangrove* saja yang dapat dimanfaatkan melainkan juga sampah-sampah yang ada di objek wisata tersebut diambil untuk di daur ulang yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dari kelurahan Wonorejo sendiri. Sehingga peran masyarakat sendiri memang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo. Selain itu dampak baiknya juga akan mampu menambah penghasilan masyarakat sekitar dengan melakukan pengolahan *mangrove* dan sampah yang ada di ekowisata yang berbasis ramah lingkungan.

5. Pihak swasta

Pihak swasta yang ikut serta dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo juga tidak kalah penting seperti pemerintah dan masyarakat, yaitu dari

pihak Pertamina dan Sampoerna. Peran swasta tersebut yaitu memberikan bantuan sarana dan prasarana ekowisata *mangrove* Wonorejo, yaitu berupa gazebo, penanaman pohon dan jaring-jaring untuk menghambat sampah dari laut masuk di hutan *mangrove*. Untuk mendapatkan bantuan dari pihak swasta tersebut, pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo mengajukan bantuan dengan membuat proposal dengan menjelaskan apa yang dibutuhkan. Bantuan yang diberikan oleh pihak swasta tersebut beserta perawatannya.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo

Pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini dapat dipengaruhi dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang sangat mempengaruhi pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo, karena dengan melihat faktor tersebut dapat membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi ekowisata tersebut. Selain itu dapat digunakan dalam menyusun perencanaan skenario dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo. Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat, yaitu:

a. Faktor pendukung.

1). Masyarakat sebagai pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo.

Faktor pendukung untuk mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo adalah masyarakat kelurahan Wonorejo sebagai pengurus atau pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo. Masyarakat di kelurahan Wonorejo merupakan

pengurus dari ekowisata sendiri dari pedagang PKL, penjaga loket tiket, penjaga perahu, tukang parkir dan pegawai kebersihan.

2). Hasil produksi dari tanaman *mangrove*.

Tanaman *mangrove* di kelurahan ini juga dapat di olah sebagai hasil produksi yang dapat menghasilkan nilai ekonomis dan tentunya dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar, yaitu yang berupa sirup *mangrove*, batik *mangrove* dan kerupuk *mangrove*. Pengelolaan tanaman *mangrove* tersebut merupakan salah satu langkah ramah lingkungan karena bahannya diambil dari tanaman *mangrove* yang buah dan batangnya sudah jatuh.

3). Sebagai kawasan konservasi.

Ekowisata *mangrove* Wonorejo yang berlokasi di kecamatan Rungkut merupakan salah satu kawasan konservasi atau kawasan lindung di kota Surabaya. Oleh karena itu, kawasan *mangrove* Wonorejo perlu untuk dilestarikan guna menjaga potensi alam yang memberikan banyak manfaat. Adanya kawasan konservasi ini merupakan suatu dukungan yang sangat baik untuk melindungi tanaman *mangrove* di kelurahan Wonorejo.

4). Adanya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta.

Faktor pendukung untuk mengembangkan ekowisata hutan *mangrove* Wonorejo adalah dari pemerintah kota Surabaya dan pihak swasta. Pemerintah kota Surabaya untuk mendukung dan melindungi kawasan *mangrove* ini menyusun Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga Peraturan Walikota (PERWALI) No. 65 Tahun 2011 Tentang

Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan *Mangrove* di Wilayah Kota Surabaya. Peran pemerintah tidak hanya dalam penyusunan peraturan dan kebijakan, melainkan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan kegiatannya penanamannya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya dengan mempromosikan obyek wisata tersebut. Sedangkan pihak swasta memberikan bantuan sarana dan prasarana beserta perawatannya yang dibutuhkan oleh ekowisata *mangrove* Wonorejo.

a. Faktor penghambat

1). Kurangnya pengetahuan masyarakat.

Pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan potensi alam yang dimiliki oleh kota Surabaya, karena dilihat kota Surabaya adalah kota modern yang masih mempunyai potensi alam yang luar biasa seperti hutan *mangrove* Wonorejo. Potensi hutan *mangrove* tersebut perlu mendapatkan perhatian yang khusus termasuk masyarakat sekitar. Namun, tidak semua masyarakat kelurahan Wonorejo memahami pentingnya menjaga dan melestarikan tanaman *mangrove*. Jika pengetahuan masyarakat sekitar masih kurang dalam menjaga tanaman *mangrove*, maka tanpa disadari masyarakat akan merusak tanaman *mangrove*.

2). Fasilitas yang kurang memadai dan kurang terawat.

Faktor penghambat untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah fasilitas yang kurang memadai yaitu transportasi yang belum tersedia menuju

ekowisata *mangrove* Wonorejo, kondisi jalan yang masih kurang baik dan masih banyaknya sarana prasarana yang kurang terawat.

3). Kurangnya bahan baku hasil produksi.

Pengelolaan hasil produksi selama ini menggunakan bahan baku tanaman *mangrove* yang diambil dari buah dan batang yang telah jatuh. Sehingga hasil produksi masih belum maksimal.

4). Kebersihan yang masih kurang terjaga.

Ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan wisata berwawasan lingkungan dimana aspek lingkungan perlu untuk dijaga. Namun, obyek wisata ini masih terlihat kurang bersih dari adanya sampah yang berserakan di tempat wisata, meskipun telah banyak tempat sampah telah disediakan oleh pengelola.

5). Belum adanya alat pembatas sampah di laut.

Sampah di obyek wisata ini tidak hanya terlihat didarat, melainkan juga terlihat di hutan *mangrove* Wonorejo yang berasal dari laut. Jumlah sampah yang ada di hutan *mangrove* Wonorejo ini sangat banyak, karena terus berdatangan dari tetangga kota Surabaya. Sehingga dibutuhkan alat yang canggih untuk menahan sampah tersebut agar tidak masuk ke hutan *mangrove*. Saat ini, pengelola hanya memberikan jaring-jaring dari pertamina, akan tetapi jaring-jaring tersebut tidak bertahan lama karena kalah dengan sampah dari laut.

Berikut adalah analisis SWOT dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo:

Tabel 6
Analisis SWOT Ekowisata *Mangrove* Wonorejo

No	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Peluang (<i>opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
1	Masyarakat sebagai pengelola ekowisata dan hasil produksi	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang melestarikan <i>mangrove</i> dan lingkungan.	Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya <i>mangrove</i> .	Tanaman <i>mangrove</i> akan rusak jika tidak memperhitungkan aspek lingkungan.
2	Tanaman <i>mangrove</i> dapat dimanfaatkan sebagai makanan, minuman dan batik.	Bahan baku minim karena menunggu buah <i>mangrove</i> jatuh.	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah dengan terciptanya lapangan pekerjaan.	Jumlah hasil produksi terbatas.
3	Sebagai kawasan konservasi	Kebersihan yang masih kurang terjaga.	Dilindungi oleh pemerintah sebagai kawasan lindung.	Hutan <i>mangrove</i> akan penuh dengan sampah.
4	Mendapat dukungan dari pemerintah dan pihak swasta	Fasilitas yang kurang memadai dan terawat	Membangun alat transportasi untuk memudahkan akses pengunjung, sehingga jumlah pengunjung meningkat.	Sarana prasarana yang diberikan akan rusak jika tidak di rawat dengan baik.
5	Akses jalan masuk yang dikelilingi keindahan alam.	Fasilitas jalan yang rusak dan berlubang.	Dapat diperbaiki dengan melibatkan dinas terkait untuk kenyamanan pengunjung.	Jika jalan tidak diperbaiki dan dibiarkan rusak, maka pengunjung akan merasa kurang nyaman, sehingga dapat terjadi penurunan jumlah pengunjung.

Sumber: Data diolah peneliti

Analisis SWOT pada Tabel 6 diatas merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ditujukan untuk ekowisata *mangrove* Wonorejo. Sehingga dapat terlihat faktor apa yang dapat mempengaruhi pengembangan wisata tersebut. Kekuatan yang dimiliki ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah masyarakat sebagai pengelola ekowisata dan hasil produksi, sebagai kawasan konservasi yang dilindungi oleh pemerintha kota Surabaya, hasil prouksi yang diolah dari tanaman *mangrove*, dan adanya dukungan dari pemerintah yang terlihat dari Peraturan daerah (PERDA) No.3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Walikota (PERWALI) No.65 Tahun 2011. Faktor kelemahan yang dimiliki adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya melestarikan lingkungan dan tanaman *mangrove*, minimnya bahan baku hasil produksi karena menggunakan buah dan batang yang jatuh, tidak adanya akses transportasi menuju ekowisata, tidak adanya alat pembatas sampah dari laut, kondisi jalan yang rusak dan sarana prasarana yang masih membutuhkan perawatan.

Peluang yang dimiliki ekowisata adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengolah tanaman *mangrove* menjadi hasil produksi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga tanaman *mangrove*, jika fasilitas diperbaiki maka dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan lingkungan menjadi lebih bersih. Terdapat pula ancaman, yaitu hasil produksi akan berkurang jika tidak ada pembudidayaan

untuk tanaman *mangrove* yang digunakan hasil produksi dan jumlah pengunjung akan berkurang jika fasilitas tidak dipenuhi dan diperbaiki.

3. Perencanaan skenario untuk pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo.

Pengelolaan ekowisata *mangrove* Wonorejo belum memiliki sebuah perencanaan yang matang, padahal perencanaan merupakan hal terpenting untuk mengembangkan suatu potensi. Hal ini diperkuat oleh Conyers dan Hills dalam Tarigan (2012:5) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan yang dilakukan akan lebih dapat terkontrol dan terperinci sesuatu yang menjadi sebuah dukungan dan hambatan. Oleh karena itu perencanaan sangat penting untuk ekowisata *mangrove* Wonorejo supaya berkembang dengan tetap menjaga prinsipnya yaitu berbasis ramah lingkungan. Untuk membuat sebuah perencanaan dapat menggunakan perencanaan skenario atau *scenario planning*. Menurut Trisnantoro (2008) menjelaskan perencanaan skenario sebagai berikut:

“Perencanaan skenario adalah alat bantu untuk melihat ke depan yang penuh ketidak-pastian. Inti perencanaan skenario adalah pengembangan gambaran mengenai kemungkinan-kemungkinan kondisi di masa mendatang dan mengidentifikasi perubahan-perubahan, serta implikasinya yang muncul sebagai akibat dari kondisi tersebut. Perencanaan skenario dilakukan untuk menilai skenario-skenario yang memungkinkan untuk suatu kegiatan: kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk dan berbagai kemungkinan diantaranya”

Penyusunan perencanaan skenario dapat menggunakan sebuah metode yaitu TAIDA, yang artinya *Tracking* (Melacak), *Analysing* (Analisis), *Imaging* (Membayangkan), *Deciding* (Memutuskan), dan *Acting* (Bertindak). Metode TAIDA dapat memberikan kemudahan untuk membuat perencanaan skenario karena terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikut adalah perencanaan skenario untuk pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo Surabaya dengan menggunakan metode TAIDA:

a. *Tracking* (Melacak)

Tahapan *tracking* atau melacak ini dalam metode TAIDA ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi yang ada pada ekowisata *mangrove* Wonorejo pada awal berdiri hingga saat ini. Penjelasan mengenai kondisi yang ada di ekowisata *mangrove* Wonorejo akan memudahkan untuk memahami bagaimana perjalanan perkembangan dari objek wisata tersebut. Sehingga untuk mendapatkan informasi tentang perkembangannya harus langsung dari narasumber yang memahami kondisi ekowisata tersebut. Hal ini bertujuan supaya informasi yang didapatkan benar-benar terpercaya dan segar untuk diolah menjadi suatu perencanaan skenario yang dapat bermanfaat bagi ekowisata *mangrove* Wonorejo kedepannya.

Ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan sebuah objek wisata yang berprinsip ramah lingkungan. Awal mula terbentuknya ekowisata *mangrove* ini dikarenakan adanya pembalakan pohon *mangrove* secara besar-besaran yang di alih fungsikan menjadi tambak dan pohonnya di pakai untuk kayu bakar. Dari situlah awal berdirinya ekowisata, yang terletak di sebelah timur kota Surabaya, tepatnya di

kelurahan Wonorejo, kecamatan Rungkut. Dengan misi pada awalnya untuk mengembalikan hutan *mangrove* akibat penebangan liar. Dari situlah gerakan Bapak Djoko Suwondo dan kawan-kawan membuat rehabilitasi hutan dan lahan dengan cara melakukan penanaman pohon *mangrove* secara rutinitas yang dilakukan oleh warga Wonorejo dengan dana swadaya. Kegiatan tersebut didukung oleh pemerintah daerah antara lain kelurahan dan kecamatan. Akhirnya dari situ dukungan dari beberapa pihak antara lain Walikota, Kepolisian, Dinas Pertanian. Dari situlah kelurahan Wonorejo mengadakan pemilihan ketua umum lembaga ekowisata *mangrove* secara voting, dan pemenang pilihan tersebut ialah bapak Djoko suwondo, dan di sahkan oleh keputusan lurah Wonorejo No : 556/ 157/436.11.15.5/ 2009 tgl 1 juli 2009 dan di kukuhkan oleh walikota Surabaya pada tanggal 09 agustus 2009.

Ekowisata *mangrove* Wonorejo merupakan suatu kawasan konservasi atau kawasan lindung yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 3 Tahun 2007. Peraturan daerah tersebut merupakan suatu kebijakan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berisi tentang penggunaan lahan yaitu ruang terbuka hijau dan konservasi hampir mendominasi wilayah perencanaan yang sebagian besar kawasannya merupakan kawasan konservasi dan sebelah timur yang berada di pesisir pantai merupakan kawasan hutan *mangrove*. Keberadaan ruang terbuka hijau harus dipertahankan serta ditingkatkan fungsi lindungnya untuk peningkatan kualitas lingkungan kota. Terlihat bahwa kebijakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut melindungi kawasan hutan *mangrove*, dan hal tersebut berlaku pula pada kelurahan Wonorejo kecamatan Rungkut yang masih pada

lingkup kota Surabaya. Untuk mencapai keberhasilan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut diperlukan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan keterpaduan perencanaan dari bawah dan dari atas (*top down and bottom up planning*). Pendekatan ini menggunakan dua sisi yaitu penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas dan penyesuaian dengan kemampuan pembiayaan pemerintah sebagai pengayom masyarakat.
- b. Pendekatan *intersektoral holistic* atau disebut perencanaan komprehensif yaitu pendekatan yang dimulai dengan diagnosis secara umum di wilayah perencanaan melalui pengamatan potensi dan masalah masing-masing kawasan untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan lingkup wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan pemerintah dan pengadaan program-program pembangunan atau pengembangan.
- c. Pendekatan perencanaan yang berkelanjutan, dengan prinsip agar didalam perencanaan dan pengembangan atau program menjadi lebih terpadu dan berkesinambungan.
- d. Pendekatan masyarakat, yaitu pendekatan terhadap masyarakat tersebut dimulai dengan menggunakan bahasa dialog maupun dengan penyebaran kuesioner antara perencana dengan pelaku pembangunan guna menyelaraskan persepsi dalam pemanfaatan tata ruang.

Pendekatan perencanaan tersebut terlihat bahwa masyarakat menjadi salah satu pihak yang penting dalam sebuah perencanaan, sebab masyarakat merupakan suatu sumber yang akurat untuk menyusun perencanaan. Sedangkan peran pemerintah dalam mengembangkan ekowisata tersebut terlihat dari berbagai dinas terkait, yaitu Dinas Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Dinas Pertanian memiliki suatu kegiatan rutin dalam program penanaman *mangrove* dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sarana untuk membantu mempromosikan objek wisata tersebut beserta hasil produksi dari tanaman *mangrove* Wonorejo. Tidak hanya dari pihak pemerintah, melainkan juga

dari pihak swasta yang memberikan bantuan fasilitas untuk ekowisata *mangrove* Wonorejo.

Proses pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo masih mengalami kekurangan dari faktor partisipasi masyarakat yang kurang dalam menjaga lingkungan dan fasilitas yang belum memadai. Faktor partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat Wonorejo dalam menjaga lingkungan *mangrove*. Sebagian dari masyarakat Wonorejo masih belum memahami tanaman *mangrove* dan fungsi juga manfaat dari tanaman tersebut. Jika pengetahuan masyarakat masih minim tentang pentingnya menjaga tanaman *mangrove*, maka tanaman tersebut sulit untuk bertahan. Sehingga dibutuhkan penyuluhan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat pentingnya menjaga tanaman *mangrove* beserta lingkungannya. Sedangkan untuk faktor fasilitas, tidak adanya transportasi umum menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo, kondisi jalan yang masih belum baik dan sarana prasarana yang masih membutuhkan perawatan. Fasilitas yang kurang memadai akan membuat pengunjung kesulitan menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo, sebab lokasi ekowisata *mangrove* Wonorejo berada di pinggir kota Surabaya yang letaknya lumayan sulit untuk diakses oleh transportasi umum.

b. *Analysing* (Analisis)

Tahapan *analyling* atau analisis ini bertujuan membicarakan mengenai konsekuensi yang akan terjadi pada masa depan dari perubahan pada saat sekarang dan mencari pengaruh yang ada. Analisis dapat mendapatkan sebuah pemahaman

yang lebih mendalam dari perubahan-perubahan yang ada. Perencanaan skenario harus memahami bagaimana konsekuensi yang harus dihadapi saat skenario yang dibuat dilaksanakan, sehingga semua yang ada dan kemungkinan yang akan terjadi sudah diperhitungkan dengan memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh ekowisata *mangrove* Wonorejo. Hal ini sesuai dengan pendapat Ringland (202:16) yang mengemukakan:

“Konsep skenario bertujuan membuat gambaran kehidupan nyata masa depan sehingga dapat menjawab dua hal mendasar. Pertama, untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian pada masa depan yang sebelumnya tidak di perkirakan, dengan menggali berbagai hambatan perubahan lingkungan eksternal atau hubungan antar berbagai faktor terkait, kedua untuk membuat sebuah model yang memungkinkan untuk mengetahui bukti-bukti yang terlihat jelas maupun tidak sejak awal”.

Konsep skenario diatas terlihat bahwa skenario memberikan gambaran untuk masa depan dengan membayangkan apa yang akan terjadi. Untuk membayangkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang perlu dilakukan analisis tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan skenario untuk dilakukan. Kendala yang ada di ekowisata *mangrove* Wonorejo telah dilakukan analisis pada tahapan sebelumnya yang akan dilihat aspek mana yang mempengaruhi. Pada perencanaan skenario sendiri, untuk menentukan faktor pendorongnya dilihat dari lima aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi.

Potensi yang dimiliki ekowisata *mangrove* Wonorejo pantas untuk selalu dijaga dan dilestarikan karena manfaatnya yang sangat banyak. Selain dari aspek lingkungan, tanaman *mangrove* akan membantu meningkatkan pendapatan dari

masyarakat sekitar objek wisata tersebut dengan mengelola tanaman *mangrove* sebagai sebuah hasil produksi. Tidak dibayangkan jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, namun tetap ramah lingkungan. Banyak sekali dampak positif yang bisa diambil dari tanaman *mangrove*. Sehingga objek wisata ini harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk manfaat yang luar biasa.

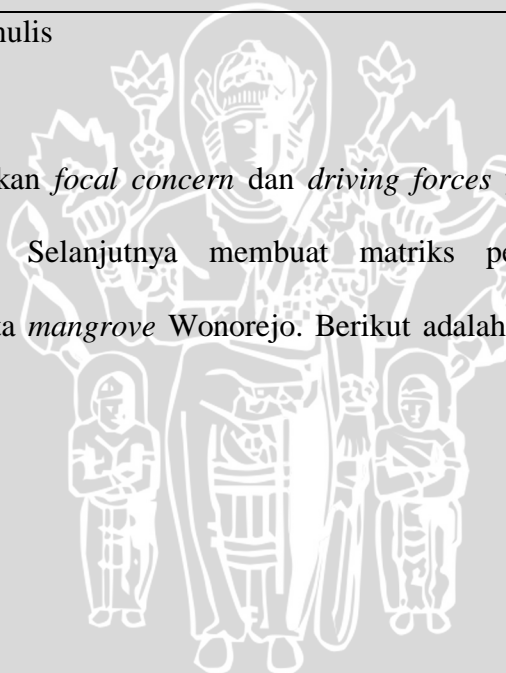
Ekowisata *mangrove* Wonorejo memiliki banyak manfaat yang harus dikembangkan dengan suatu perencanaan yang matang dengan menggunakan perencanaan skenario. Pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo dengan menggunakan perencanaan skenario ini, penulis menetapkan *focal concern* (fokus utama) yaitu perencanaan skenario pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo 2015. *Focal concern* tersebut dilakukan *driving forces* (kekuatan pendorong) yaitu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan pendorong. Untuk menentukan *driving forces* sendiri terdiri dari lima kelompok yaitu politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Sehingga dalam pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo ini, penulis menetapkan *driving forces* dalam kelompok sosial dan teknologi. Berikut adalah *driving forces*:

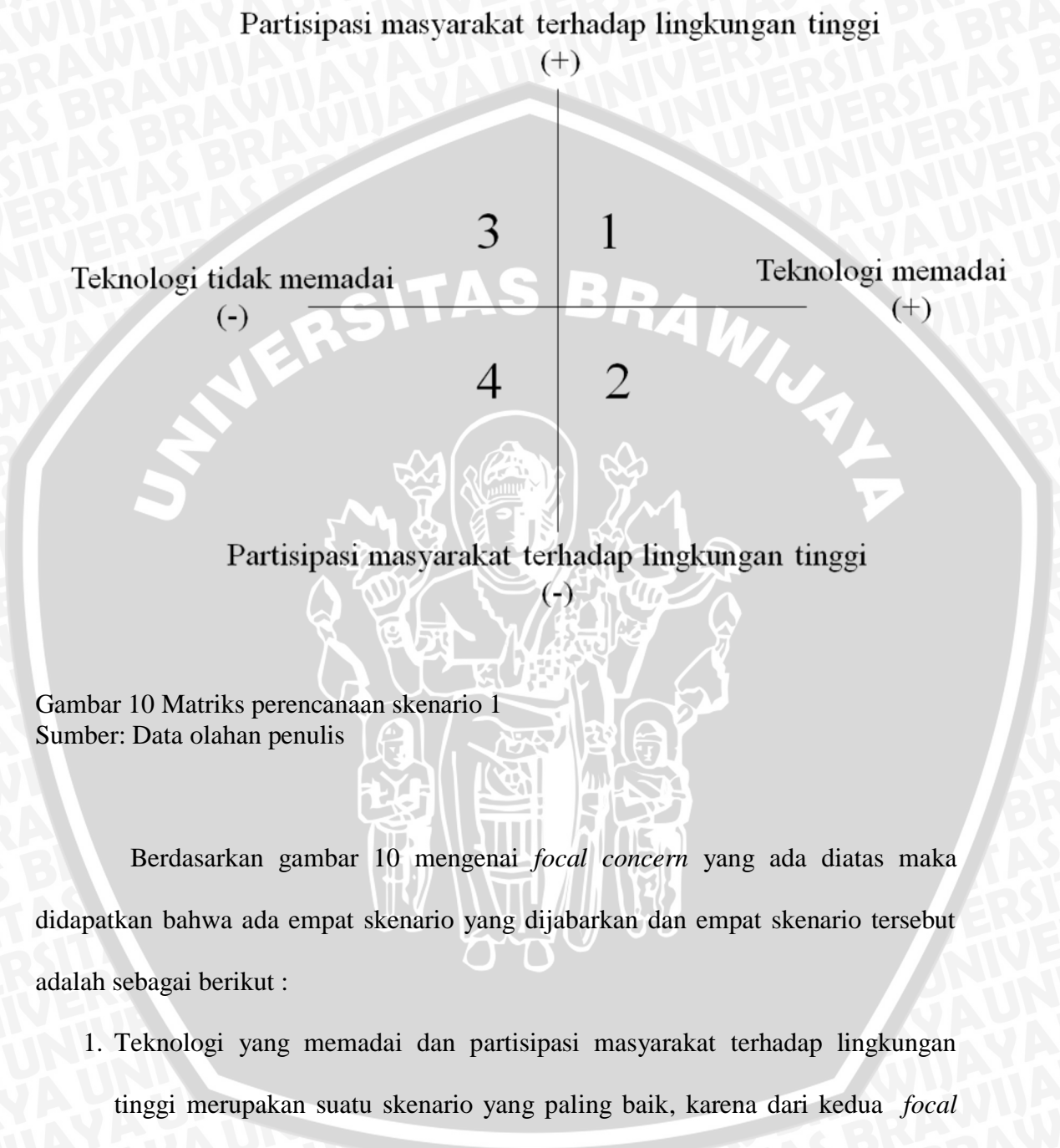
Tabel 7
***Driving Forces* Perencanaan Skenario Ekowisata *Mangrove* Wonorejo**

Kelompok	<i>Driving Forces</i> (DF)
Sosial	Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ekowisata masih kurang, karena pengetahuan masyarakat masih kurang dalam melestarikan tanaman <i>mangrove</i> .
Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya transportasi yang memadai menuju ekowisata <i>mangrove</i> Wonorejo. - Kondisi jalan yang masih rusak. - Tidak adanya alat pembatas untuk sampah dari laut agar tidak masuk ke hutan <i>mangrove</i>.

Sumber: Data olahan penulis

Setelah menetapkan *focal concern* dan *driving forces* yang telah dijelaskan pada tabel 7 diatas. Selanjutnya membuat matriks perencanaan skenario pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo. Berikut adalah matriks perencanaan skenarionya:





Gambar 10 Matriks perencanaan skenario 1
 Sumber: Data olahan penulis

Berdasarkan gambar 10 mengenai *focal concern* yang ada diatas maka didapatkan bahwa ada empat skenario yang dijabarkan dan empat skenario tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teknologi yang memadai dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan tinggi merupakan suatu skenario yang paling baik, karena dari kedua *focal concern* tersebut memiliki kekuatan yang akan mampu mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo. Adanya teknologi yang memadai akan tersedia transportasi menuju ekowisata, sehingga dapat meningkatkan jumlah

pengunjung, adanya alat pembatas sampah yang berasal dari laut supaya tanaman *mangrove* tidak rusak karena tumpukan sampah dan kondisi jalan yang memadai untuk dilewati yang dapat memberikan kenyamanan untuk mengunjungi.

2. Teknologi yang memadai dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan yang rendah, maka yang harus diperhatikan adalah peran masyarakat yang rendah, namun juga teknologi yang memadai harus tetap dipertahankan. Jika peran masyarakat rendah, pengembangan ekowisata tersebut tidak akan berjalan dengan baik, karena peran masyarakat merupakan suatu penggerak dari pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo.
3. Teknologi tidak memadai dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan yang tinggi merupakan suatu konsistensi yang perlu diperbaiki, karena meskipun partisipasi masyarakat tinggi namun teknologi tidak memadai maka pengembangan ekowisata akan mengalami suatu kendala. Meskipun masyarakat berperan penuh, akan tetapi teknologi tidak memadai menyebabkan pengembangan tidak berjalan dengan baik maka perlu dilakukan perbaikan dalam penyediaan transportasi, kondisi jalan dan alat pembatas sampah.
4. Teknologi tidak memadai dan partisipasi masyarakat terhadap lingkungan yang rendah adalah suatu skenario yang buruk yang sangat perlu perhatian. Adanya kelemahan dalam masyarakat dan teknologi untuk mengembangkan ekowisata akan menjadi suatu hambatan terbesar, karena keduanya sama-sama

memiliki kelemahan. Posisi seperti ini akan memberikan dampak yang tidak baik atau dibidang berbahaya karena peran masyarakat lemah dan peran pemerintah lemah.

Pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo ini bukan berarti tanpa adanya resiko, oleh karena itu dengan adanya perencanaan skenario dapat memberikan suatu gambaran yang terjadi dengan melihat apa yang mempengaruhi dari perencanaan skenario pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo pada tahun 2015 seperti yang telah dijelaskan diatas. Berbagai skenario yang telah ada tersebut, pengelola ekowisata mampu meminimalisir kendala-kendala yang akan terjadi. Namun, tidak hanya pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo yang berperan penting, melainkan kerjasama antar berbagai pihak terkait juga dibutuhkan untuk menjalankan skenario-skenario yang telah dibuat.

c. *Imaging* (Membayangkan)

Pada tahapan *imaging* ini dapat membayangkan yang terjadi jika mengambil cara alternatif untuk suatu masa depan. Membuat suatu gambaran atau pemikiran mengenai pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo untuk mengambil alternatif pada masa depan yang akan dihadapi. Melihat kondisi ekowisata *mangrove* Wonorejo yang mungkin mengalami kendala dalam perencanaan, anggaran dan peran masyarakat kota Surabaya sendiri dapat dibayangkan jika mengambil suatu alternatif dengan melakukan suatu pertemuan terus menerus dengan pemerintah dan pihak

swasta untuk melakukan perencanaan yang matang dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi. Sehingga semua dapat terlibat dan dapat mencurahkan semua kendala yang dihadapi, lalu menyusun sebuah perencanaan yang harus dilakukan oleh seorang perencana yang memang memahami kondisi dari ekowisata *mangrove* Wonorejo tersebut.

Penyusunan perencanaan skenario dapat membayangkan apa saja yang ada mengenai suatu permasalahan yang di hadapi, karena dengan ini melatih untuk selalu tanggap yang sudah diperhitungkan secara matang dalam perencanaan yang dilakukan. Selain itu juga dapat menskenariokan sebuah visi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

Pengetahuan dan wawasan merupakan modal untuk melestarikan dan mengelola tanaman *mangrove* Wonorejo. Tanpa adanya pengetahuan mengenai pentingnya menjaga lingkungan, maka lingkungan dan tanaman *mangrove* akan rusak dengan tidak sengaja, karena masyarakat belum memahami apa itu tanaman *mangrove* dan manfaat juga fungsinya. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi mengenai tanaman *mangrove*, supaya masyarakat memahami pentingnya tanaman *mangrove* bagi lingkungan.

b. Menerapkan hukum yang sesuai dengan peraturan dengan tegas.

Kawasan *mangrove* dilindungi oleh pemerintah kota Surabaya terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2007 tentang kawasan konservasi. Adanya peraturan tersebut perlu dilengkapi dengan hukum yang tegas untuk

menghindari ancaman yang ada. Wujud dari ancaman tersebut bisa terjadi pada faktor apapun, misalnya penebangan hutan secara liar.

- c. Meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana ekowisata *mangrove* Wonorejo.

Sarana dan prasarana ini sangat penting untuk sebuah objek wisata, guna memberikan suatu kepuasan pada pengunjung agar betah saat berwisata, yaitu transportasi, kondisi jalan dan fasilitas yang memadai.

- d. Meningkatkan fasilitas untuk hasil produksi.

Fasilitas untuk hasil produksi ini mulai dari bahan baku yang tersedia, pelatih keterampilan untuk membantu membuat hasil produksi dan pemasaran secara luas dari hasil produksi tersebut.

Diatas merupakan suatu visi untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo yang dibayangkan dengan melihat dan memahami hal-hal yang mempengaruhi. Adanya visi tersebut akan membuat pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo terarah dan perencanaan yang dibuat akan terlaksana dengan baik dan sesuai.

d. *Deciding* (Memutuskan)

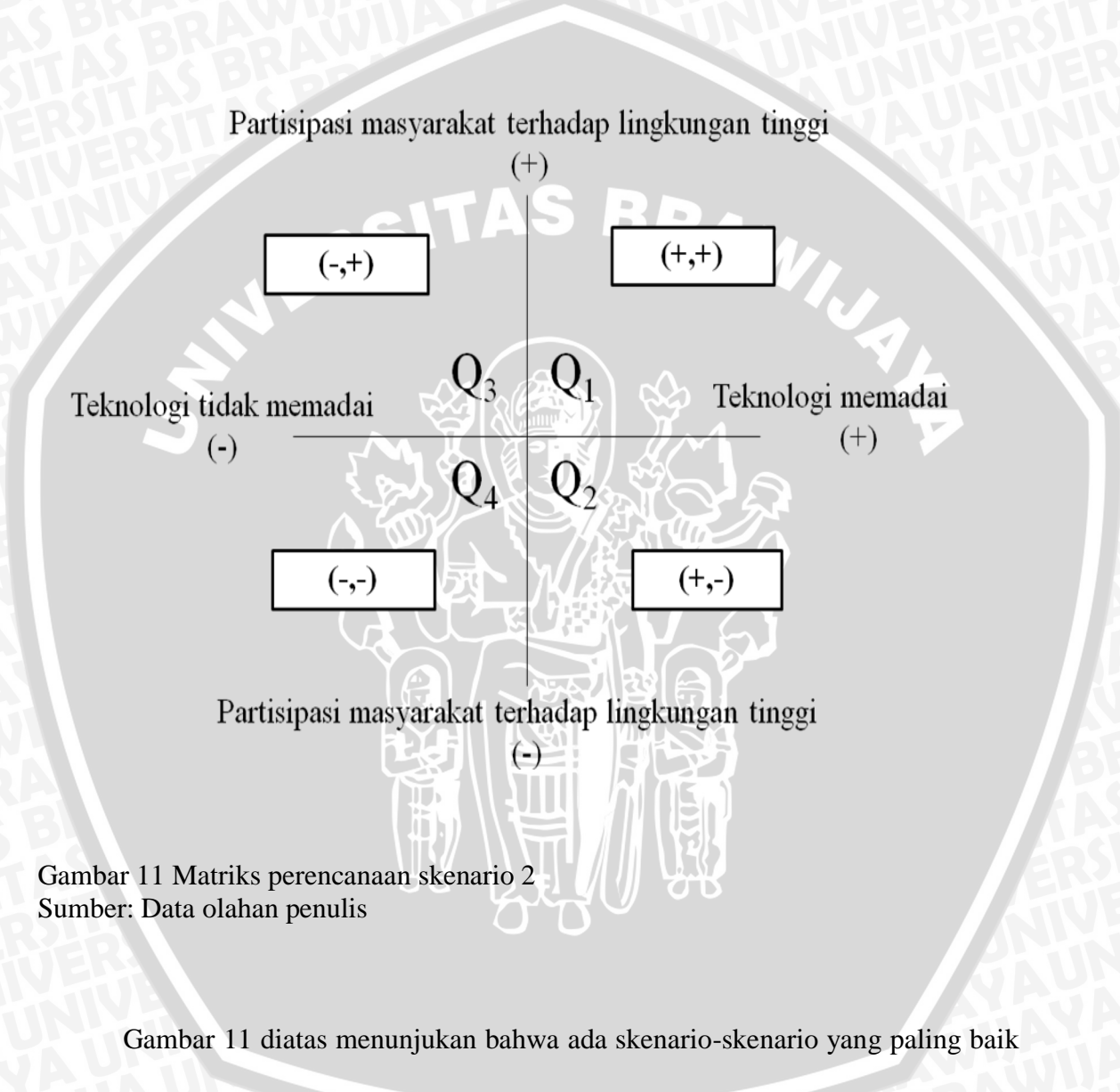
Langkah selanjutnya dalam perencanaan skenario menggunakan metode TAIDA adalah *deciding* (memutuskan). Fungsi dari langkah keempat ini adalah untuk memutuskan atau memilih berbagai macam alternatif yang telah dibuat

sebelumnya. Proses memutuskan ini dibutuhkan suatu pemikiran yang matang. Hal apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi, serta mengambil keuntungan dari peluang dan menghindari ancaman di masa depan. Tahapan ini merupakan segala tindakan yang berhubungan dengan perencanaan skenario akan diputuskan untuk selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu bertindak. Jadi tindakan apa saja yang diperlukan akan diputuskan bersama-sama, dan juga untuk melihat peluang dan menghindari ancaman (Lindgren dan Bandhold, 2003:39). Terdapat tujuh kriteria tujuh kriteria menurut Lindgreen dan Bandhold (2003:31) untuk skenario yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan. Masing-masing skenario disusun secara keseluruhan dan harus memberikan wawasan yang berguna sebagai pertimbangan.
2. Masuk akal. Skenario harus berada dalam batas-batas peristiwa yang sedang terjadi tanpa harus melebihi-lebihkan.
3. Alternatif. Dalam membuat skenario harus mempunyai lebih dari satu skenario, untuk menghadapi suatu ketidakpastian yang mungkin tidak sesuai dengan skenario yang digunakan. Sehingga dapat menggunakan skenario yang lainnya.
4. Konsistensi. Setiap skenario harus konsisten dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.
5. Diferensiasi. Dalam membuat skenario harus memiliki kualitas yang baik, karena skenario membutuhkan suatu pemikiran yang harus kreatif untuk menciptakan skenario yang berbeda dan bervariasi.
6. Mudah diingat. Skenario yang dibuat harus mudah diingat untuk membedakan antara skenario satu dengan skenario yang lainnya
7. Menantang. Kriteria terakhir adalah skenario benar-benar menantang, karena skenario mampu memberikan suatu gambaran masa depan yang tidak pasti.

Perencanaan skenario pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo perlu dilakukan, karena melihat kondisi dari objek wisata tersebut yang memerlukan suatu

tindakan yang terencana dengan baik. Adanya kondisi yang terjadi tersebut, maka dibutuhkan empat skenario yang dari dua *driving forces*. Berikut skenario tersebut:



Gambar 11 Matriks perencanaan skenario 2
 Sumber: Data olahan penulis

Gambar 11 diatas menunjukkan bahwa ada skenario-skenario yang paling baik hingga skenario yang paling buruk yang akan memberikan pengaruh terhadap lima aspek tersebut. Berikut adalah penjelasannya:

Tabel 8
Penjelasan Q₁ (+,+) (Paling Baik)

Aspek	Penjelasan
Ekonomi	- Penyediaan transportasi, alat pembatas sampah, perbaikan kondisi jalan yang rusak, perbaikan fasilitas dan menyediakan tempat untuk pembudidayaan <i>mangrove</i> yang digunakan untuk hasil produksi akan menambah jumlah pengunjung dan menambah pendapatan masyarakat dan daerah.
Politik	- Tercapainya tujuan pemerintah dalam mengembangkan ekowisata <i>mangrove</i> Wonorejo sesuai dengan peraturan daerah dan didukung partisipasi masyarakat terhadap lingkungan yang tinggi sekitar Surabaya.
Sosial	- Terciptanya lapangan pekerjaan baru dengan membuat hasil produksi yang dikelola dari sampah dan tanaman <i>mangrove</i> dan didorong oleh keinginan masyarakat yang sangat tinggi dan fasilitas dari pemerintah. Sehingga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Lingkungan	- Dengan menjaga dan melestarikan <i>mangrove</i> akan tercipta lingkungan yang bersih karena yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah tentang tata guna lahan sesuai dengan aspek lingkungan. - Sampah dan tanaman <i>mangrove</i> yang dikelola akan mewujudkan ramah lingkungan.
Teknologi	- Akses jalan menuju ekowisata <i>mangrove</i> Wonorejo menjadi baik dan sangat nyaman dengan adanya jalan yang beraspal dan luas. - Adanya alat yang canggih untuk menghambat sampah dari laut yang akan masuk ke hutan <i>mangrove</i> . Sehingga lingkungan objek wisata tetap terjaga dengan baik. - Dengan melakukan kerjasama dengan dinas atau pihak terkait untuk memperbaiki fasilitas yang kurang memadai sehingga pengunjung akan meningkat.

Sumber: Data olahan penulis

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 (lima) aspek yang mencakup mengenai skenario paling baik, aspek tersebut yakni ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan teknologi. Di dalam aspek ekonomi mencakup mengenai penyediaan fasilitas untuk

menunjang pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo yang dapat berdampak bagi masyarakat dan daerah, yaitu meningkatkan pengunjung dan hasil produksi meningkat. Secara tidak langsung hal tersebut akan menambah pendapatan masyarakat sendiri dan daerah. Aspek politik mencakup mengenai tercapainya tujuan pemerintah yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah disusun oleh pemerintah kota Surabayaa. Aspek sosial mencakup mengenai terciptanya lapangan pekerjaan baru dengan menjadi pengurus ekowisata *mangrove* Wonorejo dan pengelola hasil produksi yang dapat mensejahterakan masyarakat, karena dari mengelola *mangrove* masyarakat akan mendapatkan tambahan penghasilan. Aspek lingkungan mencakup mengenai menjaga dan melestarikan tanaman *mangrove* yang akan menghasilkan lingkungan yang bersih karena tercantum dalam peraturan daerah dan sampah juga tanaman *mangrove* yang diolah akan mewujudkan ramah lingkungan. Sedangkan aspek teknologi mengenai akses jalan masuk yang beraspal dan luas dan adanya alat canggih untuk pembatas sampah dari laut tidak masuk ke hutan *mangrove*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dinas atau pihak terkait untuk pembangunan jalan dan pembatas sampah.

Tabel 9
Penjelasan Q₂(+,-) (Baik)

Aspek	Penjelasan
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya fasilitas yang mendukung dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan pendapatan masyarakat. - Peran masyarakat juga harus ikut serta untuk menggerakkan ekowisata dan mengelola hasil produksi dari tanaman <i>mangrove</i>.
Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan dan kebijakan yang disusun pemerintah berjalan belum maksimal, karena masyarakat masih belum memahami menlestarikan lingkungan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak seluruhnya berjalan.
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya lapangan pekerjaan baru dengan membuat hasil produksi yang dikelola dari sampah dan tanaman <i>mangrove</i> dengan keikutsertaan sebagian masyarakat.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah dan tanaman <i>mangrove</i> yang dikelola oleh sebagian masyarakat akan mewujudkan ramah lingkungan.
Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan menuju ekowisata <i>mangrove</i> Wonorejo menjadi sedikit lebar dan sebagian yang beraspal. - Tersedianya alat bantu agar sampah dari laut tidak masuk ke hutan <i>mangrove</i>.

Sumber: Data olahan penulis

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 (lima) aspek yang mencakup mengenai skenario baik, aspek tersebut yakni ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan teknologi. Di dalam aspek ekonomi mencakup adanya fasilitas yang memadai agar dapat menambah jumlah pengunjung dan dengan mengelola hasil produksi akan mampu menambah pendapat masyarakat dan daerah. Aspek politik mencakup mengenai kebijakan dan peraturan yang disusun pemerintah belum berjalan dengan baik, karena masyarakat masih belum memahami pentingnya aspek lingkungan, karena pemerintah membuat kebijakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

yang mempertimbangkan aspek lingkungannya. Aspek sosial mencakup mengenai terciptanya lapangan pekerjaan baru. Aspek lingkungan mencakup mengenai menjaga kelestarian dan ramah lingkungan oleh sebagian masyarakat. Sedangkan aspek teknologi mengenai akses jalan masuk objek wisata hanya sebagian yang beraspal dan kurang luas dan adanya alat bantu untuk pembatas sampah laut agar tidak masuk ke hutan *mangrove*.



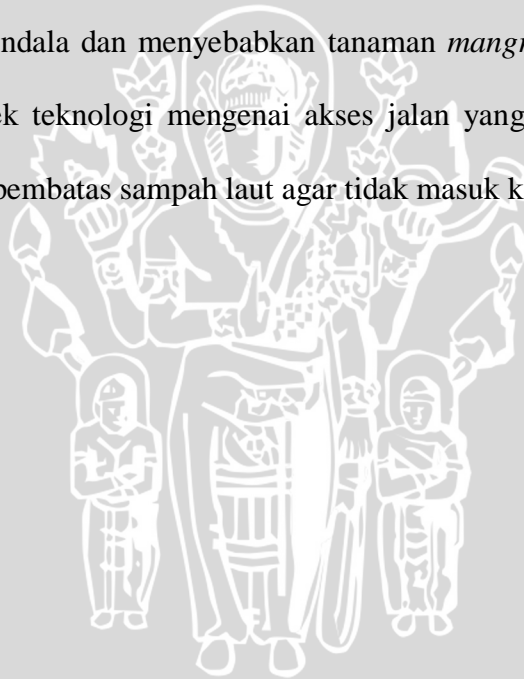
Tabel 10
Penjelasan Q₃(+,-) (Buruk)

Aspek	Penjelasan
Ekonomi	- Fasilitas yang dimiliki masih sangat kurang memadai dan menurunnya hasil produksi, sehingga jumlah pengunjung menurun dan pendapatan masyarakat dan daerah mengalami penurunan.
Politik	- Kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah tidak berjalan dengan baik, karena masyarakat yang minim pengetahuan tentang lingkungan.
Sosial	- Sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada, sehingga tidak dapat menambah pendapatan masyarakat menyebabkan kesejahteraan masih rendah.
Lingkungan	- Pemerintah memiliki perencanaan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang tentunya melihat aspek lingkungan yang akan terjaga dengan baik, namun masyarakat masih belum mampu berpartisipasi dalam aspek lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan di ekowisata <i>mangrove</i> Wonorejo masih belum terjaga dengan baik, sehingga dampaknya dapat merusak tanaman <i>mangrove</i> .
Teknologi	- Akses jalan menuju ekowisata <i>mangrove</i> Wonorejo sebagian beraspal namun tidak sampai ke lokasi wisata dan juga sempit. - Kurang memadainya alat untuk menghambat sampah masuk ke hutan <i>mangrove</i> .

Sumber: Data olahan penulis

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 (lima) aspek yang mencakup mengenai skenario buruk, aspek tersebut yakni ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan teknologi. Di dalam aspek ekonomi mengenai tentang kurang memedainya fasilitas dan menurunnya hasil produksi, sehingga jumlah pengunjung berkurang dan menyebabkan pendapatan masyarakat dan daerah menurun. Aspek politik mencakup

mengenai kebijakan dan peraturan yang disusun pemerintah tidak berjalan dengan baik, karena pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan kurang. Aspek sosial mencakup mengenai sedikitnya lapangan pekerjaan, sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar. Aspek lingkungan mencakup mengenai kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan, meskipun pemerintah memiliki kebijakan yang mengatur tata guna lahan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sampai saat ini masih mengalami kendala dan menyebabkan tanaman *mangrove* dan lingkungan sekitar. Sedangkan aspek teknologi mengenai akses jalan yang sempit dan kurang memadainya alat untuk pembatas sampah laut agar tidak masuk ke hutan *mangrove*.



Tabel 11
Penjelasan Q₄(-,-) (Paling Buruk)

Aspek	Penjelasan
Ekonomi	- Teknologi yang tidak memadai membuat fasilitas tidak dapat terlengkapi dan tidak ada fasilitas pembudidayaan <i>mangrove</i> , sehingga jumlah pengunjung menurun drastis dan tidak ada pendapatan untuk masyarakat dan daerah.
Politik	- Implementasi perencanaan dalam kebijakan dan peraturan yang disusun oleh pemerintah tidak berjalan, karena partisipasi masyarakat yang lemah untuk melestarikan lingkungan.
Sosial	- Sepinya objek wisata membuat lapangan pekerjaan semakin menyempit, sehingga kesejahteraan sosial tidak terwujud.
Lingkungan	- Tidak berjalannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyebabkan tanaman <i>mangrove</i> dan lingkungan mengalami kerusakan karena tidak ada alat pembatas sampah dan pengetahuan masyarakat yang kurang.. - Tidak terwujudnya ramah lingkungan.
Teknologi	- Akses jalan menuju ekowisata <i>mangrove</i> Wonorejo berlubang karena masih tidak beraspal dan juga sempit. - Tidak adanya pembatas atau penyangga yang canggih untuk menghambat sampah masuk ke hutan <i>mangrove</i> .

Sumber: Data olahan penulis

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 (lima) aspek yang mencakup mengenai skenario paling buruk, aspek tersebut yakni ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan teknologi. Di dalam aspek ekonomi mencakup mengenai tidak memadainya fasilitas, sehingga jumlah pengunjung menurun dan menyebabkan tidak adanya pendapatan untuk masyarakat dan daerah. Aspek politik mencakup mengenai pelaksanaan perencanaan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah tidak berjalan dengan baik karena masyarakat yang tidak memahami aspek lingkungannya. Aspek sosial mencakup mengenai sepi objek wisata sehingga menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sepi dan kesejahteraan sosial tidak akan terwujud. Aspek

lingkungan mencakup mengenai tidak berjalannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga tanaman *mangrove* banyak rusak dan aspek lingkungan tidak terjaga. Sedangkan aspek teknologi mengenai akses jalan yang berlubangsehingga menyebabkan kondisi jalan yang sangat rusak dan tidak adanya alat canggih pembatas sampah laut agar tidak masuk ke hutan *mangrove*.

e. Acting (Bertindak)

Langkah terakhir dalam perencanaan skenario menggunakan metode TAIDA adalah *Acting* (bertindak). Dalam melakukan tindakan pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo harus sesuai dengan aturan yang telah ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Peraturan Walikota (PERWALI) Surabaya No. 65 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menyatakan bahwa pantai timur Surabaya (Pamurbaya) sebagai wilayah konservasi. Peraturan yang ada tersebut memberikan suatu gambaran bagaimana ekowisata dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip yang ada.

Pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo sendiri membutuhkan banyak campur tangan yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Dengan adanya kerjasama yang terjalin antar tiga pihak tersebut, pengembangan ekowisata akan mampu berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak

swasta dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo untuk menunjang skenario-skenario yang terdapat pada langkah sebelumnya, yaitu:

- a. Pemerintah harus selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu jika akan melakukan suatu tindakan atau melaksanakan program baru, sehingga masyarakat benar-benar memahami.
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan tanaman *mangrove*, supaya masyarakat mampu memahami dan tidak merusak lagi tanaman tersebut.
- c. Kepedulian masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam menjaga dan melestarikan tanaman *mangrove* dan menjaga kebersihan objek wisata, karena dilapangan sendiri sampah masih terlihat. Adapun pengelola memberikan suatu tindakan tegas kepada para pengunjung yang datang supaya tidak membuang sampah sembarangan, misalnya dengan melakukan pengawasan pada objek wisata dan memberikan teguran halus kepada pengunjung yang membuang sampah sembarangan, menyediakan tempat sampah lebih banyak, memeriksa tas pengunjung memastikan tidak membawa makanan atau minuman dari luar karena di dalam objek wisata terdapat PKL dan juga resto.
- d. Pemerintah memberikan fasilitas yang lebih lengkap kepada ekowisata *mangrove* Wonorejo misalnya dengan membangun outbond. Pemberian fasilitas outbond ini akan dapat membantu untuk menarik pengunjung supaya berkunjung ke ekowisata. Pada kenyataannya, fasilitas outbond ini banyak diminati oleh banyak orang dari anak-anak dan orang dewasa. Tidak hanya

itu, permainan *outbond* lebih banyak didapatkan di tempat rekreasi yang berbaur dengan alam misalnya di daerah Malang, sedangkan wisata alam di Surabaya masih terbilang kurang. Oleh karena itu, dilihat dari lokasi kota Surabaya yang sudah sangat modern dan jarang sekali terdapat wisata lingkungan, wisata *mangrove* Wonorejo ini dapat menjadi suatu kebanggaan dengan potensi yang dimiliki.

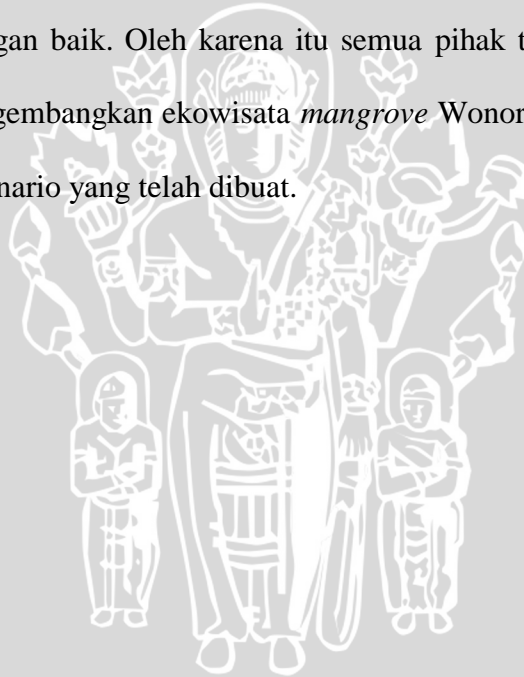
- e. Menyediakan alat transportasi menuju ke ekowisat *mangrove* Wonorejo, agar pengunjung yang tidak memiliki kendaraan dapat menjangkau. Hal ini dapat dipertimbangkan dengan melibatkan dinas terkait. Adanya transportasi tersebut dapat menunjang pengembangan ekowisata untuk terus dikenal, karena tersedianya alat transportasi.
- f. Memperbaiki akses jalan menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo yang kenyataan masih kurang memadai. Jalan yang terlihat baik hanya pada lokasi perumahan dekat dengan ekowisata, namun pada saat menuju lokasi ekowisata jalannya terbilang tidak nyaman bahkan berlubang dan pada saat banjir akan menyebabkan becek. Tidak hanya kondisi jalan yang kurang memadai melainkan juga bisa dibidang sempit, sehingga menyebabkan pengunjung kurang nyaman.
- g. Pemerintah dan pengelola harus melakukan suatu gebrakan untuk mengenalkan ekowisata *mangrove* Wonorejo kepada masyarakat luar supaya berkunjung, karena jumlah pengunjung ekowisata ini tidak begitu banyak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri sudah melakukan pemasaran berupa

brostur yang disebarakan pada setiap event yang dilakukan dan mengenalkan hasil produksi pada bazar-bazar yang diadakan. Namun hal ini belum mampu menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung. Mungkin dengan membuat suatu acara untuk umum di ekowisata *mangrove* Wonorejo guna mengenalkan kepada masyarakat sekitar, atau diadakan bazaar-bazar di lokasi ekowisata dan memasang iklan di pinggir jalan.

- h. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai, aman dan nyaman, sehingga pengunjung betah dan merasa puas pada saat berwisata.
- i. Meningkatkan hasil produksi dengan membuat tempat pembudidayaan tanaman *mangrove* untuk bahan baku pembuatan batik, sirup, krupuk dan dodol *mangrove*. Setelah dibuat pembudidayaan tanaman *mangrove* ini, masyarakat tidak perlu khawatir untuk minimnya ketersediaan bahan karena memiliki pembudidayaan sendiri, karena dengan adanya hal tersebut akan mampu meningkatkan hasil produksi.
- j. Menyediakan alat untuk pembatas sampah yang datang dari laut, karena saat ini pengelola masih menggunakan jaring-jaring yang kurang efektif. Jaring-jaring tersebut kalah dengan adanya sampah yang banyak, sehingga diperlukan alat yang lebih kuat atau canggih untuk memberikan batasan sampah agar tidak masuk ke hutan *mangrove*.
- k. Pemerintah juga harus memberikan wadah atau suatu dukungan dalam memasarkan hasil produksi tanaman *mangrove* tersebut supaya hasil produksi tersebut dapat dikenal luas oleh masyarakat luar daerah tidak hanya

masyarakat Surabaya, karena hasil produksi ini merupakan suatu ciri khas dari kelurahan Wonorejo kecamatan Rungkut Surabaya.

Tindakan-tindakan diatas akan mampu memberikan dampak yang baik untu perkembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo, karena semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. Suatu kerjasama sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu proses perencanaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik makan perencanaan yang ada tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu semua pihak terkait harus mampu bekerjasama untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo pada tahun 2015 dengan perencanaan skenario yang telah dibuat.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah suatu objek wisata yang menawarkan keindahan alamnya yang berbasis ramah lingkungan yang dikelola oleh masyarakat Wonorejo yang terletak di kelurahan Wonorejo kecamatan Rungkut kota Surabaya. Potensi alam yang dimiliki ekowisata tersebut memberikan banyak manfaat yang dapat diambil, yaitu sebagai pelindung pantai, habitat fauna *mangrove*, sumber bahan industri, kawasan konservasi dan wisata edukasi. *Mangrove* di Wonorejo juga dapat diolah menjadi hasil produksi yaitu batik *mangrove*, sirup *mangrove* dan kerupuk *mangrove*. Pengelolaan ekowisata ini dilakukan oleh masyarakat Wonorejo, namun peran pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga ikut serta dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo. Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap tanaman *mangrove* dan melakukan kegiatan penanaman *mangrove*. Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membantu dalam mengenalkan objek wisata kepada masyarakat. Pemerintah kota Surabaya telah menyusun perencanaan sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tercantum pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota (PERWALI) Surabaya No. 65 Tahun 2011. Dalam hal tersebut,

kawasan kelurahan Wonorejo merupakan salah satu kawasan konservasi atau kawasan lindung, yang menjadi wewenang pemerintah yang harus dilakukan.

2. Pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini dapat dipengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo adalah masyarakat sebagai pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo, hasil produksi dari tanaman *mangrove*, sebagai kawasan konservasi dan danya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta. Faktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan, minimnya bahan baku untuk hasil produksi, fasilitas yang kurang memadai dan kurang terawat, kebersihan yang masih kurang terjaga dan belum adanya alat untuk pembatas sampah dari laut.
3. Perencanaan skenario adalah suatu alat yang mampu memberikan gambaran terhadap masa depan ekowisata *mangrove* Wonorejo dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Proses perencanaan skenario sendiri terdapat metode TAIDA yaitu *tracking* (melacak), *analysing* (analisis), *imaging* (membayangkan), *deciding* (memutuskan) dan *acting* (bertindak). Dalam metode TAIDA terdapat *focal concern* (fokal utama) dan *driving forces* (kekuatan pendorong). *Focal concern* merupakan suatu fokus utama, sehingga yang ditetapkan adalah perencanaan skenario pengembangan ekowisata *mangrove* Wonorejo tahun 2015. Sedangkan *driving forces* merupakan suatu kekuatan pendorong mengapa perencanaan skenario perlu dilakukan. *Driving forces* ini terdiri dari lima aspek yaitu politik, sosial, lingkungan, ekonomi dan teknologi.

Ada dua *driving forces* dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat yang masuk dalam aspek sosial dan aspek teknologi. Selanjutnya dibuat matriks skenario dari kedua *driving forces* tersebut beserta penjelasannya. Berdasarkan tabel-tabel penjelasan matriks skenario akan memberikan gambaran kepada pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo dan pemerintah mengenai kondisi ekowisata pada tahun 2015. Berdasarkan matriks perencanaan skenario yang telah dibuat, berikut adalah skenario paling baik dan paling buruk:

Skenario paling baik :

- a. Aspek ekonomi: Penyediaan transportasi, alat pembatas sampah, perbaikan kondisi jalan yang rusak, perbaikan fasilitas dan menyediakan tempat untuk pembudidayaan *mangrove* yang digunakan untuk hasil produksi akan menambah jumlah pengunjung dan menambah pendapatan masyarakat dan daerah.
- b. Aspek politik: Tercapainya tujuan pemerintah dalam mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo sesuai dengan peraturan daerah dan didukung partisipasi masyarakat terhadap lingkungan yang tinggi sekitar Surabaya.
- c. Aspek sosial: Terciptanya lapangan pekerjaan baru dengan membuat hasil produksi yang dikelola dari sampah dan tanaman *mangrove* dan didorong oleh keinginan masyarakat yang sangat tinggi dan fasilitas dari pemerintah. Sehingga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
- d. Aspek lingkungan: Menjaga dan melestarian *mangrove* akan tercipta lingkungan yang bersih karena yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan

daerah tentang tata guna lahan sesuai dengan aspek lingkungan. Sampah dan tanaman *mangrove* yang dikelola akan mewujudkan ramah lingkungan.

- e. Aspek teknologi: Akses jalan menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo menjadi baik dan sangat nyaman dengan adanya jalan yang beraspal dan luas. Adanya alat yang canggih untuk menghambat sampah dari laut yang akan masuk ke hutan *mangrove*. Sehingga lingkungan objek wisata tetap terjaga dengan baik. Dengan melakukan kerjasama dengan dinas atau pihak terkait untuk memperbaiki fasilitas yang kurang memadai sehingga pengunjung akan meningkat.

Skenario paling buruk:

- a. Aspek ekonomi: Teknologi yang tidak memadai membuat fasilitas tidak dapat terlengkapi dan tidak ada fasilitas pembudidayaan *mangrove*, sehingga jumlah pengunjung menurun drastis dan tidak ada pendapatan untuk masyarakat dan daerah
- b. Aspek politik: Implementasi perencanaan dalam kebijakan dan peraturan yang disusun oleh pemerintah tidak berjalan, karena partisipasi masyarakat yang lemah untuk melestarikan lingkungan.
- c. Aspek sosial: Sepinya objek wisata membuat lapangan pekerjaan semakin menyempit, sehingga kesejahteraan sosial tidak terwujud.
- d. Aspek lingkungan: Tidak berjalannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyebabkan tanaman *mangrove* dan lingkungan

mengalami kerusakan karena tidak ada alat pembatas sampah dan pengetahuan masyarakat yang kurang. Tidak terwujudnya ramah lingkungan.

- e. Aspek teknologi: Akses jalan menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo berlubang karena masih tidak beraspal dan juga sempit. Tidak adanya pembatas atau penyangga yang canggih untuk menghambat sampah masuk ke hutan *mangrove*.

Berdasarkan skenario paling baik dan paling buruk diatas, pengelola ekowisata dapat meminimalisir kendala-kendala yang akan terjadi, sehingga pengelola mampu untuk mengatasi ancaman yang akan terjadi jika skenario tersebut digunakan. Namun, tidak hanya pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo yang berperan penting, melainkan kerjasama antar berbagai pihak terkait juga dibutuhkan untuk menjalankan skenario-skenario yang telah dibuat.

B. Saran

Ekowisata *mangrove* Wonorejo sangat perlu dikembangkan, karena potensi yang sangat luar biasa dan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak. tidak hanya untuk lingkungan, melainkan untuk masyarakat dapat membantu menambah penghasilan dengan mengelola tanaman *mangrove* yang dijadikan hasil produksi dan juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adapun saran untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan semua perencanaan yang akan dilakukan terlebih dahulu, sehingga masyarakat akan dapat menerima dengan baik apa tujuan dari perencanaan tersebut.
2. Pemerintah dibantu oleh dinas terkait melakukan perbaikan pada sarana dan prasarana ekowisata *mangrove* Wonorejo, misalnya memperbaiki akses jalan masuk saat menuju ekowisata yang pada kenyataannya masih dalam kondisi rusak dan memberikan suatu alat untuk pembatas agar sampah dari laut tidak masuk ke hutan *mangrove*.
3. Pengelola ekowisata *mangrove* Wonorejo harus melakukan peraturan untuk para pengunjung agar dapat menjaga kebersihan objek wisata, karena pada kenyataannya pengunjung masih sering membuang sampah sembarangan. Pengelola bisa memberikan tempat sampah yang pada setiap lokasi dan memberikan kantong plastik untuk menyimpan sampahnya dan bisa ditukar dengan tiket perahu. Sehingga dapat memberikan suatu kesenangan tersendiri bagi pengunjung.
4. Penegelola bisa membangun *outbond* yang dapat bekerjasama anatar pemerintah dan pihak swasta untuk menarik perhatian masyarakat supaya jumlah pengunjung meningkat. Permainan *outbond* ini di kota Surabaya masih terbilang minim, karena Surabaya adalah kota modern dengan wisata belanjanya diberbagai mall. Sehingga *outbond* ini akan memberikan suatu

yang berbeda di Surabaya dengan wisata alamnya dan masyarakat tidak harus pergi ke luar kota untuk menikmati wisata alam dengan permainan *outbond*.

5. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas untuk meningkatkan hasil produksi dari tanaman *mangrove* Wonorejo sendiri agar dapat bersaing dengan produk lain yang tidak kalah kualitasnya. Sehingga akan memberikan dampak dari aspek ekonomis juga lingkungan.

Saran diatas untuk mengembangkan ekowisata *mangrove* Wonorejo yang ditujukan untuk semua pihak supaya dapat mendapatkan manfaat bersama-sama, karena potensi pada objek wisata ala mini benar-benar harus mendapatkan perhatian dari semua kalangan. Tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak, ekowisata *mangrove* Wonorejo akan mengalami ancaman-ancaman yang dapat merugikan semua pihak tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dari masyarakat dan pemerintah harus terus dihidupkan, supaya potensi ini dapat terus dikembangkan dan dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Damanik, Janianton dan Weber, Helmut. 2006. *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.

Dokumen Lomba Berhasil. 2013. Kelurahan Wonorejo.

Dokumen Luas Hutan *Mangrove* Kota Surabaya. 2013. Dinas Pertanian Kota Surabaya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS). 2012. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Hakim, Luchman. 2004. *Dasar-Dasar Ekowisata*. Malang: Bayumedia

Harahab, Nuddin. 2010. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove dan Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kordi, Ghufran. 2012. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi dan Pengelolaan*. Jakarta: Rienka Cipta.

Lindgreen, Mats and Bandhold, Hans. 2003. *Scenario Planning The Link Between Future and Strategy*. New York: Plagrave Machmillan

Miles, M.B and Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjeheb Rohendi Rohidi. Jakarta: UI

Ringland, Gill. 2002. *Scenario In Public Policy*. New York: John Willey & Sons LTD.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

Yoeti, Oka. 1999. *Ekowisata (Pariwisata Berwawasan Lingkungan)*. Jakarta: P.T Perta.

Internat

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/Jumlah-Pulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buah> Diakses pada 10 Februari 2014 pukul 20.00 WIB

<http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php?id=81> Diakses pada 25 Mei 2014 pukul 08.15 WIB.

<http://www.kopertis7.go.id> Diakses pada 25 mei 2013 pukul 08.45 WIB.

<http://www.rungkut-surabaya.org> Diakses pada 25 Mei 2014 pukul 09.00 WIB.

Jurnal

Agus Harto Wibowo. 2009. *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*. Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Blyth, Michael. 2005. *Learning From The Future Through Scenario Planning*.

Nababan, Rosma. 2004. *Administrasi Publik dalam Wujud Birokrasi Pemerintahan*. Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan –UDA: Medan.

Nurliana. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. eJournal Administrasi Negara, 1(3) 2013 : 1059-1070.

Pariyono. 2006. *Kajian Potensi Kawasan Mangrove dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Wilayah Pantai di Desa Panggung, Bulakbaru, Tanggultlare, Kabupaten Jepara*. Magister Manajemen Sumber Daya Pantai, Universitas Diponegoro Semarang.

Punamawati, Eko, Sadri dan Belvi. 2007. *Manfaat Hutan Mangrove Pada Ekosistem Pesisir*. Media Akuakultur Vol 2 nomor 1. Politeknik

Negeri, Pontianak. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Kalimantan Barat.

Pramudji. 2001. *Ekosistem Hutan Mangrove dan Peranannya Sebagai Habitat Berbagai Fauna Aquatik, Oseana*, Volume XXVI, Nomor 4, 2001:13 – 23.

Tapinos, Efsthios. 2009. *Scenario Planning. Teaching how to anticipate Perceived Environmental Uncertainty within Strategy Development*. Birmingham.

Torsten Wulf, Philip, Stephan Stubner. 2010, *A Scenario-based Approach to Strategic Planning – Integrating Planning and Process Perspective of Strategy*. Leipzig Graduate School of Management.

Trisnantoro, Laksono. 2008. *Skenario Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi*, Vol 11 No.02.

Yosin, Meri. 2013. *Studi Tentang Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik di Pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara*. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, *eJournal Administrasi Negara*, 2013, 1 (2): 802-813.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri DalamNegeri (PERMENDAGRI) No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2011 TentangProsedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan *Mangrove* di Kota Surabaya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya (PERDA) No. 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ema Muslimawati
NIM : 105030600111012
Tempat, tgl lahir : Tuban, 22 April 1992
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Email : Emmamuslimawati@yahoo.co.id
Alamat : Jalan Sunan Giri 3 No. 3 Tuban
Pendidikan : 1. SDN Kebonsari 2, Tamat tahun 2004
2. SMP Negeri 3 Tuban, Tamat tahun 2007
3. SMA Khadijah Surabaya, Tamat tahun 2010



Malang, Juli 2014

Ema Muslimawati

Lampiran 1



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fatmawati
NIP : -
Jabatan : Adminstrasi dan Keuangan Ekowisata Mangrove Wonorejo

Menerangkan bahwa :

Nama : Ema Muslimawati
NIM : 105030600111012
Minat : Perencanaan Pembangunan Universitas Brawijaya

Telah selesai melaksanakan penelitian di Dinas Pertanian Kota Surabaya dan melakukan wawancara, untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul : Perencanaan Skenario Pengembangan Ekowisata Hutan *Mangrove* (Studi Pada Ekowisata *Mangrove* di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya) dari tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan 15 Maret 2014.

Demikian surat keterangan ini yang dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 15 April 2014

Nurul Fatmawati

Lampiran 2



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG
PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KAWASAN MANGROVE DI WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kegiatan masyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan kawasan mangrove di wilayah Kota Surabaya, maka perlu adanya upaya perlindungan terhadap kawasan mangrove dimaksud;
 - b. bahwa guna memberikan perlindungan terhadap kawasan mangrove, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan mangrove, namun upaya dimaksud dinilai belum efektif;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove, perlu adanya prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);



Lampiran 3

2.1.3.4. Kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya Tahun 2011-2015

Rancangan RPJMD Kota Surabaya 2010 – 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian RPJM Kota Surabaya menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Arahan untuk pengembangan penataan ruang dari RPJM Kota Surabaya 2010 – 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang didukung dengan pengembangan multiple intelegent (kecerdasan majemuk dan mental spiritual)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Timur Surabaya

Arahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Peningkatan kualitas, pemerataan, relevansi dan tata kelola pendidikan yang lebih baik, serta meningkatkan minat baca masyarakat.

2. Strategi Peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen layanan kesehatan masyarakat
Diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan melalui peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan serta mewujudkan keluarga sejahtera.
3. Strategi Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik
Kebijakan diarahkan sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang di dukung oleh pengembangan kapasitas aparatur, kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana prasaranan yang memadai.
4. Strategi Penerapan pelayanan publik berstandar internasional (ISO) bidang investasi
Kebijakan diarahkan pada upaya Perbaikan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi terhadap dunia usaha, agar tercipta pelayanan yang prima serta keterbukaan informasi publik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Strategi Pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien
Kebijakan diarahkan upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya.
6. Strategi Pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah
Untuk menjalankan Strategi Pengelolaan, peningkatan, serta pengawasan kekayaan daerah maka Kebijakan diarahkan pada upaya pengamanan dan pemanfaatan aset milik pemerintah kota untuk peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota yang bertujuan untuk pengamanan dan pemanfaatan aset tanah milik pemerintah kota.
7. Strategi Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu
Untuk menjalankan Strategi Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu maka Kebijakan diarahkan pada upaya Peningkatan

L A P O R A N
A K H I R

- efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergis antara sektoral ataupun bidang urusan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Melalui Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan Kota Surabaya.
8. Strategi Pengembangan sistem manajemen, keterpaduan antar jaringan, dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
Kebijakan diarahkan pada upaya untuk penyediaan dan peningkatan sarana prasarana bidang pekerjaan umum untuk peningkatan aksesibilitas wilayah, kelancaran lalu lintas, pengembangan jangkauan layanan air bersih danantisipasi banjir/genangan serta penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak, sehat, serta didukung dengan sistem utilitas dan fasilitas untuk penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran yang memadai
 9. Strategi Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu
Untuk menjalankan Strategi Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu maka Kebijakan diarahkan pada upaya mewujudkan penataan ruang terpadu, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang implementatif melalui Program Penataan Ruang yang bertujuan untuk mengatur dan merencanakan pemanfaatan ruang kota sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 10. Strategi Penerapan prinsip-prinsip ekologis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kota
Untuk menjalankan Strategi Penerapan prinsip-prinsip ekologis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kota maka Kebijakan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kebersihan kota serta optimalisasi fungsi RTH
 11. Strategi Peningkatkan aktualisasi budaya lokal untuk mendukung pengembangan obyek daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan.
Untuk menjalankan Strategi Peningkatkan aktualisasi budaya lokal untuk mendukung pengembangan obyek daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan maka Kebijakan diarahkan pada upaya Peningkatan kualitas dan apresiasi terhadap kreativitas seni, serta perlindungan nilai-nilai warisan budaya lokal serta

Lampiran 4

2.1.4. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya (Perda Nomor 3 Tahun 2007)

Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, terdapat beberapa hal pokok yang ditetapkan sehubungan dengan pengembangan dan perkembangan wilayah perencanaan Kawasan Strategis Pantai Timur Surabaya yang secara keseluruhan berkaitan dengan pengembangan dan perkembangan Kota Surabaya. Kebijakan dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya yang terkait dengan wilayah perencanaan dapat dilihat pada *Tabel 2.3.*

Tabel 2.3.
Kebijakan dan Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Surabaya Pada Wilayah Perencanaan

No.	Kebijakan	Arahan
1.	Struktur Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none">• Struktur Tata Ruang Wilayah tersusun atas ruang Darat, Laut dan Udara yang direncanakan secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ruang secara utuh.• Struktur Wilayah tersebut diwujudkan dengan pembangian Unit Pengembangan (UP) dan Zona Pengembangan Wilayah Laut, Penyebaran Pusat Pertumbuhan dan Pusat Kegiatan serta Skala Pelayanannya, Penataan Pola Distribusi Penduduk, Sistem Transportasi, Sistem Pematusan dan Utilitas Kota, serta Penetapan Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung• Didalam Pembagian struktur wilayah darat dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu Unit Pengembangan Pusat Kota, Unit Pengembangan Transisi dan Unit Pengembangan Pinggiran Kota.
	Struktur Wilayah	Kota Surabaya dibagi menjadi 12 Unit Pengembangan yang didasarkan pada kondisi, karakteristik, dan potensi yang dimiliki pada masing-masing wilayah. Untuk Kawasan Strategis Pantai Timur Surabaya ini termasuk dalam UP. I Rungkut (meliputi sebagian wilayah Kec. Rungkut dan Kec. Gunung Anyar) dan

No.	Kebijakan	Arahan
		UP. II Kertajaya (meliputi sebagian wilayah Kec. Mulyorejo dan Kec. Sukolilo). (Lihat Peta 2.1 .)
	▪ Fungsi Kegiatan	UP. Kertajaya diarahkan fungsinya untuk permukiman, konservasi dan RTH dengan pusat pertumbuhan berada di Kawasan Kertajaya Indah . Sedangkan UP. Rungkut diarahkan fungsinya untuk Permukiman, Pendidikan, Konservasi, Industri dengan pusat pertumbuhan berada di kawasan Rungkut Madya .
2.	Pola ruang (Penggunaan Lahan)	Rencana penggunaan lahan (lihat Peta 2.2) : <ul style="list-style-type: none"> • Perumahan, tersebar pada bagian barat wilayah perencanaan mulai dari utara sampai selatan. Perumahan di wilayah perencanaan mempunyai karakter formal dan sedikit informal pada bagian selatan kawasan. • Ruang terbuka hijau dan konservasi. Hampir mendominasi wilayah perencanaan yang sebagian besar kawasannya merupakan kawasan konservasi dan sebelah timur yang berada dipesisir pantai adalah merupakan kawasan hutan mangrove. Keberadaan Ruang terbuka hijau harus dipertahankan serta ditingkatkan fungsi lindungnya untuk peningkatan kualitas lingkungan kota.
3.	Prasarana Kota	Pengembangan dan prasarana dan sarana kota dilakukan secara terpadu, merata dan terstruktur berdasarkan pada rencana pengembangan wilayah dan lokasi pusat pertumbuhan yang ditekankan pada upaya peningkatan pelayanan, penambahan kapasitas dan jangkauan pelayanan. Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait
4.	Implikasi	Kebijakan RTRW Surabaya secara langsung memberikan dampak terhadap pengembangan Kawasan Strategis Pantai Timur Surabaya yang telah mengalami pertumbuhan cepat. Untuk proporsi penetapan RTH dan kawasan konservasi menuntut adanya pembangunan batas antara kawasan konservasi dan kawasan budidaya terbangun.

Sumber : RTRW Kota Surabaya Perda 3 Tahun 2007

Lampiran 5

2. 1.8. Kebijakan dan Arahan Rencana Sektoral

2.1.8.1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Surabaya

Visi dari rencana strategis wilayah pesisir Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya wilayah pesisir yang produktif dan berkelanjutan dalam menunjang Kota Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa berskala nasional dan internasional”.

Sedangkan misi sebagai penjabaran dari visi yang telah dibuat dari strategis wilayah pesisir Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan wilayah pesisir Kota Surabaya yang lestari melalui strategi yang secara spesifik diuraikan dalam **Tabel 2.11.** berikut.

Tabel 2. 11.
Strategi, Arahan Program Dan Instansi

No	Strategi	Arahan Program	Arahan Kegiatan	Instansi Kunci
1	Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir	1. Pengawasan kualitas bahan buangan kegiatan wilayah darat antara lain industri, permukiman, pelabuhan, dll	a) Penyusunan pedoman dan tata cara pembangunan di wilayah pesisir. b) Penyusunan laporan tahunan mengenai kualitas lingkungan pesisir bersama instansi terkait.	Bappeko BLH Dinas Pertanian
		2. Pengendalian jumlah bahan pencemar di wilayah aliran sungai yang memasuki wilayah pesisir Kota Surabaya	a) Pembangunan IPAL b) Pembangunan instalasi pengolahan limbah cair. c) Pengolahan Sampah Padat berbasis masyarakat	
		3. Penanganan sedimentasi di wilayah aliran sungai yang memasuki wilayah pesisir Kota Surabaya	a) Penghijauan kembali pada sepanjang daerah aliran sungai. b) Penggelontoran sedimentasi dan pendangkalan sungai.	
		4. Peningkatan kualitas fisik pantai di wilayah pesisir Kota Surabaya	a) Pembersihan sungai secara berkala b) Pemeliharaan dan penguatan dinding sungai. c) Pembudidayaan ikan di sungai.	
2	Meningkatkan area hutan mangrove	Pengembangan, Perbaikan dan pemulihan kondisi ekosistem mangrove di Surabaya.	a) Pemetaan wilayah ekosistem mangrove meliputi: kondisi sebaran dan luasan, potensi pertumbuhan dan permasalahan pengembangan spesies. b) Ketersediaan sumberdaya dalam pemulihan ekosistem lewat pembibitan mangrove dan pemulihan habitat. c) Pengembangan ekowisata mangrove untuk pendidikan dan wisata.	BLH Dinas Pertanian
3	Meningkatkan kualitas estuaria	Program peningkatan kualitas estuaria Pesisir Kota Surabaya	Kajian terhadap wilayah ekosistem estuaria melalui dukungan terhadap berbagai penelitian terkait, meliputi: potensi aliran air	BLH

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS)
Pantai Timur Surabaya

No	Strategi	Arahan Program	Arahan Kegiatan	Instansi Kunci
			laut dan tawar, banjir dan alternatif penanganannya, pemanfaatan dan permasalahan pembangunan pesisir serta dampak kegiatan.	
4	Mengembangkan terumbu karang buatan	Program pembuatan terumbu karang buatan	Pelatihan pengembangan terumbu karang	Dinas Pertanian
5	Meningkatkan kesadaran lingkungan Pesisir Surabaya	Program pengendalian perkembangan lingkungan pesisir.	<p>a) Penanaman sejuta pohon terutama di daerah <i>up land</i>.</p> <p>b) Kegiatan mencintai lingkungan a.l dengan tema "Sungaiku sehat sungaiku bermanfaat" melalui seminar, menerbitkan buku untuk anak-anak hingga dewasa, dll.</p> <p>c) Pembuatan pedoman pembangunan wilayah pesisir terkait dengan kegiatan reklamasi dan pengelolaan limbah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pengelolaan limbah rumah tangga berbasis masyarakat. ■ Pengelolaan limbah industri berbasis kelestarian lingkungan. <p>d) Penertiban ijin pengembangan di Parabaya dan Pamurbaya</p>	BLH Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan

b) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi lingkungan.



Lampiran 6



Kondisi dermaga ekowisata *mangrove* Wonorejo



Kondisi perahu ekowisata *mangrove* Wonorejo



Kondisi *Jogging track* (bantuan dari Dinas Pertanian)



Taman Bermain anak-anak



Kondisi PKL ekowisata mangrove Wonorejo



Kondisi Musholla di ekowisata mangrove Wonorejo



Kondisi ekowisata mangrove Wonorejo yang kebersihannya kurang terjaga





Kondisi hutan *mangrove* yang penuh sampah dari laut



Kondisi jalan menuju ekowisata *mangrove* Wonorejo yang rusak dan sempit